

TESIS

PENGEMBANGAN MODEL PENDAMPING SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN

KK

798 15 07

Ag

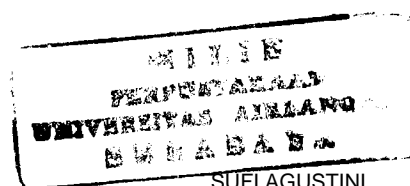
P



Oleh :

SUFI AGUSTINI
NIM. 090410736L

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006



**PENGEMBANGAN MODEL PENDAMPING SOSIAL
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM
PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**



Oleh :

**SUFI AGUSTINI
NIM. 090410736L**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

Lembar Pengesahan

Tesis ini Telah disetujui :

Tanggal: 14 – 8 – 2006

Oleh:

Pembimbing Ketua,



Dr. Sunarjo, dr., MS., MSc.

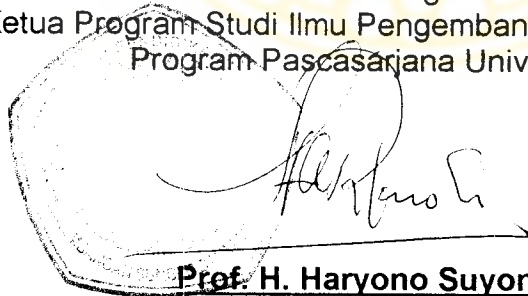
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Machmud Zain, SH., MSi.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Prof. H. Haryono Suyono, MA., PhD.

Telah diuji pada

Tanggal 28 Agustus 2006

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Hariadi Soeparto, dr., DOR., MSc

Anggota : 1. Dr. Sunarjo, dr., MS., MSc

2. Prof. Dr. Machmud Ibnu Zain, SH., Msi

3. Dr. Ida Bagus Wirawan, Drs., SU

4. Agus Syamsuddin, SH., MS



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Pengembangan Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin".

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyelesaian studi pada Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya dan dalam penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikan dorongan, bantuan dan masukan, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Bapak Dr. Sunarjo, dr.,MS.,MSc, Ketua Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, sekaligus sebagai Pembimbing Ketua yang telah banyak memberikan pengetahuan, bimbingan, saran dan do'a restunya.

Bapak Prof. Dr. Machmud Ibnu Zain, SH., MSi, selaku Pembimbing yang telah banyak membrikan pengetahuan, bimbingan dan saran dalam penyelesaian tesis ini.

Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin, Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Pemerintah Propinsi Jawa Timur, khususnya Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, yang telah memberikan bantuan finansial, sehingga meringankan beban penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Bapak Ir. Binsar Tua Siregar, Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, beserta seluruh jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan dan do'a restunya selama penulis menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Suamiku tercinta dan putriku tersayang Icha dan Aya, yang selama ini telah mendampingi dan memberikan dukungan, dorongan dan do'a restu yang tidak ternilai, juga kepada ibunda tercinta yang selalu menyertakan penulis dalam do'a, sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Sahabat-sahabatku dan rekan-rekan seperjuangan extravaganza paralel PSDM 2004, yang selalu kompak dan saling memberikan dukungan dan dorongan dalam mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.

Teman-teman lima sekawan di sekretariat : Mbak Ira, Mbak Adri, Mas Lukman, Mas Tino dan Mas Dani, yang selalu memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat barokah dan ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya.

Surabaya, Agustus 2006

Penulis

RINGKASAN**PENGEMBANGAN MODEL PENDAMPING SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN****Sufi Agustini**

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah nasional, karena masalah kemiskinan merupakan sumber muncul dan berkembangnya permasalahan sosial yang lain, seperti anak terlantar, anak jalanan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, pengemis, gelandangan, keluarga berumah tak layak huni, tuna susila dan sebagainya. Oleh karena itu, masalah kemiskinan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat, karena permasalahan kemiskinan ini tidak pernah kunjung habisnya dan semenjak terjadinya krisis moneter semakin banyak penduduk yang terhimpit dalam kondisi ketidakberdayaan, sehingga jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat menyesuaikan dengan tuntutan keadaan, pendidikan dan kemampuan yang mereka miliki sangat rendah, ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan dan adanya ketegangan fisik maupun emosional.

Pemerintah telah banyak melakukan upaya-upaya pengentasan masalah kemiskinan, antara lain adalah Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan adalah dengan pemberdayaan fakir miskin, yaitu dengan memberikan bantuan sosial melalui bantuan stimulan usaha ekonomi produktif kepada Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang dikelola secara berkelompok melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Bantuan stimulan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yang layak dan mampu melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. Namun karena keterbatasan kemampuan keluarga miskin dalam mengelola bantuan sosial tersebut, aksesibilitas pemasaran, kualitas usaha dan cara usaha, maka harus dibantu dengan suatu mekanisme pendampingan baik oleh supra struktur maupun infra struktur sendiri. Karena pembangunan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Pendamping Sosial KUBE ini merupakan ujung tombak yang sangat menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pendamping Sosial KUBE berperan sebagai nara sumber, penggerak sekaligus sebagai fasilitator bagi pemberdayaan keluarga miskin. Namun dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan, karena masih banyak pendamping sosial KUBE yang tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pendamping sosial tersebut, dimana latar belakang pendidikannya rata-rata SLTA, sehingga penguasaan dan pemahaman tentang penanganan masalah kemiskinan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif belum optimal, meskipun Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur telah memberikan

pelatihan, pembekalan dan pemantapan kepada para pendamping sosial KUBE. Namun program pendampingan sosial ini belum berjalan efektif, karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan bahwa pendamping sosial KUBE di Jawa Timur 80% belum dapat melaksanakan peranannya dengan baik dan apakah dengan adanya program ini keluarga miskin dapat mengelola usahanya dengan baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian tentang model pendamping sosial KUBE yang dilaksanakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur sudah cukup efektif atau belum dan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kesempurnaan pelaksanaan model pendamping sosial KUBE dalam pemberdayaan keluarga miskin, sehingga model pendamping sosial tersebut sesuai dengan kemampuan dan harapan dari Keluarga Binaan Sosial (KBS) maupun Pendamping Sosial KUBE sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini permasalahan yang akan dijawab adalah model pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bagaimanakah yang sesuai untuk pemberdayaan keluarga miskin dan yang *applicable* bagi Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.

Permasalahan tersebut kemudian dicarikan solusinya melalui penelitian ini, dengan cara mendiskripsikan dan menganalisis model pendamping sosial KUBE dalam melaksanakan program pemberdayaan keluarga miskin yang diterapkan selama ini, yang diharapkan dan kemudian dilakukan pengkajian secara teoritis. Penggabungan ketiga dasar analisis ini yaitu, pendamping sosial KUBE yang diterapkan selama ini, pendamping sosial KUBE yang diharapkan dan pendamping sosial KUBE sesuai teori dan petunjuk pelaksanaan dijadikan model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan, yang disebut penelitian *tahap pertama* yaitu tahap *model building* (menyusun/mengembangkan model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 orang responden yang dijadikan sampel penelitian observasi ini bahwa sebagian besar pendamping sosial KUBE memerlukan adanya rekrutmen calon pendamping sosial KUBE, pembekalan dengan menggunakan praktek magang yang efektif dan efisien yang meliputi sumber daya manusia, materi, metode, alokasi dana, waktu, instruktur, sarana dan prasarana pembekalan serta praktek magang pada KUBE yang berhasil/berprestasi serta kemitraan usaha antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan keluarga miskin.

Untuk membuktikan hal tersebut, maka *tahap kedua* dalam penelitian ini dilakukan uji coba model (*testing model*) dengan menggunakan jenis penelitian Quasi Eksperimen kepada 2 kelompok, yaitu kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*), baik pada saat sebelum dan sesudah mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang pre test-post test yang tidak mendapatkan perlakuan *treatment* dan 20 orang pre test-post test yang mendapatkan perlakuan, dengan mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan.

Hasil uji statistik Chi Square menunjukkan bahwa ada perbedaan pre test dan post test antara kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*), sedangkan pada kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) menunjukkan tidak ada perbedaan tentang rekrutmen calon pendamping sosial KUBE, pentingnya pembekalan bagi pendamping sosial KUBE, pelaksanaan pembekalan pendamping sosial KUBE dan pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin melalui pendekatan kelompok usaha bersama. Berdasarkan hasil uji perbandingan chi square menunjukkan aspek yang membedakan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) tentang rekrutmen calon pendamping sosial KUBE, pentingnya

pembekalan bagi pendamping sosial KUBE, pelaksanaan pembekalan bagi pendamping sosial KUBE, dan pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan UEP keluarga miskin melalui pendekatan KUBE dengan signifikansi ($P < 0,05$). Jadi antara kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) mempunyai perbedaan persepsi dan pemahaman pendamping sosial KUBE, pelaksanaan pembekalan pendamping sosial KUBE, dan pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin melalui pendekatan kelompok usaha bersama. Pada kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) menunjukkan perubahan sikap dan respon yang positif dalam melaksanakan peranan dan tugas sebagai pendamping sosial KUBE. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan kajian Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dalam penyempurnaan pelaksanaan program pendampingan dalam pemberdayaan keluarga miskin di masa yang akan datang.



SUMMARY

THE MODEL DEVELOPMENT OF SOCIAL WORKERS OF
PRODUCTIVE ECONOMIC COLECTIVE EFFORT
IN EMPOWERING THE IMPOVERISHED FAMILIES

Sufi Agustini

Poverty is a national problem because it results in other social problems, for instances, neglected children, homeless children, child abuse, beggars, street walkers, and so on. Therefore, both the government and society have to seriously overcome this endless problem. Since the monetary crisis, the people have become more powerless and it has increased the numbers of impoverished people. This is because they are unable to adapt to the demanding condition, they have low education and unskilful, they face economic guarantee uncertainty, and they have no political experience, no access to information, no financial support, and they have untrained and undergo physical and emotional tenses.

The government has conducted many efforts to overcome the poverty problems, for example that of which have been done by Social Department of East Java Province. Social Department of East Java Province has empowered the impoverished people through social stimulant aid for productive economic effort (Usaha Ekonomi Produktif/UEP) for the clients or KBS (Keluarga Binaan Sosial) managed collectively through the approach of productive economic collective effort (Kelompok Usaha Bersama/KUBE). This stimulant aid is aimed at increasing the ability of impoverished families to fulfill their basic needs properly and to conduct productive economic effort. However, because of limitedness of the impoverished families in managing that social aid, marketing accessibility, business quality and business procedure, they have to be assisted by a certain mechanism of accompaniment by both supra and infra structure. Since the government and society have to be responsible for the development of social welfare, the society has big chance to perform social welfare efforts by heeding the Law no. 6/1974 regarding the principal regulation of social welfare.

The social workers of KUBE determine the success of the program of poverty overcoming through the approach of KUBE. The social workers of KUBE have a role as resource persons, actuator and facilitator for empowering the impoverished families. However, in the reality, many social workers of KUBE are still not able to play their role optimally due to their limitedness in knowledge, ability, and skill. Most of them were graduated from senior high school so the mastering and comprehension of treatment toward the poverty problem and the management of UEP have not been done optimally yet; even though the Social Department of East Java Province has trained, supplied, and steadied them. This social accompaniment program, however, has not been effective yet. Based on the evaluation result of the conducted accompaniment, 80 % of social workers in East Java have not played their role well.

Concerning the problem above, it is necessary to conduct a research on whether the model of social workers of KUBE done by Social Department of East Java Province has been effective enough and things that is to be necessarily improved for the completeness in carrying out the model of social workers of KUBE in

ABSTRACT

THE MODEL DEVELOPMENT OF SOCIAL WORKERS OF
PRODUCTIVE ECONOMIC COLECTIVE EFFORT
IN EMPOWERING THE IMPOVERISHED FAMILIES

Sufi Agustini

This study aimed at describing and analyzing the model development of social workers of KUBE which is suitable to empower the impoverished families and applicable for the Social Department of East Java Province. The samples taken were 42 respondents, namely, all social workers of KUBE in Blitar Regency. This study was done at two stages. The first stage was the model building done by using survey and literature study and then the result was sent to the Focus Group Discussion (FGD) to formulate the model development of social workers of KUBE which is suitable to empower the impoverished families. The second stage was the model testing done by using quasi experiment study with pre test-post test design for the untreated group and the treated group.

The result of the study showed that there was the difference of pre test-post test within the treated group and there was not the difference within the untreated group about the candidate recruitment of social workers of KUBE, the importance of supplying for the social workers of KUBE, the carrying out of supplying for the social workers of KUBE, and the social workers of KUBE in conducting UEP for the impoverished families through the approach of KUBE. Based on the result of Chi Square comparison testing, the aspects distinguishing between the untreated group and the treated group were the candidate recruitment of social workers of KUBE, the importance of the supplying for the social workers of KUBE, the carrying out of supplying for the social workers of KUBE and the social workers of KUBE in conducting UEP for the impoverished families through the approach of KUBE with the significance of $P < 0,05$.

From the study result, it was expected that the respondents would have willing and interest to optimally conduct the role of social workers of KUBE in empowering the impoverished families. Besides, it is expected to be the input for Social Department of East Java Province to develop the model of social workers of KUBE in the future which is suitable with the ability and expectation of the clients through selective recruitment of social workers, supplying with apprenticeship, and partnership among government, private, and society in conducting the program of social workers of KUBE in empowering the impoverished families.

Keywords: The model of social workers of KUBE, empowerment, poverty.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar	iii
Persetujuan	iv
Ucapan Terima Kasih	vi
Ringkasan	viii
Summary	xi
Abstrak	xiii
Daftar Isi	xiv
Daftar Gambar	xvii
Daftar Tabel	xviii
Daftar Lampiran	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pemahaman Terhadap Kondisi Ketidakberdayaan dan Kemiskinan	10
2.1.1. Permasalahan Kemiskinan dan Kompleksitasnya	12
2.1.2 Jenis-jenis Kemiskinan	17
2.1.3 Ciri-ciri Kemiskinan	18
2.1.4 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan	20
2.2 Pemberdayaan Sebagai Strategi Dalam Pengentasan Kemiskinan	23
2.3 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sebagai Suatu Pola Pendekatan Pemberdayaan Keluarga Miskin	26
2.4. Model	29
2.4.1. Model-Model Pendamping Sosial	32
2.5 Pendamping Sosial Dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin.....	35
BAB 3 LANGKAH-LANGKAH DAN KERANGKA PIKIR PENGEMBANGAN MODEL	51
3.1. Langkah-Langkah Pengembangan Model.....	51
3.2. Penjelasan Langkah-langkah Pengembangan Model	52
3.3. Kerangka Pikir Pengembangan Model	52
3.4. Penjelasan Kerangka Pikir Pengembangan Model	54
BAB 4 METODE PENELITIAN	55
4.1 Jenis Penelitian	55
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	58
4.2.1. Lokasi Penelitian	58
4.2.2. Waktu Penelitian	58

4.3	Populasi dan Sampel	58
4.4	Identifikasi Variabel Penelitian	59
4.5	Definisi Operasional Variabel	59
4.6	Instrumen Penelitian	61
	4.6.1. Validitas	62
	4.6.2. Reliabilitas	62
4.7.	Prosedur Pengumpulan Data	63
4.8.	Cara Pengolahan dan Analisa Data	64
	4.8.1. Cara Pengolahan.....	64
	4.8.2. Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>)	64
	4.8.3. Pembuatan Kode (<i>Coding</i>)	64
	4.8.4. Tabulasi	64
	4.8.5. Analisis	64
BAB 5	ANALISA HASIL PENELITIAN	67
5.1.	Gambaran Umum	67
	5.1.1. Gambaran Umum Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur	67
	5.1.2. Gambaran Umum Kabupaten litar dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Blitar	70
5.2.	Responden Penelitian	73
5.3.	Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Telah Mengikuti Pembekalan Yang Diterapkan Selama Ini	73
	5.3.1. Karakteristik Responden	73
	5.3.2. Deskripsi Jawaban Responden	74
5.4.	Keluarga Binaan Sosial (KBS) Melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Miskin	88
	5.4.1. Karakteristik Responden	88
	5.4.2. Deskripsi Jawaban Responden	89
5.5.	Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berdasarkan Teori dan Petunjuk Pelaksanaan	96
5.6.	Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Diharapkan	98
5.7.	Hasil <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	101
5.8.	Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Dikembangkan	112
5.9.	Uji Coba Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Dikembangkan	114
	5.9.1. Karakteristik Responden	114
	5.9.2. Hasil Uji Statistik Chi Square (x^2)	117
	5.9.3. Analisis x^2 Perbandingan Kelompok Yang Tidak Mendapatkan Perlakuan (<i>treatment</i>) dan Kelompok Yang Mendapatkan Perlakuan (<i>treatment</i>)	128
BAB 6	PEMBAHASAN	134
6.1.	Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Telah Mengikuti Pembekalan Yang Diterapkan Selama Ini	134
6.2.	Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Diharapkan	137

6.3. Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berdasarkan Teori dan Petunjuk Pelaksanaan	139
6.4. Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Dikembangkan	146
6.5. Uji Coba Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Dikembangkan	150
BAB 7 PENUTUP	152
7.1. Kesimpulan	152
7.1.1. Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Diharapkan	152
7.1.2. Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Dikembangkan	153
7.1.3. Uji Coba Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Dikembangkan	155
7.2. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 : Langkah-langkah Pengembangan Model	51
Gambar 3.2 : Bagan Kerangka Pikir	53
Gambar 6.1 : Model Pendamping Sosial KUBE yang Dikembangkan	149



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1 : Deskripsi Karakteristik Responden Pendamping Sosial KUBE.....	74
Tabel 5.2 : Tanggapan tentang Pembekalan dalam Pelaksanaan Pendampingan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	75
Tabel 5.3 : Pengaruh Pembekalan terhadap Keterampilan Petugas Pendamping Sosial KUBE	76
Tabel 5.4 : Tanggapan Petugas Pendamping Sosial KUBE mengenai Pembekalan Terkait dengan Pengetahuan	76
Tabel 5.5 : Tanggapan Petugas Pendamping Sosial KUBE mengenai Pembekalan dapat Menambah Kompetensi dalam Pekerjaan	77
Tabel 5.6 : Tanggapan Petugas Pendamping Sosial KUBE mengenai Pembekalan dapat Membantu Memecahkan Masalah Yang Dihadapi KUBE Keluarga Miskin	78
Tabel 5.7 : Tanggapan Petugas Pendamping Sosial KUBE mengenai Pendampingan Sosial KUBE dapat Membantu Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga Miskin	78
Tabel 5.8 : Tanggapan Petugas Pendamping Sosial KUBE mengenai Pendampingan Sosial KUBE dapat Membantu Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	79
Tabel 5.9 : Tanggapan Pendamping Sosial KUBE mengenai Pendampingan Sosial KUBE dapat Membantu Meningkatkan Pendapatan	79
Tabel 5.10 : Tanggapan Kesenjangan Isi Program dengan Kebutuhan Pendamping Sosial KUBE di Lapangan	80
Tabel 5.11 : Tanggapan terhadap Penunjukan Pendamping Sosial KUBE Yang Dilaksanakan Selama Ini	80
Tabel 5.12 : Tanggapan mengenai Rekrutmen Pendamping Sosial KUBE Yang Selektif	81
Tabel 5.13 : Tanggapan mengenai Efisiensi Pelaksanaan Pembekalan Pendamping Sosial KUBE Selama Ini	81
Tabel 5.14 : Tanggapan mengenai Ketepatan Materi Pembekalan Pendamping Sosial KUBE Selama Ini	82
Tabel 5.15 : Tanggapan Mengenai Metode Pembekalan Yang Dilaksanakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur	82
Tabel 5.16 : Tanggapan Mengenai Alokasi Anggaran Pembekalan untuk Program Pendampingan dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin ...	83
Tabel 5.17 : Tanggapan mengenai Efektivitas Jangka Waktu Pembekalan Yang Dilaksanakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur	83
Tabel 5.18 : Tanggapan mengenai Instruktur Pembekalan sesuai dengan Bidang Tugasnya	84
Tabel 5.19 : Tanggapan mengenai Media Peralatan Yang Digunakan dalam Pembekalan	84
Tabel 5.20 : Tanggapan mengenai Proses Pembekalan Yang Dilaksanakan dalam Pembekalan	85
Tabel 5.21 : Tanggapan mengenai Perlunya Pembekalan Lain	85

Tabel 5.22	: Tanggapan mengenai Rencana Pembekalan Di Masa Yang Akan Datang	86
Tabel 5.23	: Tanggapan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pembekalan Pendamping Sosial KUBE	86
Tabel 5.24	: Tanggapan mengenai Sikap terhadap Program Pembekalan	87
Tabel 5.25	: Tanggapan mengenai Perlunya Kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pendampingan Untuk Pemberdayaan Keluarga Miskin	87
Tabel 5.26	: Deskripsi Karakteristik Responden Keluarga Binaan Sosial	88
Tabel 5.27	: Deskripsi Manfaat yang Dirasakan oleh Keluarga Binaan Sosial (KBS) melalui Pendekatan KUBE	90
Tabel 5.28	: Deskripsi Bantuan melalui KUBE sesuai Harapan Keluarga Binaan Sosial (KBS)	91
Tabel 5.29	: Deskripsi Pengelolaan Bantuan secara Berkelompok	91
Tabel 5.30	: Tanggapan tentang Keberadaan Petugas Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	92
Tabel 5.31	: Tanggapan KBS terhadap Pendamping Sosial KUBE dapat Membantu dalam Memecahkan Masalah	92
Tabel 5.32	: Tanggapan KBS terhadap Pendamping Sosial KUBE dapat Membantu dalam Menjalankan Usaha Ekonomi Produktif	93
Tabel 5.33	: Tanggapan KBS terhadap Pendamping Sosial KUBE dapat Membantu dalam Memenuhi Kebutuhan Pokoknya	93
Tabel 5.34	: Tanggapan KBS terhadap Pendamping Sosial KUBE dapat Membantu dalam Meningkatkan Pendapatannya	94
Tabel 5.35	: Tanggapan tentang Kesesuaian Pengetahuan yang Diberikan oleh Petugas Pendamping Sosial KUBE terhadap Kemampuan KBS	95
Tabel 5.36	: Pengembangan Model menurut Petugas Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	98
Tabel 5.37	: Pengembangan Model Pendamping Sosial KUBE menurut Keluarga Binaan Sosial (KBS)	100
Tabel 5.38	: Hasil Focus Group Discussion (FGD)	102
Tabel 5.39	: Model Pendamping Sosial KUBE yang Dikembangkan	112
Tabel 5.40	: Deskripsi Karakteristik Responden Pendamping Sosial KUBE Kelompok yang Tidak Mendapatkan Perlakuan	114
Tabel 5.41	: Deskripsi Karakteristik Responden Pendamping Sosial KUBE Kelompok yang Mendapatkan Perlakuan	116
Tabel 5.42	: Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test mengenai Perlunya Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE	119
Tabel 5.43	: Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test mengenai Pentingnya Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE	120
Tabel 5.44	: Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test mengenai Pelaksanaan Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE	121
Tabel 5.45	: Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test mengenai Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan UEP Keluarga Miskin melalui Pendekatan KUBE	123
Tabel 5.46	: Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test mengenai Perlunya Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE	124

Tabel 5.47 :	Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test mengenai Pentingnya Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE	125
Tabel 5.48 :	Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test mengenai Pelaksanaan Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE	126
Tabel 5.49 :	Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test mengenai Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan UEP Keluarga Miskin melalui Pendekatan KUBE	127
Tabel 5.50 :	Perbandingan Nilai Kelompok Yang Mendapatkan Perlakuan dan Kelompok Yang Tidak Mendapatkan Perlakuan Mengenai Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE	129
Tabel 5.51 :	Perbandingan Nilai Kelompok Yang Mendapatkan Perlakuan dan Kelompok Yang Tidak Mendapatkan Perlakuan mengenai Pentingnya Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE	130
Tabel 5.52 :	Perbandingan Nilai Kelompok Yang Mendapatkan Perlakuan dan Kelompok Yang Tidak Mendapatkan Perlakuan mengenai Pelaksanaan Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE	131
Tabel 5.53 :	Perbandingan Nilai Kelompok Yang Mendapatkan Perlakuan dan Kelompok Yang Tidak Mendapatkan Perlakuan mengenai Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan UEP Keluarga Miskin melalui Pendekatan KUBE	132



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rencana Pelaksanaan
- Lampiran 2 : Rincian Biaya Penelitian
- Lampiran 3 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas
- Lampiran 5 : Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 6 : Hasil Uji Chi Square
- Lampiran 7 : Modul Seleksi Calon Pendamping Sosial KUBE dan Pembekalan
Petugas Pendamping Sosial KUBE
- Lampiran 8 : Surat Ijin Melaksanakan Penelitian



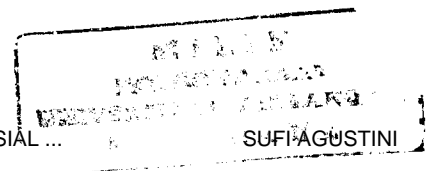
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 34 maupun Pasal 34 amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 2, bahwa Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara; dan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam realitanya, masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan dan tidak pernah ada habisnya. Meskipun pemerintah era reformasi juga mempunyai perhatian yang besar terhadap pengentasan kemiskinan ini, terutama semenjak terjadinya krisis moneter.

Krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan mulai pertengahan Tahun 1997 hingga akhir Tahun 2002 mempunyai dampak yang sangat luas di semua bidang pembangunan. Salah satu dampaknya adalah masyarakat semakin kehilangan daya responsivitas dan kreativitasnya dalam membangun masa depan dirinya dan dalam kehidupan masyarakat telah terjadi ketidakberdayaan (*powerlessness*) untuk menghadapi perubahan dan permasalahan dalam



kehidupannya. Hal ini menunjukkan semakin besar akumulasi frustrasi sosial dan kekecewaan berbagai unsur masyarakat, yang ditunjukkan oleh semakin luasnya keresahan sosial, kerusuhan dan amuk massa, kekerasan yang sangat anarkis, konflik sosial dan gejala disintegrasi sosial di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan demikian taraf kesejahteraan sosial masyarakat semakin memburuk dari tahun-tahun sebelumnya bahkan terjadi peningkatan penduduk miskin dan permasalahan sosial lainnya. Penduduk miskin yang dihimpit oleh berbagai persoalan, termasuk rendahnya pendapatan, rendahnya pendidikan, keterbatasan keterampilan yang dimiliki dan akses sumber pelayanan sosial, akan semakin sulit memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga sulit memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 36.199.078 jiwa. Dari jumlah tersebut jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 7.578.378 jiwa yang meliputi penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 1.829.710 jiwa dan penduduk miskin di daerah pedesaan sebesar 5.748.668 jiwa. Permasalahan kemiskinan di perkotaan terjadi berkaitan dengan terbatasnya lapangan kerja dan kenaikan upah yang tidak seirama dengan kenaikan harga. Adapun faktor yang mempengaruhi kemiskinan di pedesaan karena ketiadaan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan air bersih, dimana penduduk miskin yang berada di pedesaan hanya berpendidikan SD atau lebih rendah. Dengan demikian masih memerlukan penanganan yang lebih serius, untuk mencegah munculnya dan berkembangnya permasalahan-permasalahan sosial baru yang lebih kompleks. Masalah kemiskinan di pedesaan merupakan masalah sosial yang bersifat multidimensional. Oleh sebab itu, masalah kemiskinan pada masyarakat yang

ada di daerah pedesaan perlu mendapat perhatian lebih khusus dan terfokus sebagai sebuah realita dan fakta yang tak terbantahkan.

Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk kategori kemiskinan kronis (*chronic poverty*), yang membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat juga warga masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara (*transient poverty*) akibat bencana alam, bencana sosial atau situasi sulit lainnya, jika tidak ditangani serius dapat mengalami masalah kemiskinan kronis. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan pendekatan pemberdayaan yaitu upaya menumbuhkembangkan kekuatan pada masyarakat (masyarakat miskin) dengan tahapan dan strategi tertentu yang langsung pada pokok persoalannya.

Keterbatasan kemampuan keluarga miskin dalam mengelola bantuan, aksesibilitas pemasaran, kualitas hasil, cara berusaha, harus dibantu dengan suatu mekanisme pendampingan baik oleh lembaga supra struktur (Pemerintah) maupun infra struktur (Masyarakat), seperti LSM, tokoh masyarakat, pekerja sosial masyarakat, karang taruna dan lain sebagainya. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan keluarga miskin di daerah pedesaan harus secara berkelanjutan dan tidak terlepas adanya Pendampingan.

Hal ini sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Departemen Sosial R.I. sejak Tahun 1983, yang telah mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Keluarga Fakir Miskin melalui pendekatan terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai salah satu pendekatan dalam penanganan

permasalahan sosial keluarga miskin. Mulai masa orde baru hingga masa reformasi ini telah banyak perubahan terutama setelah digulirkannya otonomi daerah. Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur telah mempunyai kegiatan Pendampingan Sosial KUBE bagi keluarga miskin di daerah pedesaan melalui program kegiatan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ditujukan kepada keluarga fakir miskin/Keluarga Binaan Sosial (KBS), agar Keluarga Binaan Sosial dapat meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yang layak dan mampu melakukan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Bantuan yang diberikan berupa bantuan fisik (bantuan modal usaha berupa barang atau uang) dan bantuan non fisik (bantuan berupa bimbingan dan pembinaan). Masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini memiliki Pendamping Sosial. Pendamping Sosial merupakan ujung tombak yang sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pada Tahun 2005 di Propinsi Jawa Timur, jumlah Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berjumlah 250 orang dengan jumlah kelompok usaha bersama sebanyak 540 KUBE, yang tersebar di Kabupaten/Kota dan Kelurahan/Desa se Jawa Timur. Namun dengan melihat kondisi jumlah pendamping sosial yang ada dengan jumlah keluarga miskin di daerah pedesaan sangat tidak seimbang dan tidak efektif, karena dalam satu desa bisa terdapat 5 kelompok sampai dengan 10 kelompok usaha bersama yang hanya didampingi oleh satu orang Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Setiap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini beranggotakan 10 orang keluarga miskin yang telah terpilih melalui seleksi sebagai Keluarga

Binaan Sosial (KBS) dan berdasarkan syarat-syarat keanggotaan seperti ada ketua, sekretaris, bendahara dan 7 orang sebagai anggota. Adapun syarat-syarat menjadi anggota kelompok usaha bersama antara lain adanya kemauan anggota KUBE untuk bekerja secara kelompok dan adanya kesamaan minat dari anggota untuk melaksanakan suatu jenis usaha ekonomi produktif melalui kegiatan kelompok.

Jenis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dikelola oleh Keluarga Binaan Sosial (KBS) di Jawa Timur melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah usaha ternak kambing dan domba. Usaha ini dipilih sesuai dengan permintaan dan kebutuhan Keluarga Binaan Sosial (KBS) pada saat seleksi KBS, dengan alasan usaha tersebut, lebih mudah dalam pemeliharaannya dan lebih cepat untuk penggulirannya baik pada anggota kelompok maupun pada keluarga miskin yang lain. Bantuan usaha ekonomi produktif yang diberikan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur kepada keluarga miskin adalah kambing maupun domba bibit yang siap untuk beranak bukan bibit pejantan.

Pendamping sosial yang ada di Jawa Timur sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SLTA sebesar 75 % dari jumlah pendamping keseluruhan dan kurang mempunyai rasa peduli terhadap penanganan masalah kemiskinan. Sedangkan model pelaksanaan pendamping sosial KUBE terhadap pemberdayaan keluarga miskin antara lain memfasilitasi proses seleksi KBS, memfasilitasi bimbingan pemantapan KBS, membantu menyusun agenda dan jadwal pertemuan rutin KBS, memfasilitasi pertemuan KBS baik di tingkat KUBE maupun tingkat Kelurahan/Desa, melaksanakan bimbingan UEP, melaksanakan bimbingan pengelolaan keuangan dan administrasi KUBE,

memfasilitasi pemasaran hasil UEP dan membantu KUBE dalam menjalani hubungan dengan mitra usaha kesejahteraan sosial.

Namun di dalam realisasinya tidak semua pendamping sosial KUBE dapat melaksanakan model pendampingan tersebut di atas, terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah, karena ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai nomenklatur Dinas/Kantor Sosial. Meskipun mempunyai nomenklatur Dinas/Kantor Sosial, tetapi sumber daya manusia yang terdapat pada instansi tersebut bukan merupakan pegawai sosial sebelum diberlakukan otonomi daerah yang sudah terbiasa melakukan kegiatan usaha kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial, namun petugas yang ada sekarang merupakan peralihan/mutasi dari instansi-instansi lain yang masih awam tentang permasalahan sosial. Kondisi ini terjadi di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, diantaranya adalah pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Blitar, yang sebagian besar pendamping sosialnya tidak dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. Pendamping Sosial KUBE yang ada selama ini mempunyai latar belakang pendidikan yang kurang memadai, pengetahuan dan kemampuan tentang penanganan masalah sosial sangat terbatas, terutama kemampuan untuk memberdayakan kelompok usaha bersama masih rendah dan penetapan pendamping sosial berdasarkan penunjukan dari pimpinan. Disamping itu masih terdapat beberapa instansi yang juga menangani pemberdayaan keluarga miskin, sehingga pelaksanaan kegiatannya overlapping dan masing-masing instansi mempunyai program unggulan dalam pemberdayaan keluarga miskin, sehingga terdapat keluarga miskin yang memperoleh bantuan ganda dari dua instansi bahkan lebih.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Namun dalam pelaksanaannya belum dapat dikelola sepenuhnya oleh masyarakat, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki masyarakat itu sendiri dalam pengentasan masalah kemiskinan. Oleh karena itu diharapkan nantinya, adanya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanganan masalah kemiskinan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dan melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat tersebut, pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik.

Dengan demikian sampai saat ini upaya-upaya pelaksanaan Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diprogramkan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur untuk menanggulangi masalah kemiskinan maupun memberdayakan keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Untuk itu perlu kiranya dilakukan suatu penelitian tentang Pengembangan Model Pendamping Sosial KUBE Dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin (sebagai kajian tentang pemberdayaan keluarga miskin melalui pendampingan sosial Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Blitar).

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional dan untuk mencegah munculnya permasalahan sosial yang lebih kompleks, maka diperlukan penanganan yang serius, terfokus dan berkelanjutan, yaitu melalui pengembangan model Pendamping Sosial KUBE yang sesuai kemampuan dalam program pemberdayaan keluarga miskin oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bagaimanakah yang sesuai untuk pemberdayaan keluarga miskin dan yang applicable bagi Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam pembahasan ini sebagai berikut:

A. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sesuai untuk pemberdayaan keluarga miskin dan yang applicable bagi Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.

B. Tujuan Khusus

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam melaksanakan program pemberdayaan keluarga miskin yang diterapkan selama ini.
2. Untuk mengembangkan model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sesuai mengacu pada kemampuan keluarga

miskin, kemampuan dan harapan tenaga pendamping sosial (sesuai kajian teoritis).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat kebenaran teori tentang model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tepat dalam pemberdayaan keluarga miskin di Jawa Timur.

2. Bagi Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam melaksanakan program pemberdayaan keluarga miskin. sebagai model pendamping sosial yang diterapkan selama ini. Dapat memberikan solusi dalam mencari pengembangan model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sesuai kemampuan keluarga miskin dan harapan tenaga pendamping sosial. Dengan demikian hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk bahan masukan kepada Dinas Sosial baik di Propinsi Jawa Timur dan Dinas/Kantor/Badan Sosial Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan yang tidak kalah pentingnya bahwa penelitian ini dapat berfungsi bagi keluarga miskin dalam upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha ekonomi produktifnya dengan penuh percaya diri dan akhirnya dapat mandiri tanpa menggantungkan hidupnya kepada orang lain.

BAB 2**TINJAUAN PUSTAKA****2.1. Pemahaman Terhadap Kondisi Ketidakberdayaan dan Kemiskinan.**

Ketidakberdayaan (*Powerlessness*) dan kemiskinan merupakan dua kondisi yang pada kenyataannya mempunyai kaitan yang sangat erat. Kedua kondisi ini sangat penting untuk dikaji, karena beberapa ahli menyimpulkan bahwa kondisi ketidakberdayaan yang ada pada individu maupun kelompok tertentu telah menjadi faktor yang banyak memicu munculnya permasalahan kemiskinan.

Solomon seperti yang diikuti Payne (1991:228), mendefinisikan ketidakberdayaan (*powerlessness*) individu atau kelompok masyarakat sebagai ketidakmampuan untuk mengelola perasaan-perasaan, keterampilan-keterampilan, pengetahuan-pengetahuan dan sumber-sumber material. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa orang atau kelompok masyarakat yang tidak berdaya (*powerless*) bukan berarti tidak memiliki potensi, pengetahuan atau sumber material lainnya. Akan tetapi orang atau kelompok masyarakat tersebut *powerless*, karena belum atau tidak memiliki kemampuan untuk mengelola potensi, perasaan dan pengetahuan serta sumber material yang sebenarnya mungkin sudah ada.

Sedangkan pada dimensi lain, masyarakat seringkali mengalami ketidakberdayaan atas kekuatan-kekuatan yang justru berasal dari luar dirinya, seperti ketidakberdayaan untuk melakukan tawar-menawar dan pada umumnya masyarakat miskin tidak mempunyai daya berkaitan dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Selain dialami oleh kelompok masyarakat pada umumnya, *powerless* juga dialami oleh kelompok masyarakat yang karena kondisi fisik maupun

faktor-faktor tertentu, sehingga mereka terpaksa tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menentukan apa yang ada pada dirinya. dan mereka terpaksa harus pasrah dengan kondisi dimana mereka berada. Menurut Sennet & Cabb (1972) dan Conway (1979) sebagaimana yang dikutip Suharto (2005:61), menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberdayaan (*powerlessness*) adalah ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan dan adanya ketegangan fisik maupun emosional.

Dari pemikiran-pemikiran di atas, bahwa secara teoritis ketidakberdayaan merupakan sebuah kondisi yang kompleks. Oleh karena itu, suatu kebijakan dan program pemberdayaan setidaknya harus didasarkan pemahaman dan ketidakberdayaan itu sendiri. Dengan demikian program pemberdayaan masyarakat akan dapat dilakukan secara komprehensif.

Pemahaman yang komprehensif tentang substansi kemiskinan tidak akan dapat dicapai, apabila tidak disertai kajian mengenai profil kemiskinan itu sendiri. Penulis beranggapan, bahwa kajian mengenai profil kemiskinan (*poverty profile*) ini penting dilakukan karena kompleksitas kemiskinan itu sendiri. Dengan kajian ini diharapkan dapat diketahui bahwa kemiskinan bukan merupakan fenomena tunggal. Seperti halnya yang dikutip oleh Mubyarto dkk (1994:17) bahwa terdapat enam hal yang menandai kemiskinan, yaitu :

1. Bahwa kemiskinan itu adalah masalah kerentanan (*vulnerability*).
2. Bahwa kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada peluang dan hubungan produksi yang tidak memberikan kesempatan dan peluang untuk

berpartisipasi dalam proses produksi, sehingga membuka peluang mereka untuk terperangkap pada eksploitasi di bidang produksi.

3. Kemiskinan bermakna ketidakpercayaan dan impotensi emosional dan sosial menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan yang menyangkut dirinya tanpa memberikan peluang untuk mengaktualisasikan dirinya.
4. Kemiskinan juga berarti menghabiskan semua atau sebagian terbesar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kuantitas dan kualitas yang terbatas, sehingga konsumsi gizi mereka amat rendah yang mengakibatkan produktivitas mereka menjadi rendah.
5. Bahwa kemiskinan juga ditandai tingginya rasio ketergantungan, karena besarnya tanggungan keluarga.
6. Bahwa kemiskinan direfleksikan ke dalam budaya kemiskinan (*culture of poverty*).

Dari uraian di atas, maka dapat ditegaskan kembali bahwa fenomena kemiskinan harus dipahami secara komprehensif, karena kemiskinan itu sendiri merupakan gejala multidimensional. Oleh karena itu, program maupun upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus didasari oleh pemahaman yang komprehensif pula.

2.1.1. Permasalahan Kemiskinan dan Kompleksitasnya

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Permasalahannya berhubungan dengan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah sosial oleh manusia itu sendiri.

Kemiskinan dikatakan sebagai masalah sosial. karena kemiskinan itu sendiri dapat menyebabkan orang kehilangan peran dan fungsi sosialnya, sehingga orang tersebut sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemiskinan juga dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan miskin, karena pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Kurangnya pendapatan atau tingkat pendapatan yang rendah terjadi, karena mereka tidak dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesempatan untuk bekerja atau terbatasnya lapangan pekerjaan. Akibatnya banyak orang yang tidak memiliki keterampilan tidak tertampung dalam lapangan pekerjaan atau bahkan banyak yang tidak mempunyai pekerjaan. Walaupun dapat tertampung, jumlah penghasilan yang diperoleh jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam paket barang dan jasa yang diperlukan setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi. Paket ini terdiri atas komposisi pangan bernilai gizi yang cukup dengan nilai protein dan kalori yang sesuai dengan tingkat usia, jenis kelamin, sifat pekerjaan, keadaan iklim dan lingkungan tempat tinggal mereka.

Garis kemiskinan ini banyak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu masyarakat. karena itu berlainan bagi masing-masing negara. Maka sesungguhnya agak sulit untuk memastikan garis kemiskinan yang berlaku secara universal untuk semua negara. Demikian pula tingkat pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok di desa berlainan dengan di kota. karena biaya hidup di kota biasanya lebih mahal dibandingkan dengan di desa.

Masalah kemiskinan bukanlah suatu gejala yang semata-mata terwujud karena sistem ekonomi. Dalam kenyataannya kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi yang melibatkan hampir seluruh kehidupan masyarakat. Kemiskinan sebagai masalah sosial, Muhidin (1992:50-51) menganggap bahwa :

Adanya hubungan antara kemiskinan dan tingginya tingkat ketidaksehatan serta kematian, kemiskinan perumahan, kehancuran rumah tangga, rendahnya tingkat pendidikan dan kejahatan. Kemiskinan dan segala akibatnya mempunyai pengaruh tidak saja hanya pada individu-individu dan keluarga-keluarga tetapi juga pada mereka yang berhubungan bahkan pada masyarakat secara keseluruhan.

Apabila kemiskinan sebagai masalah sosial yang merupakan hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang telah lama mencekam, maka terbentuklah kebudayaan kemiskinan, yang sudah merupakan pola kehidupan masyarakat yang mencerminkan sikap apatis, rendahnya nilai kreatifitas, motivatif dan ketidakstabilan keluarga dalam hubungannya. Hal ini oleh Ala (1990:15-30) dikemukakan bahwa :

Yang dimaksud dengan kebudayaan kemiskinan adalah suatu kebudayaan dalam artian antropologis tradisional yang mencerminkan sikap apatis, ketidakjujuran, ketergantungan, motivasi yang rendah dan ketidakstabilan kehidupan keluarga.

Dari pengertian ini diketahui bahwa kemiskinan itu sendiri akan melahirkan kemiskinan. Dalam arti bahwa anak yang lahir dari keluarga miskin jika tumbuh dalam lingkungan miskin, maka akan menjadi miskin.

Dari beberapa pengertian kemiskinan tersebut ditemukan beberapa unsur kemiskinan, yaitu :

1. Unsur Nilai

Yang dimaksud dengan nilai disini adalah sesuatu yang dihargai oleh individu dan masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan

dasarnya seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

2. Kemiskinan itu multidimensional

Kemiskinan itu banyak aspek-aspeknya antara lain pendapatan yang rendah, kekurangan gizi, keadaan kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, pakaian dan perumahan yang tidak memadai dan sebagainya.

3. Aspek kemiskinan saling berhubungan

Sifat saling hubungan diantara aspek-aspek kemiskinan itu adalah bahwa satu aspek atau faktor dapat mempengaruhi semua faktor lainnya dalam arti pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

4. Aktor kemiskinan

Adalah orang-orang baik yang tinggal di kota maupun di desa yang menderita karena miskin. Aktor ini merupakan orang-orang yang tidak sampai pada suatu tingkat kehidupan yang minimal atau hidup di bawah garis kemiskinan.

5. Unsur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia secara layak.

6. Unsur kesenjangan antara nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan secara layak.

7. Akumulasi nilai-nilai secara syah, artinya diakumulasikan nilai-nilai yang dibutuhkannya harus mengindahkan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dari berbagai teori kemiskinan yang berkembang, terdapat dua kelompok teori kemiskinan yaitu teori kemiskinan klinis dan teori kemiskinan struktural. Teori kemiskinan klinis menjelaskan bahwa seseorang menjadi miskin disebabkan oleh empat faktor pokok yaitu :

- a. Inferior konstitusional, yaitu perbedaan diantara orang-orang melalui test intelegensi menunjukkan bahwa orang-orang miskin memiliki inferioritas konstitusional dengan ciri-ciri kemunduran intelegensi yang mengakibatkan rendahnya daya kreativitas dan rendahnya partisipasi.
- b. Akumulasi dari kemunduran lingkungan. yaitu adanya golongan kaya dan miskin. Orang menjadi miskin karena adanya kekurangan-kekurangan yang diterima seseorang dari lingkungannya.
- c. Sosialisasi yang tidak memadai dalam keluarga.
Orang tua kurang mampu memberikan dorongan sosial atau menstimulir pertumbuhan intelektual anak untuk menempatkan dirinya dalam masyarakat, sehingga menderita gangguan mental dan sosial.
- d. Inferioritas kultural, orang miskin mempunyai nilai-nilai atau norma-norma sendiri yang biasanya bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan menurut teori kemiskinan struktural, kemiskinan itu disebabkan karena perbedaan struktur dan kelembagaan-kelembagaan masyarakat, adanya ketimpangan-ketimpangan hubungan antara lembaga-lembaga masyarakat, sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya ketidakadilan di dalam masyarakat. Dalam hubungan ini Alfian dkk (1980:5) mengatakan bahwa :
Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Golongan demikian itu misalnya petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau para petani yang tanah miliknya begitu kecil, sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan pada dirinya sendiri dan keluarganya. Termasuk juga

buruh tani yang tidak terpelajar dan tidak terlatih, juga pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah, yang sekarang dapat dinamakan golongan ekonomi lemah. Golongan masyarakat miskin seperti ini masih memiliki potensi tenaga untuk bekerja, tetapi tidak ada yang dikerjakan karena struktur sosial yang ada mengalami kekurangan dan kurang tanggap terhadap golongan seperti ini. Struktur lembaga ini misalnya adanya tuan tanah dan buruh tani, desa dan kota, masyarakat kaya dan miskin.

2.1.2. Jenis-jenis Kemiskinan

Jenis-jenis kemiskinan ini bermacam-macam, menurut sudut pandang dari para ahli yang mengemukakannya. Namun kalangan pemerhati masalah kemiskinan telah mencoba memilah kemiskinan ke dalam 4 (empat) jenis yang dikemukakan oleh Jamasy (2004:3), yaitu :

- a. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang ditetapkan oleh standar minimum mengenai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan kata lain pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti :
 - 1) Makanan ditentukan melalui standar jumlah kalori berdasarkan umur dan jenis kelamin.
 - 2) Rumah ditentukan melalui standar dari segi keselamatan, kesehatan, penerangan, ventilasi dan ruangan.
 - 3) Pakaian dari segi kebersihan dan penampakannya dengan nilai-nilai.
- b. Kemiskinan relatif, timbulnya orang miskin karena sebagai akibat membandingkan satu golongan dengan golongan lain di masyarakat, sehingga timbul golongan miskin dan golongan kaya.

- c. Kemiskinan struktural, kemiskinan disebabkan oleh ketidakberesan dari struktur masyarakat yaitu adanya ketimpangan-ketimpangan antara lembaga masyarakat, sehingga lembaga yang ada tidak mampu menyediakan atau menciptakan kesempatan-kesempatan, sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan yang memadai. Hal ini juga karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- d. Kemiskinan kultural, karena mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.

Dari keempat jenis kemiskinan di atas, yang paling disorot adalah kemiskinan struktural, karena sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga jenis kemiskinan yang lain. Oleh karena itu kemiskinan bukan hanya suatu ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi suatu kehidupan yang layak, tetapi juga berkaitan erat dengan keadaan sistem kelembagaan yang tidak mampu memberikan kesempatan yang adil bagi anggota masyarakat untuk memanfaatkan dan memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia.

2.1.3. Ciri-ciri Kemiskinan

Menurut Jamasy (2004:10) bahwa dari berbagai studi yang ada, pada dasarnya ada beberapa ciri dari kemiskinan, antara lain :

- a. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal dan

- keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- b. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha. Sementara mereka tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan seperti jaminan kredit dan lain-lain, yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang biasanya untuk pelunasannya meminta syarat-syarat berat dan bunga yang amat tinggi.
- c. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, yaitu tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah, sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tidak dapat menyelesaikan sekolah, karena harus membantu orang tuanya mencari nafkah tambahan.
- d. Banyak diantara mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, meskipun ada relatif kecil sekali. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Mereka bekerja di pertanian berdasarkan musiman, maka kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin, sehingga banyak diantara mereka menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang berusaha apa saja. Akibat dari situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah, sehingga mengurung mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan. Didorong oleh kesulitan hidup di desa, maka banyak diantara mereka mencoba berusaha ke kota untuk mengadu nasib.

- e. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih muda dan tidak mempunyai keterampilan dan pendidikan. Sedangkan di kota sendiri terutama di negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa. Perkembangan teknologi di kota-kota negara sedang berkembang menampik penyerapan tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota terdampak dalam kantong-kantong kemelaratan (*slumps*).

2.1.4. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Masalah kemiskinan yang dikemukakan di atas bersifat kompleks, dimana antara faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Menurut Suyanto dan Karnaji (2005:7), di dalam hubungan ini dapat dikemukakan beberapa faktor penyebab timbulnya kemiskinan yang secara garis besarnya sebagai berikut :

a. Faktor Individu

Manusia mempunyai harapan, kebutuhan, nilai dan tuntutan sosial lainnya yang perlu untuk direalisasikan. Perwujudan dari harapan, kebutuhan dan nilai tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi manusia termasuk di dalamnya adalah tuntutan akan kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi, karena menyangkut kelangsungan hidup manusia.

Di dalam kenyataannya banyak terjadi kegagalan dalam mewujudkan tuntutan tersebut yang disebabkan oleh keterbatasan, ketidakmampuan, ketidakseimbangan yang menyangkut kepribadian seseorang seperti malas, menderita cacat mental atau fisik.

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan terjadi karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, sehingga akibatnya tingkat pendapatan per kapita penduduk akan rendah dan akhirnya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara layak. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi taraf hidup masyarakatnya.

Aspek ekonomi berkaitan dengan tingkat penghasilan, distribusi pendapatan, penguasaan terhadap aset faktor produksi dan lain-lain yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan taraf hidup manusia. Pada umumnya orang-orang miskin mempunyai akses yang sangat terbatas terhadap aspek tersebut. Mereka umumnya tidak terjangkau oleh berbagai jenis pelayanan yang dapat meningkatkan penghasilan.

c. Faktor Sosial

Penduduk miskin karena mereka hidup dalam suatu lingkungan kehidupan yang menunjukkan kebudayaan kemiskinan yang sudah merupakan pola kehidupan masyarakat yang mencerminkan sikap apatis, rendahnya nilai-nilai kreatif motivatif, ketidakstabilan keluarga dan ketergantungan.

Kemiskinan belakangan ini bukan hanya terjadi pada satu aspek saja (misalnya hanya ekonomi). Ketika masyarakat miskin mengatakan tidak memiliki usaha atau kegiatan karena tidak punya modal, maka arti modal ini menjadi luas tafsirannya. Modal yang tidak ada atau kurang, bukan hanya berupa uang yang tidak ada atau kurang, melainkan kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat (persoalan dari aspek sosial dan politik), juga karena mereka kurang atau tidak punya akses pada sumber daya lokal, pada relasi antar individu atau lembaga (lingkungan), juga karena lemahnya motivasi

dan kreativitas. sehingga menjadi tampak pasrah dan malas (persoalan budaya). karena dilatarbelakangi juga oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Jamasy (2004:37) menyimpulkan faktor-faktor penyebab timbulnya kemiskinan di atas (khususnya di Indonesia) sebagai berikut :

- a. Kemiskinan disebabkan oleh kesempatan kerja (miskin karena menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan), sehingga tidak mempunyai penghasilan.
- b. Upah/Gaji di bawah standar minimum.
- c. Produktivitas kerja rendah.
- d. Ketiadaan aset (kemiskinan terjadi karena tidak memiliki aset). Misalnya pada bidang pertanian, dimana petani tidak memiliki lahan atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah lahan pertanian.
- e. Diskriminasi, misalnya diskriminasi karena jenis kelamin dan kelas sosial masyarakat.
- f. Tekanan harga

Biasanya berlangsung pada petani kecil atau pengrajin dalam industri rumah tangga, tekanan harga berlangsung karena mekanisme permintaan dan penawaran bebas, juga karena seringkali ditetapkan oleh pihak pembelinya.

- g. Penjualan tanah

Tanah yang potensi untuk masa depan kehidupan keluarga telah habis dijual.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan ini saling berkaitan dan juga erat kaitannya dengan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang akan berakibat pada sempitnya lapangan kerja, upah kerja rendah, produktivitas kerja menurun, aset menurun, diskriminasi, tekanan harga dan sampai pada semakin mudah untuk mengorbankan harta miliknya untuk dijual secara perlahan, misalnya menjual tanah dan sejenisnya.

Untuk memutus lingkaran rantai penyebab kemiskinan ini tidak bisa hanya diputus salah satu dari sekian banyak aspek saja, melainkan harus semuanya diputus atau setidaknya semua rantai yang ada dijadikan telaah dan selanjutnya dijadikan sasaran dan tujuan antar lingkup manajemen program.

2.2. Pemberdayaan Sebagai Strategi Dalam Pengentasan Kemiskinan.

Istilah Pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu “*Empowerment*” yang secara harfiah diartikan “pemberkuasaan”, yang artinya adalah memberikan atau meningkatkan kekuasaan (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantaged*). Namun pada perkembangannya, dari berbagai referensi dan bidang menunjukkan keragaman pengertian atas makna *Empowerment* tersebut. *Empowerment* pada umumnya diterjemahkan ke dalam istilah “pemberdayaan”.

Priyono (1996:97) mencoba menganalisa pengertian pemberdayaan (*empowerment*), yaitu :

Sebagai konsep pembangunan yang memiliki makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-keuatan di segala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu pemberdayaan juga memiliki makna melindungi dan membela dengan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Dari pemikiran tersebut, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara dengan masyarakat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Keragaman pemaknaan konsep pemberdayaan di atas, tidak terlepas dari pemahaman kemiskinan sebagai permasalahan yang memiliki dimensi kompleks. Kemiskinan bukan hanya permasalahan yang berdimensi ekonomi,

akan tetapi telah menjadi permasalahan yang memiliki dimensi sosial, budaya dan politik. Kondisi kemiskinan yang demikian, menjadikan komunitas miskin sebagai komunitas yang tidak berdaya (*powerless*), komunitas yang terperangkap pada sistem produksi yang mengeksploitasi. Dengan demikian permasalahan pemberdayaan dalam konteks ini adalah bagaimana memperkuat kemampuan masyarakat lapisan bawah yang masih berada pada kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, keterbelakangan dan membutuhkan pertolongan agar lebih berdaya dalam kemandirian, keswadayaan, partisipasi dan demokratisasi.

Sehubungan dengan kompleksitas permasalahan kemiskinan, maka upaya penanganannya harus dilakukan dengan prinsip menyeluruh, yaitu upaya pemberdayaan yang bersifat holistik integratif. Sifat pemberdayaan tersebut sebenarnya sudah melekat pada konsep pemberdayaan itu sendiri. Menurut Oakley & Marsden dalam Priyono, hal ini berkaitan dengan konsep pemberdayaan yang memiliki dua kecenderungan, yaitu :

1. Pemberdayaan Primer.

Pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat, agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi juga dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.

2. Pemberdayaan Sekunder.

Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu, agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa penanganan kemiskinan yang holistik dan integratif, menuntut untuk tidak hanya melakukan pemberdayaan primer saja, tetapi lebih jauh kepada upaya pemberdayaan yang memungkinkan munculnya kesadaran kritis masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan serta menemukan cara-cara melepaskan diri dari kemiskinan atas dasar pilihannya sendiri. Dengan kata lain bahwa pemberdayaan harus memungkinkan terpenuhinya kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis bagi masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, maka konsep pemberdayaan yang holistik integratif merupakan sintesa dan pelaksanaan pemberdayaan yang secara simultan antara *improvement approach* dengan *transformation approach*. Hal ini dikemukakan oleh Long Norman (1977:144). *Improvement approach* sebagai upaya pengembangan masyarakat yang lebih berorientasi pada perbaikan kinerja masyarakat, agar dapat meningkatkan pendapatan kesejahteraannya (*material well being*). Sedangkan *Transformation approach* dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan terjadinya perubahan yang mendasar secara kelembagaan. Dengan pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk menikmati kebebasan, pemerataan dan kesempatan yang seluas-luasnya dalam rangka memperbaiki diri.

Pernyataan di atas menandakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan. Selain benar-benar mengedepankan sebuah proses, implikasinya pun membutuhkan waktu yang begitu panjang. Dengan demikian kegiatan pemberdayaan yang berorientasi pada proses, pada umumnya tidak memberi dampak bagi masyarakat untuk menerima manfaat langsung dari program pemberdayaan tersebut. Hal ini

dapatlah dipahami, karena program pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat aktif harus diawali dengan sebuah kesadaran kritis masyarakat, yaitu proses pencarian pengetahuan dan proses transformatif. Etzioni dalam buku Poloma (1994:357) lebih lanjut menguraikan bahwa :

Transformasi merupakan penjelajahan suatu masyarakat yang mengenal dirinya sendiri, dengan maksud untuk mewujudkan segera nilai-nilainya yang lebih sempurna ; yang merasa pentingnya transformasi dilakukan dan mampu mengukur kemampuan-kemampuannya demi terlaksananya perubahan-perubahan tersebut, bila tidak demikian masyarakat dengan sendirinya akan mengalami kehancuran. Masyarakat seperti inilah yang akan menjadi masyarakat aktif.

Proses transformasi akan dapat terwujud melalui kegiatan pendidikan kerakyatan berupa kegiatan dialog antar anggota masyarakat yang difasilitasi oleh seseorang atau pihak yang menjadi fasilitator kelompok masyarakat. Transformasi dialogis memungkinkan masyarakat memiliki tingkat kesadaran kritis tentang kehidupannya dan pada gilirannya menstimulir untuk merencanakan dan melakukan serta mewujudkan kondisi dan nilai yang lebih baik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara mandiri.

2.3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sebagai Suatu Pola Pendekatan Pemberdayaan Keluarga Miskin.

Pola pendekatan pemberdayaan yang mampu mengangkat masyarakat miskin agar menjadi berdaya dan berkembang adalah melalui media “kelompok”. Dimana masyarakat miskin tersebut diorganisir dalam wadah kelompok dan kelompok itu dimultifungsikan menjadi media pembelajaran anggota sekaligus proses tukar menukar informasi, pengetahuan dan sikap. Secara perlahan, kekuatan individu akan muncul menjadi kekuatan kelompok

dan disinilah berlangsungnya proses penguatan atau pemberdayaan. Melalui wadah kelompok, kreativitas masing-masing pihak (individu sebagai anggota kelompok) akan mewarnai kehidupan kelompok termasuk bagaimana mencari jawaban secara swadaya dan swadana terhadap persoalan.

Oleh karena itu salah satu upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan ditempuh melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Binaan Sosial (KBS). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh warga-warga/keluarga binaan sosial yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS). Jadi kelompok ini merupakan kelompok yang lahir dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri khususnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dengan maksud sebagai wadah berhimpun orang, kelompok dan atau badan yang menjalankan usaha ekonomis produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memiliki perbedaan yang mendasar bila dibandingkan dengan Pokmas, KSM dan Kokesra bila dilihat dari segi keberadaannya. Dalam konteks pemberdayaan, Pokmas dan kelompok lainnya dibentuk atas inisiatif petugas fungsional, sedangkan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berangkat dari pemikiran filosofi dan konseptual tentang esensi pemberdayaan masyarakat, dimana gagasan-gagasan yang berkembang dari masyarakat yang bersangkutan yang dijadikan pilot bagi pengembangan usahanya, dan instansi fungsional berperan sebagai motivator dan dinamisator kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sasaran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah untuk menangani kemiskinan yang dialami fakir miskin dengan memberikan bantuan stimulan pemberdayaan bagi Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang

tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981, bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Departemen Sosial (2003:6) menguraikan, bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialami dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama. Jadi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelembagaan ekonomi dan sosial.

Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bukan hanya menekankan pada aspek ekonomi, namun menekankan pula pada aspek sosial yaitu kepedulian dan kesetiakawanan sosial dengan cara melibatkan masyarakat di lingkungannya untuk ikut serta dalam proses produksi yang dilakukan oleh para anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Jadi bukan saja anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang meningkat penghasilannya, tetapi masyarakat sekitarnya pun merasakan manfaat dari keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut. Keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin ditengah-tengah masyarakat merupakan media untuk meningkatkan motivasi keluarga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan

interaksi dan kerja sama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.

Dengan sistem Kelompok Usaha Bersama (KUBE), kegiatan usaha yang tadinya dilakukan secara individu kemudian dikembangkan dalam kelompok usaha bersama, dimana masing-masing anggota kelompok dapat saling bekerjasama secara lebih mudah dibandingkan apabila mereka saling berpecah. Mereka dapat saling membantu satu sama lain antara yang lemah dengan yang lebih mampu dalam keterampilan, modal dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan KUBE.

Melalui Kelompok Usaha bersama (KUBE) mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan berpikir, karena mereka dituntut mempunyai kemampuan manajerial untuk mengelola usaha yang sedang dijalankan dan berupaya menggali dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan untuk keberhasilan kelompoknya. Selain itu, mereka dapat menumbuhkembangkan sikap-sikap berorganisasi dan pengendalian emosi yang semakin baik. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial baik diantara Keluarga Binaan Sosial (KBS) maupun kepada masyarakat luas, karena mereka hidup dalam kelompok.

2.4. Model

Dalam kamus Bahasa Indonesia, model adalah suatu pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Sedangkan menurut Simamarta (1983:9) mendefinisikan model sebagai abstraksi dan realitas dengan

hanya memusatkan pada beberapa bagian atau sifat dari kehidupan sebenarnya.

Selanjutnya jenis-jenis model itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Menurut Fungsi

- a. Model Deskriptif, adalah model yang hanya menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan sebagai miniatur obyek yang dipelajari, seperti peta organisasi.
- b. Model Prediktif, adalah model yang menggambarkan apa yang akan terjadi, bila sesuatu terjadi.
- c. Model Normatif, adalah model yang menyediakan jawaban terbaik terhadap suatu persoalan. Model ini memberi rekomendasi tindakan-tindakan yang perlu diambil, disebut juga dengan model simulatif. Contoh : model *budget advertensi*, model *economic lot sice*, model *marketing mix*.

2. Menurut Struktur

- a. Model Ikonik, yaitu model yang dalam suatu skala tertentu meniru sistem aslinya, contoh model pesawat.
- b. Model Analog, yaitu model yang meniru sistem aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik utama dan menggambarannya dengan benda atau sistem lain secara analog, seperti arus lalu lintas di jalan dianalogikan dengan aliran air dalam sistem pipa.
- c. Model Simbolis, yaitu model yang menggambarkan sistem yang ditinjau dengan simbol, biasanya simbol-simbol matematik. Dalam hal ini diwakili oleh variabel-variabel dari karakteristik sistem yang ditinjau.

3. Menurut Referensi Waktu

- a. Model Statis, adalah model yang tidak memasukkan faktor waktu dalam perumusannya.
- b. Model Dinamis, adalah model yang mempunyai unsur waktu dalam perumusannya.

4. Menurut Referensi Kepastian

- a. Model Deterministik, yang di dalam setiap kumpulan nilai input, hanya ada satu output yang unik, yang merupakan solusi dari model dalam keadaan pasti.
- b. Model Probalistik, berkenaan dengan distribusi *probalistic* dari input atau proses dan menghasilkan suatu deretan harga, paling tidak satu variabel output yang disertai dengan kemungkinan-kemungkinan dari harga-harga tersebut.
- c. Model *Game*, merupakan teori permainan mengembangkan solusi-solusi optimum dalam menghadapi situasi yang tidak pasti.

5. Menurut Tingkat Generalitas

- a. Umum
- b. Khusus

Model yang akan dikembangkan dalam penelitian ini menurut fungsinya menggunakan *model prediktif*, karena akan menggambarkan kondisi yang akan terjadi setelah diadakan perubahan. Menurut strukturnya penelitian ini menggunakan *model analogis*, karena akan membandingkan dengan keadaan sebenarnya. Menurut referensi waktu penelitian ini menggunakan *model dinamis*, karena dibatasi oleh waktu. Menurut referensi kepastian penelitian ini menggunakan *model deterministik*, karena untuk mencari solusi yang pasti.

sedangkan menurut tingkat generalitas penelitian ini menggunakan model khusus, karena penelitian ini melihat pola penanganan terhadap pemberdayaan keluarga miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.

2.4.1. Model-Model Pendamping Sosial

Sesuai dengan era globalisasi, di dalam *community development* peranan pendamping sosial dengan menggunakan pendekatan pekerjaan sosial sangat diperlukan dan mempunyai peranan penting, terutama dalam konteks menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan swastanisasi kesejahteraan sosial. Oleh karena itu *community development* semakin menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan maupun dalam memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Mayo dalam Suharto (2005:67) membagi perspektif pendamping sosial dalam pemberdayaan masyarakat ini menjadi dua pendekatan yang digunakan sebagai model, yaitu :

1. Pendekatan Profesional

Pendekatan ini mengarah pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Pendekatan ini juga sebagai perspektif yang tradisional, netral dan teknikal. Berdasarkan perspektif ini, maka pendamping sosial dapat diklasifikasikan ke dalam model, yaitu :

- a. Perawatan masyarakat, yang merupakan kegiatan volunter yang biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Tujuan

utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan legalitas pemberian pelayanan.

- b. Pengorganisasian masyarakat, yang memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial.
- c. Pembangunan masyarakat, yang memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

2. Pendekatan Radikal

Pendekatan ini lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya. Pendekatan ini juga sebagai perspektif transformasional. Berdasarkan perspektif ini, maka pendamping sosial dapat diklasifikasikan ke dalam model, yaitu :

- a. Aksi masyarakat berdasarkan kelas, yang bertujuan untuk membangkitkan kelompok-kelompok lemah untuk secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung dan konfrontasi.
- b. Aksi masyarakat berdasarkan gender, yang bertujuan untuk mengubah relasi-relasi sosial kapitalis-patriakal antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan negara serta orang dewasa dan anak-anak.
- c. Aksi masyarakat berdasarkan ras (warna kulit), yang merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi rasial.

Tanpa perubahan-perubahan dalam konteks yang lebih luas, seperti perubahan dalam kebijakan sosial dan sistem pemberian pelayanan sosial. Pendampingan sosial dalam *community development* akan menjadi metode yang kurang efektif dan hanya akan menjadi sebatas jargon bukan sebagai pendekatan pekerjaan sosial. Model-model alternatif yang memadukan sisi-sisi positif pendekatan profesional dan radikal dapat dikembangkan sebagai strategi pendampingan sosial dalam *community development* yang bersifat holistik, preventif dan anti diskriminasi yang dibingkai oleh semangat partisipatif dan pemberdayaan.

Berdasarkan klasifikasi model Mayo dalam Suharto (2005:67) tersebut. Departemen Sosial R.I. mengklasifikasikan model pendamping sosial sebagai berikut :

1. Pendampingan profesional

Pendamping profesional adalah pendamping sosial yang mempunyai disiplin ilmu pekerjaan sosial, dengan tingkat pendidikan Diploma atau Sarjana Pekerjaan Sosial, penunjukannya berdasarkan seleksi yang dilaksanakan oleh lembaga dan mempunyai kepedulian terhadap permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat serta siap berada di lokasi yang akan ditangani.

2. Pendampingan konvensional

Pendamping konvensional adalah pendamping sosial yang berasal dari masyarakat lokal dan tidak dilandasi oleh pendidikan formal pekerjaan sosial, namun mempunyai kepedulian terhadap permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat tanpa adanya perintah dari lembaga/aparat desa/kelurahan setempat. Model pendampingan ini masih sangat tradisional, karena hanya mengandalkan panggilan hati saja (sukarelawan).

2.5. Pendamping Sosial Dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin.

Pendamping Sosial adalah pekerja sosial yang berfungsi sebagai pendamping kelompok yang melaksanakan tugas dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Yang disebut dengan Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah : Petugas Sosial Kecamatan (PSK) atau Petugas Kecamatan/Desa yang ditunjuk sebagai pendamping, Tokoh Masyarakat, Pengurus Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Pengurus Orsos, Kader Wanita dan Tokoh Masyarakat lainnya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pendampingan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu proses pembangunan organisasi masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, sistematis dan terus menerus melalui pendampingan (pengorganisasian) dan peningkatan sumber daya masyarakat.

Keberadaan pendamping sebagai unsur penggerak tercapainya keswadayaan dan kemandirian masyarakat mempunyai posisi yang strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa suatu gerakan pemberdayaan berangkat dari kondisi ketidakberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu dibutuhkan seorang pendamping, baik yang berasal dari luar masyarakat maupun pendamping yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Prijono dan Pranarka (1996:143) mengemukakan bahwa :

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu proses untuk menampakkan serta mengembangkan kekuatan (*power*) yang dimiliki keluarga miskin. Kondisi keluarga miskin yang kadang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan memerlukan pihak lain yang dapat berfungsi sebagai penstimulir atau pendorong yang meyakinkan keluarga miskin akan daya yang mereka miliki. Pendamping di sini

bertugas sebagai pemancing daya keluarga miskin sebelum akhirnya keluarga miskin sendiri yang berperan dalam mengatasi kemiskinan yang mereka derita.

Proses *dialogical encounter* antara pendamping dan keluarga miskin memerlukan *sense of trust* diantara kedua pihak tersebut. Komunikasi intensif harus terjadi antara pendamping dan anggota kelompok. Merupakan tugas pendamping untuk menumbuhkan *sense of belonging* dari anggota kelompok terhadap keseluruhan aktivitas program pemberdayaan keluarga miskin.

Berkaitan dengan hal ini pendampingan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pendamping setempat seperti tokoh masyarakat dan kader-kader yang ada di desa setempat, pendamping teknis yang berasal dari tenaga penyuluh lapangan, petugas sosial dan petugas-petugas lapangan lainnya serta pendamping khusus yang disediakan bagi masyarakat desa miskin di desa tertinggal dengan pembinaan khusus.

Perlunya pendamping dalam masyarakat didasari oleh asumsi bahwa untuk membawa masyarakat miskin berdaya keluar dari kondisi kemiskinan diperlukan orang yang mampu membimbing melalui dialog bersama masyarakat miskin yang tergabung dalam kelompok-kelompok masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan sudah semakin kompleks, oleh karena masyarakat miskin pada dasarnya bukan hanya mereka miskin, tetapi sudah cenderung menjadi kelompok masyarakat yang termarginalisasi. Oleh karena itu, peran-peran pendamping masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Oleh karenanya, Ife (1997:201-223) menyarankan bahwa kegiatan pendampingan sosial harus dilaksanakan secara generalis. Untuk melaksanakan kegiatan pendampingan, menurut Ife setidaknya seorang pendamping sosial

harus melakukan peranan yang telah dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. yaitu :

1. ***Facilitative Roles.***

Peran-peran pendamping sosial yang dikelompokkan sebagai *Facilitative Roles* adalah peran-peran yang berkaitan dengan upaya-upaya merangsang dan mensuport pengembangan masyarakat. Pendamping Sosial dapat menggunakan berbagai teknik untuk mempermudah proses secara efektif.

Peran-peran yang dikelompokkan dalam *facilitative roles* adalah :

- a. ***Social Animation***, merupakan peran penting dalam pengembangan masyarakat, yaitu kemampuan pendamping sosial untuk memberi semangat, menggiatkan masyarakat, menghidupkan, menstimulir serta memberikan energi dan memotivasi orang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam pengembangan masyarakat.
- b. ***Mediation and Negotiation***, dalam hal ini pendamping sosial memiliki peran sebagai mediator, dimana dituntut kemampuan mendengar dan memahami masing-masing pihak dari masyarakat yang berkonflik serta pendamping sosial juga dituntut untuk mampu merefleksikan pandangan mereka masing-masing. Pendamping sosial juga dapat melaksanakan peranan *negotiation* dalam menghadapi konflik dalam masyarakat.
- c. ***Support***, seorang pendamping sosial harus dapat memberikan dukungan (*support*) bagi masyarakat yang terlibat dalam struktur dan aktivitas masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menguatkan, mengenali, menghargai nilai-nilai mereka dan memberikan dukungan atas nilai-nilai tersebut.

- d. ***Building Consensus***, merupakan pengembangan dari peran *mediation*. Peran *building consensus* ini mencakup kegiatan penguatan untuk disetujuinya tujuan-tujuan umum dan mengidentifikasi keinginan-keinginan dasar dari masyarakat.
- e. ***Group Facilitation***, merupakan suatu tugas pendamping sosial yang penting, karena banyak tujuan-tujuan pengembangan masyarakat yang hanya dapat dicapai melalui kelompok-kelompok yang efektif dan berfungsi secara baik, dimana mampu membuat keputusan dan memungkinkan dapat mendorong partisipasi yang bermakna oleh anggota kelompok.
- f. ***Utilisation of skill and resources***, dalam hal ini peranan pendamping sosial adalah mengidentifikasi dan memanfaatkan keterampilan-keterampilan dan sumber-sumber yang ada pada masyarakat atau kelompok.
- g. ***Organizing***, pendamping sosial dalam peranan ini harus memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipahami. Disamping itu diperlukan munculnya komitmen anggota kelompok atau masyarakat untuk saling membantu dan bertanggungjawab dengan memberikan dukungan yang tepat. Bagi anggota masyarakat atau kelompok yang kurang memiliki komitmen perlu didorong dan diberikan semangat secara baik.

2. ***Educational Roles***.

Dalam kelompok, peranan pendamping sosial ini adalah untuk berperan aktif dengan memberikan berbagai masukan yang positif dan direktif sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya. Oleh karenanya pendamping sosial berupaya untuk melakukan peranan-peranan sebagai berikut :

- a. **Consciousness Raising**, dalam hal ini pendamping sosial mempunyai peranan untuk menimbulkan kesadaran kelompok secara terus menerus mengingatkan bahwa ketidakberdayaan mereka disebabkan oleh ketidaksadaran mereka pada berbagai masalah yang sebenarnya sedang menghimpit, sehingga kepada mereka perlu diberikan kesadaran untuk melakukan aksi dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Pendamping sosial berupaya menyadarkan masyarakat bahwa mereka memiliki banyak sekali potensi dan sumber daya yang dapat didayagunakan untuk kepentingan mereka sendiri.
- b. **Informing**, yaitu memberikan informasi dalam bentuk pengajaran. Informasi-informasi tersebut sangat penting bagi masyarakat dalam merencanakan bagaimana memenuhi kebutuhannya dan bagaimana melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam proses pengembangan masyarakat.
- c. **Confronting**, kadang-kadang diperlukan bagi pendamping sosial untuk mengkonfrontasikan masyarakat atau kelompok. Berkonfrontasi, dimana pendamping sosial seolah-olah menolak pekerjaan, usulan atau gagasan anggota kelompok tersebut yang tujuannya untuk membuat mereka berpikir lebih matang lagi. Peranan ini harus dilakukan secara hati-hati oleh seorang pendamping sosial.
- d. **Training**, hal ini merupakan peran edukatif yang paling spesifik yang meliputi pengajaran sederhana kepada masyarakat tentang bagaimana mengerjakan sesuatu. Dalam beberapa kasus biasanya pendamping sosial tidak menjadi pelatih, tetapi membantu masyarakat atau kelompok untuk mencari seseorang yang dapat memberikan pelatihan.

3. *Representational Roles.*

Peranan-peranan yang dikelompokkan pada kategori ini digunakan dalam kaitannya dengan interaksi pendamping sosial dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama masyarakat dampungannya dan untuk kepentingan masyarakat pula. Peranan pendamping sosial dalam hal ini sebagai :

- a. ***Obtaining Resources***, yaitu pelibatan dalam mencari sumber-sumber eksternal dan diharapkan pendamping sosial membuat *grant application*. melobi dan pemahaman tentang pendanaan bagi kelompok-kelompok masyarakat.
- b. ***Advocacy***, pendamping sosial dapat melakukan atau mengadopsi peran advokasi atas nama masyarakat, atas nama kelompok ataupun atas nama individu dalam masyarakat. Dan melalui kegiatan advokasi, diharapkan dapat diperkuat kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan kehidupannya sendiri.
- c. ***Using The Media***, penggunaan media oleh pendamping sosial merupakan bagian dari suatu aksi kampanye yang dilakukan oleh komunitas yang didampingi. Penggunaan media sebagai metode yang tepat dalam situasi krisis tertentu, yang pemanfaatannya dapat berupa *press release*, *interview* melalui televisi atau media lain.
- d. ***Public Relation***, peranan ini diperlukan oleh seorang pendamping sosial dalam membuat dan meningkatkan *image* yang baik atas proyek-proyek masyarakat. Peranan ini dapat melibatkan pendamping sosial dalam berbagai peran seperti pembicara dalam pertemuan kelompok pelayanan, kelompok wanita dan kelompok-kelompok lainnya.

- e. *Networking*. jaringan kerja ini merupakan peran pendamping sosial yang dapat dibentuk dengan menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok lain seperti pekerja sosial, psikolog, petugas kesehatan dan lain sebagainya
- f. *Sharing Knowledge and Experience*, pendamping sosial mendapatkan pengetahuan dan pengalaman berdasarkan tugas-tugasnya. Mereka tidak mungkin berada pada posisi yang “serba mengetahui”. Mereka akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari pihak lain dalam masyarakat.

4. *Technical Roles*.

Peran-peran teknis lebih mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat teknis. Dalam peran ini pendamping sosial dituntut tidak saja mampu mengorganisasi kelompok, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas teknis, pengumpulan data dan menganalisanya, penggunaan komputer, kemampuan presentasi verbal maupun tertulis, kemampuan dalam manajemen maupun pengendalian keuangan.

Selain memahami peran-peran pendamping sosial di atas dalam melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat, Miley dan Dubois (1992:221) menyarankan pendamping sosial untuk menggunakan pedoman-pedoman yang dalam Praktek Pekerjaan Sosial dijelaskan sebagai berikut :

1. Membangun relasi pertolongan yang meliputi :
 - a. Merefleksikan respon empati.
 - b. Menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self determination*).
 - c. Menghargai perbedaan dan keunikan individu.

- d. Menekankan kerja sama klien (*client partnerships*).
2. Membangun komunikasi yang meliputi :
 - a. Menghormati martabat dan harga diri klien.
 - b. Mempertimbangkan keragaman individu.
 - c. Berfokus pada klien.
 - d. Menjaga kerahasiaan klien.
 3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang meliputi :
 - a. Memperkuat partisipasi klien dalam semua proses pemecahan masalah.
 - b. Menghargai hak-hak klien.
 - c. Merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar.
 - d. Melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
 4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui :
 - a. Ketaatan terhadap pola kode etik profesi.
 - b. Keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset dan perumusan kebijakan.
 - c. Penterjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik.
 - d. Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Tugas utama seorang pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah menghimpun orang-orang dalam komunitas, menumbuhkan kesadaran kritis melalui dialog dan musyawarah bersama, mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan dalam mengubah realitas dan bersama komunitas membangun organisasi masyarakat. Tujuan pendampingan sosial adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) dalam pertumbuhan dan perkembangan Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) serta keberlangsungan dan kemantapan kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) secara mandiri, memberdayakan keluarga miskin melalui usaha ekonomi produktif dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), mendorong keluarga miskin dalam pengembangan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan menjadi penengah dalam perbedaan pendapat dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut. Tugas dan tanggung jawab pendamping sosial meliputi tugas ke dalam (intern) KUBE, tugas keluar (ekstern) KUBE dan tugas-tugas administrasi pendamping sosial.

Pendampingan pada hakekatnya merupakan kegiatan memberikan daya kepada masyarakat melalui pengorganisasian masyarakat itu sendiri. Dengan organisasi, masyarakat akan mempunyai sarana untuk membentuk kemampuan dan daya untuk memperjuangkan kehidupannya. Selain itu pembentukan kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat juga sangat penting dalam membangun kekuatan masyarakat.

Seorang pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dituntut untuk mengetahui filosofi pemberdayaan dan memahami betul mengenai proses melakukan fasilitator yang benar. Profesi pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus betul-betul sebagai pekerjaan profesi (profesional) dan bukan semata-mata bekerja untuk keperluan mengisi waktu dan memenuhi kebutuhan uang atau gaji. Menurut Bob Tilden dalam Suharto (2005:93), seorang pendamping sosial harus mempunyai empat sifat, adalah :

1. *Problem solving*, yaitu terampil memecahkan masalah.
2. *Sense of community*, yaitu peduli dan mempunyai keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat miskin.

3. *Sense of mission*, yaitu peduli dan mempunyai keberpihakan untuk mengikuti misi.
4. *Honesty with others and with self*, yaitu jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain.

Prinsip-prinsip pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dapat digunakan sebagai panduan dalam upaya pemberdayaan masyarakat meliputi :

a. Prinsip Berkelompok.

Kelompok tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Selain dengan anggota kelompoknya sendiri, kerja sama juga dikembangkan antar kelompok dan mitra kerja lainnya, agar usaha mereka berkembang, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta mampu membentuk kelembagaan ekonomi.

b. Prinsip Keberlanjutan.

Seluruh kegiatan penumbuhan dan pengembangan diorientasikan pada terciptanya sistem dan mekanisme yang mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

c. Prinsip Keswadayaan.

Masyarakat diberi motivasi dan didorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri dan tidak selalu tergantung pada bantuan dari luar.

d. Prinsip Kesatuan Keluarga

Masyarakat tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh. Kepala keluarga beserta anggota keluarga merupakan pemacu dan pemicu kemajuan usaha. Prinsip ini menuntut para pendamping sosial untuk

memberdayakan seluruh anggota keluarga masyarakat berperan serta dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

e. Prinsip Belajar Menemukan Sendiri

Kelompok dalam masyarakat tumbuh dan berkembang atas dasar kemauan dan kemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka kembangkan, termasuk upaya untuk mengubah penghidupan dan kehidupannya.

Pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus memiliki tahap-tahap kegiatan, agar lebih terarah dan dapat dipahami mengenai pelaksanaan program/kegiatannya. Tahap-tahap ini pada hakekatnya merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu. Menurut Suharto (2005:104), tahapan kegiatan pendampingan sosial adalah sebagai berikut :

a. Pengenalan Kebutuhan Masyarakat.

Pengenalan kebutuhan masyarakat dilakukan untuk mengetahui apa yang diperlukan oleh masyarakat di satu daerah, sehingga kegiatan yang akan dijalankan di daerah tersebut tidak sia-sia dan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Oleh karena itu, informasi mengenai lokasi, karakteristik masyarakat serta potensi daerah diperlukan sebagai bahan dasar untuk merancang suatu kegiatan.

b. Rekrutmen Pendamping Sosial KUBE.

Untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendamping sosial KUBE yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan merupakan hal yang sangat penting. Perekrutan tenaga pendamping sosial KUBE ini merupakan salah satu tahap

yang menentukan bagi keberhasilan program pendampingan sosial. Proses rekrutmen ini harus dapat menghasilkan tenaga pendamping sosial yang berdedikasi tinggi dan mempunyai motivasi yang kuat untuk membantu keluarga miskin. Agar hal ini dapat dicapai, maka tenaga pendamping sosial yang diinginkan harus memenuhi kriteria untuk menjadi seorang pendamping sosial KUBE, yaitu :

- 1). Jenjang pendidikan minimal SMU/ yang sederajat.
 - 2). Mempunyai pengalaman yang memadai di bidang manajemen pengelolaan usaha ekonomi produktif.
 - 3). Mempunyai kemampuan memfasilitasi perubahan dan pengembangan kelompok.
 - 4). Prioritas diberikan kepada yang sudah berpengalaman.
 - 5). Diutamakan usia antara 20 - 50 tahun atau dianggap mempunyai komitmen yang tinggi pada pemahaman kebutuhan masyarakat dan bersedia ditempatkan di lokasi kegiatan.
 - 6). Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk membantu keluarga miskin.
 - 7). Bersedia dan sanggup memenuhi peraturan dan tata laksana kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - 8). Diprioritaskan berdomisili di Kabupaten Kota tempat lokasi.
- c. Pelatihan/Pembekalan Pendamping Sosial KUBE.

Kegiatan pelatihan/pembekalan pendamping sosial KUBE ini adalah untuk menyiapkan tenaga pendamping sosial, agar memahami situasi tempat bekerja, mampu mengidentifikasi, memberikan alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan. Pelatihan/pembekalan untuk tenaga

pendamping sosial KUBE dapat dilakukan oleh perguruan tinggi atau LSM. Materi pelatihan/pembekalan tenaga pendamping sosial KUBE meliputi materi dasar, materi inti dan materi keterampilan teknis sebagai berikut :

- 1). Materi Pengenalan Program Pendampingan Sosial (Materi Dasar), meliputi :
 - a). Dinamika kelompok dan pembukaan diri.
 - b). Program pemberdayaan masyarakat dan program pendampingan .
 - c). Pengembangan program.
- 2). Materi Inti Program Pendampingan Sosial, meliputi :
 - a). Penanganan Kemiskinan.
 - b). Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin.
 - c). Langkah-langkah pelaksanaan
 - Tahap Pembentukan KBS
 - Tahap Pembentukan Usaha Kelompok
 - Tahap Pembentukan Usaha Koperasi
 - Evaluasi keseluruhan program yang meliputi pengertian petugas pendamping sosial, bagaimana menjadi petugas pendamping sosial yang baik sesuai tugas dan fungsi serta peranan petugas pendamping sosial
 - d). Kepemimpinan.
 - e). Komunikasi Sosial.
 - f). Teknik-teknik perencanaan, pencatatan dan pelaporan dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif.
 - g). Teknologi Tepat Guna (TTG) dikaitkan dengan pengelolaan usaha ekonomi produktif.

h). Mobilitas sumber-sumber/potensi dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif dan pemasarannya.

3). Materi Keterampilan Teknis Pendampingan Sosial, meliputi :

- a). Teknik menggerakkan masyarakat.
- b). Pengenalan potensi sumber daya, permasalahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
- c). Manajemen usaha kecil.
- d). Penyusunan kelayakan usaha.
- e). Manajemen akuntansi dan pembiayaan.
- f). Teknik pemasaran hasil.
- g). Evaluasi.

d. Praktek Kerja Lapangan/Praktek Magang

Praktek kerja lapangan/Praktek magang merupakan salah satu komponen kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan kurikulum pembekalan atau pelatihan pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja para pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) nantinya setelah melaksanakan peranannya di masyarakat.

Proses pembelajaran dalam kelas belum sepenuhnya mampu meningkatkan keterampilan dan sikap kerja peserta pembekalan atau pelatihan. Oleh karena itu, diperlukan kelengkapan "ruangan dan waktu lain" di luar kegiatan kelas. Informasi atau pengetahuan yang diperoleh dalam proses belajar mengajar di kelas perlu disesuaikan dengan kondisi nyata di luar kelas. Hasil penyesuaian ini akan merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Diharapkan melalui praktek kerja lapangan/praktek magang, para peserta pembekalan atau pelatihan dapat memanfaatkan pengalamannya dalam rangka meningkatkan kualitas tugas-tugasnya sebagai pendamping sosial dan juga berfungsi sebagai "uji petik" hasil pembelajaran dalam kelas di lapangan dan media evaluasi dan pengembangan pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pada hakekatnya pengetahuan merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu obyek tertentu, termasuk ke dalamnya adalah ilmu. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia disamping berbagai pengetahuan lainnya seperti seni dan agama.

Menurut Allport dalam buku Yuwono dkk (2005:111), sikap didefinisikan sebagai suatu keadaan mental dan *neural* yang terjaga, diorganisasikan melalui pengalaman, merupakan respon individual terhadap semua obyek dan situasi yang terkait. Berdasarkan pada definisi tersebut, maka ada tiga unsur dari sikap, yaitu :

- Sikap adalah merupakan kondisi pribadi seseorang, artinya setiap orang berbeda-beda sikapnya meskipun obyek sikap yang dipersepsikan sama bentuknya.
- Sikap dibentuk dan diorganisasi melalui pengalaman, artinya sikap diperoleh dan dikembangkan oleh seseorang melalui proses sosialisasi yang dilakukan oleh orang lain.
- Sikap bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi sebagai sesuatu yang aktif dalam mendinamisasi dan mengarahkan perilaku. Dalam hal ini, sikap dipercaya berpengaruh langsung pada munculnya perilaku seseorang.

Keterampilan seseorang berkaitan dengan praktek di lapangan. Praktek ini merupakan keterampilan seorang pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang sifatnya spesifik yang digunakan secara tepat dalam situasi spesifik serta untuk mencapai tujuan yang spesifik pula. Agar suatu praktek ini dapat dilaksanakan tepat arah, tepat sasaran dan tepat waktu, maka praktek tersebut harus didukung oleh pengetahuan dan sikap yang tepat pula. Oleh karena itu, keterampilan seorang pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat berkembang melalui pengalaman dalam mempraktekkan peranannya sebagai pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Dengan demikian pemikiran-pemikiran tentang kemiskinan, pemberdayaan dari model pendamping sosial di atas diharapkan dapat menjadi suatu pemahaman yang komprehensif dalam menyelenggarakan kegiatan pendampingan sosial. Pemahaman dan kemampuan serta integritas pendamping sosial dalam pemberdayaan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pendampingan itu sendiri.

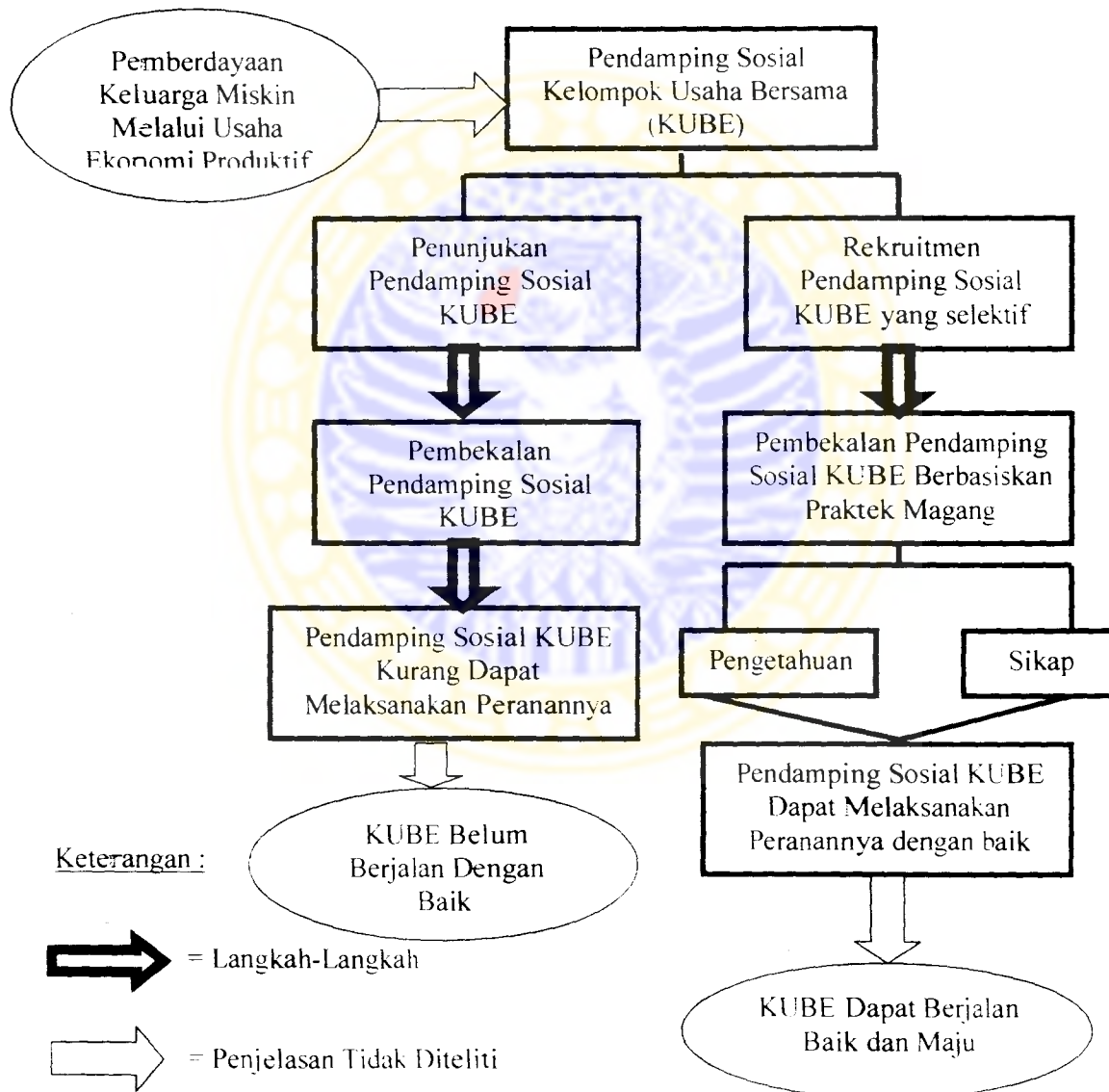
BAB 3

LANGKAH-LANGKAH DAN KERANGKA PIKIR

PENGEMBANGAN MODEL

3.1. Langkah-Langkah Pengembangan Model

Berdasarkan pada kajian teoritis pada bab 2. maka dapat dikemukakan suatu langkah-langkah yang berfungsi sebagai penuntun dan dasar penelitian.



Gambar 3.1.
LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN MODEL

3.2. Penjelasan Langkah-Langkah Pengembangan Model

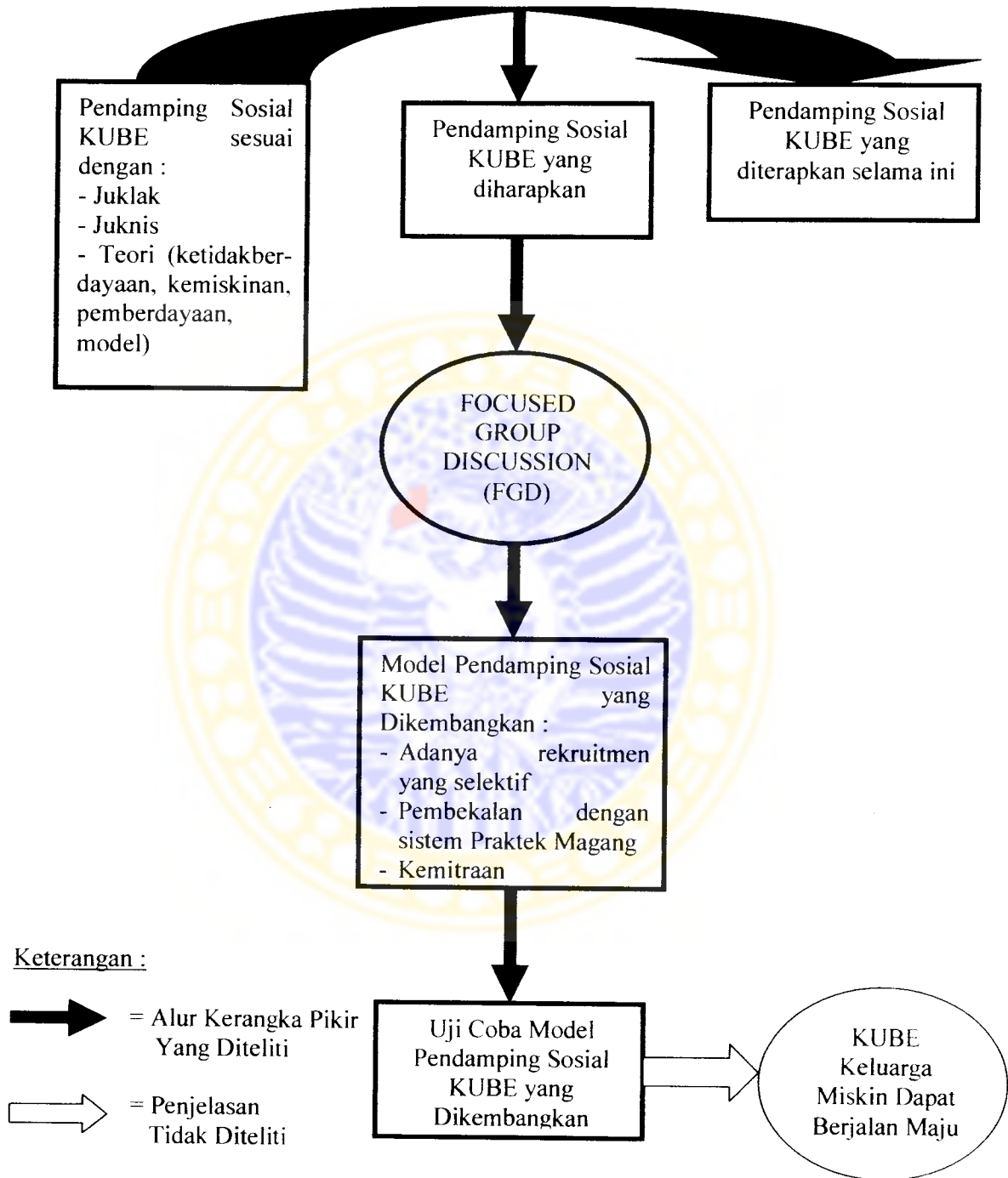
Penjelasan langkah-langkah yang berfungsi sebagai penuntun dasar dalam penelitian ini adalah :

1. Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan menggunakan model pendampingan yang sudah diterapkan selama ini, yang meliputi :
 - a. Penunjukan Pendamping Sosial KUBE.
 - b. Pembekalan Pendamping Sosial KUBE.
 - c. Pendamping Sosial KUBE Kurang Dapat Melaksanakan Peranannya.
2. Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diharapkan meliputi :
 - a. Rekrutmen Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang selektif.
 - b. Pembekalan Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berbasisan Praktek Magang.
 - c. Pengetahuan dan sikap yang dimiliki pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) setelah mengikuti pembekalan berbasisan praktek magang.
 - d. Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat melaksanakan peranannya dengan baik.

3.3. Kerangka Pikir Pengembangan Model

Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan model pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan

keluarga miskin, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 3.2.
BAGAN KERANGKA PIKIR

3.4. Penjelasan Kerangka Pikir Pengembangan Model

Penjelasan kerangka pikir pengembangan model dalam penelitian ini adalah :

1. Menginventarisir peranan dan tugas pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terdapat di Dinas Sosial kurang efektif versus teori yang mendasari pemberdayaan keluarga miskin, yang meliputi ketidakberdayaan, kemiskinan, pemberdayaan dan model.
2. Mengidentifikasi dan menginventarisir pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada dan telah mengikuti pembekalan (yang diterapkan selama ini).
3. Mengidentifikasi kemampuan dan harapan pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan keluarga miskin serta orang-orang yang berpengaruh di dalamnya. Hal ini dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD).
4. Menyusun model pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan harapan.
5. Menguji cobakan model yang dikembangkan.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Melakukan studi literatur, yang meliputi petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan teori tentang pendampingan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pemberdayaan keluarga miskin.

2. Survei Lapangan

Melakukan survei terhadap pelaksanaan pendampingan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), khususnya terhadap pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada dan telah mengikuti pembekalan pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta keluarga miskin yang menerima pendampingan sosial melalui usaha ekonomi produktif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan model pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam melaksanakan program pemberdayaan keluarga miskin yang diterapkan selama ini.

3. Penyebaran pertanyaan/quiesioner dan menyampaikan pertanyaan terbuka yang isinya adalah harapan terhadap model pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di masa yang akan datang. Informasi/data yang berupa keterangan kualitatif itu dicatat dengan teliti pada kolom-kolom yang telah disediakan.

4. *Focus Group Discussion* (FGD)

Hasil dari temuan dan fakta dari tiga proses tersebut disimpulkan dan hasilnya dibawa ke *Focused Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh model yang sesuai dengan kemampuan dan harapan.

Focused Group Discussion (FGD) digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dapat :

- a. Diperoleh informasi yang lebih akurat (sarana validasi data-data yang diperoleh sebelumnya).
- b. Menggali ide-ide baru.
- c. Memahami keinginan masyarakat, karena dalam *Focused Group Discussion* (FGD) peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berbagi pengalaman, pendapat dan ide.

Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion*) adalah diskusi yang tidak ditata ketat dan tidak formal antara enam sampai sepuluh orang guna mengumpulkan informasi tentang masalah yang diteliti. Diskusi Kelompok Terarah dipimpin oleh seorang pemandu, yaitu seorang yang mendorong peserta untuk bicara dan mengungkapkan pendapat serta perasaan tentang pokok penelitian.

Dalam forum itu akan diupayakan pembahasan pada topik tertentu dengan seorang fasilitator, yang bertujuan untuk mendapatkan, mengenal dan memecahkan suatu permasalahan. Proses *Focus Group Discussion* (FGD) biasanya bersifat homogen atau yang mempunyai pengalaman atau pengetahuan sejenis sejumlah 8 orang.

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai fasilitator dan bertindak sebagai pengarah adalah Kepala Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial dan Kepala Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial. Adapun peserta *Focus Group Discussion* (FGD) terdiri dari Petugas Sosial di lapangan, Aparat Desa, Aparat Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, Keluarga Binaan Sosial (KBS), Petugas Kabupaten dan Petugas Propinsi. Pembahasan akan difokuskan pada hasil survei yang telah dianalisis oleh peneliti. Kemudian hasil dari temuan yang ada dikaitkan dengan teori dan diskusikan pada forum tersebut, yang nantinya akan diperoleh suatu jawaban mengapa masalah timbul dan bagaimana cara mengatasinya.

5. Model yang dikembangkan tersebut diuji cobakan kepada pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), melalui 2 tahap yaitu :
 - a. Model Building (Menyusunan atau Mengembangkan Model), dengan menggunakan jenis penelitian survei dan studi literatur.
 - b. Model Testing (Uji Coba Model), dengan cara menguji model apakah sudah sesuai dengan kemampuan dan harapan pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Keluarga Binaan Sosial (KBS), dengan menggunakan jenis penelitian quasi eksperimen dengan desain pre test dan post test pada kelompok yang tidak mengikuti pembekalan dengan praktek magang dan kelompok yang mengikuti pembekalan dengan praktek magang (*Pre Test-Post Test Kontrol Group Design*).

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

4.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Blitar, dipilih sebagai obyek penelitian dengan alasan, karena pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang terdapat di Kabupaten Blitar belum dapat melaksanakan perannya secara optimal, sehingga Kelompok Usaha Bersama keluarga miskin dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) belum berjalan dengan baik.

4.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu enam bulan yang meliputi konsultasi, pelaksanaan penelitian dan laporan akhir penelitian.

4.3. Populasi dan Sampel

Populasi untuk penelitian ini adalah pendamping sosial KUBE yang terdapat di Kabupaten Blitar yang pernah mengikuti pembekalan selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2002 sampai dengan 2005. Jumlah pendamping sosial KUBE di Kabupaten Blitar sebanyak 42 orang. Adapun tahapan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk penelitian survei, meskipun tidak semua pendamping sosial diamati namun hanya 10 orang yang diamati yang tersebar di Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar, dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang pendamping sosial dalam melaksanakan peranannya dalam pemberdayaan keluarga miskin.

- b. Untuk *Focus Group Discussion* (FGD) diikuti oleh 8 orang, yang terdiri dari Pendamping Sosial KUBE, Aparat Desa, Aparat Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, Keluarga Binaan Sosial (KBS), Petugas Kabupaten dan Petugas Propinsi, dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang model pendamping sosial KUBE yang sesuai dengan kemampuan dan harapan.
- c. Model yang dikembangkan tersebut akan diuji cobakan kepada pendamping sosial KUBE, dengan kelompok yang mendapatkan *treatment* mengambil sampel sebanyak 20 orang pendamping sosial KUBE yang telah mengikuti pembekalan berbasisan praktek magang. Dan 20 orang pendamping sosial KUBE sebagai kelompok pembanding yang tidak mengikuti pembekalan berbasisan praktek magang, dengan tujuan model yang dikembangkan tersebut sudah sesuai dengan kemampuan dan harapan serta lebih dapat memudahkan pendamping sosial dalam melaksanakan pendampingannya.

4.4. Identifikasi Variabel Penelitian

Terdapat sejumlah variabel dalam penelitian ini. Adapun variabel-variabel yang dimaksud adalah : Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rekrutmen Pendamping Sosial KUBE, Pembekalan Pendamping Sosial KUBE dengan Praktek Magang serta Kemitraan Usaha antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

4.5. Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka variabel-variabel yang digunakan perlu didefinisikan secara jelas. Hal ini dilakukan

untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel-variabel yang dianalisis.

Adapun variabel-variabel yang dimaksud adalah :

1. Pendamping Sosial, yaitu seseorang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin.
2. Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yaitu bantuan stimulan yang diberikan kepada keluarga miskin berupa usaha ekonomi produktif dikelola secara berkelompok yang terdiri dari 10 orang anggota.
3. Rekrutmen, yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memilih dan menentukan calon pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sesuai dengan syarat-syarat atau kriteria yang telah ditetapkan.
4. Pembekalan, yaitu suatu rangkaian tindakan dalam pembekalan untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh pendamping sosial, sehingga dapat disusun rencana pembekalan yang baik dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengatasi permasalahan di dalam pemberdayaan keluarga miskin.
6. Praktek Magang, yaitu pendamping sosial sebelum melaksanakan program pembedayaan bagi keluarga miskin harus mengikuti kegiatan lapangan yang berhadapan langsung dengan sasaran garapan. yaitu keluarga miskin tentang penanganan masalah-masalah yang dihadapinya.
7. Kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, yaitu adanya kepedulian, kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam memberdayakan keluarga miskin melalui bimbingan, pembinaan dan pemberian bantuan

stimulan berupa bantuan modal atau barang/jasa untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Variabel-variabel tersebut kemudian diukur dengan menggunakan kuesioner model skala Likert 1 sampai dengan 5, dimana :

- a. 5 menunjukkan kategori kualitas sangat baik.
- b. 4 menunjukkan kategori kualitas baik.
- c. 3 menunjukkan kategori kualitas cukup/sedang.
- d. 2 menunjukkan kategori kualitas rendah.
- e. 1 menunjukkan kategori kualitas sangat rendah.

4.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei dan eksperimental. Dalam penelitian ilmu sosial, dikenal dua jenis instrumen penelitian yaitu kuisisioner dan pedoman wawancara atau interview guide.

Dalam penelitian ini, kedua instrumen tersebut digunakan untuk menjangkau serangkaian jawaban dari responden, yaitu pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang pernah mengikuti pembekalan dan keluarga miskin yang mendapat bantuan usaha ekonomi produktif, serta pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) dalam uji coba model.

4.6.1. Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dan untuk mengetahui item-item yang tersaji dalam instrumen benar-benar mampu dan dapat mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Adapun untuk menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total, dengan menggunakan rumus teknik korelasi product moment. yaitu :

$$r_{xy} = \frac{N (\sum xy) - (\sum x \sum y)}{\sqrt{[(N \sum x^2 - (\sum x)^2) (N \sum y^2 - (\sum y)^2)]}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi product moment tangkar

N = Jumlah responden

$\sum x$ = Jumlah skor butir (tiap item)

$\sum y$ = Jumlah skor faktor (total nilai untuk setiap variabel yang diteliti)

4.6.2. Reliabilitas

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan uji Combach's Alpha, dimana rumus koefisien reliabilitasnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} R_{tt} &= \frac{M (V_t - V_x M)}{M - IVT} \\ &= \frac{M}{M-1} \left(1 - \frac{V_x}{V_t} \right) \end{aligned}$$

Keterangan :

r_{tt} = Koefisien Alpha

V_x = Varians butir

V_t = Varians faktor (total)

M = Jumlah butir

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum penelitian yang sesungguhnya dilakukan. Sampel diambil dari pendamping sosial KUBE yang terdapat di Kabupaten Malang sebanyak 20 orang. Sampel tersebut dipilih, karena mempunyai kesamaan dengan sampel penelitian. Dari hasil pengujian validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner valid dan reliabel (selengkapnya lihat lampiran).

4.7. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penelitian menggunakan dua jenis data, yang dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah data hasil penelitian yang diperoleh dari responden baik dengan menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) maupun dengan wawancara yang sudah disiapkan dalam bentuk kuesioner untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang pelaksanaan pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilaksanakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur selama ini dan data ini juga digali dari pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang telah mengikuti pembekalan. Untuk proses pengambilan data kuesioner dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1). 10 kuesioner disebarikan pada pendamping sosial KUBE sebagai dasar pemodelan.
 - 2). 20 orang sebagai kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) memberikan jawaban (*pre test*) sebelum mengikuti pembekalan dengan praktek magang dan memberikan jawaban kembali (*post test*) pada saat setelah mengikuti pembekalan dengan praktek magang.
 - 3). 20 orang sebagai kelompok pembanding yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) memberikan jawaban (*pre test*) dan satu minggu kemudian memberikan jawaban kembali (*post test*).
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pelaksanaan pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti sendiri.

4.8. Cara Pengolahan dan Analisis Data

4.8.1. Cara Pengolahan

Cara yang digunakan untuk mengolah data adalah dengan menggunakan program SPSS versi 10.01, yang berguna untuk mengukur validitas dan reliabilitas kuesioner.

4.8.2. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Langkah awal pengolahan data, yaitu meneliti kembali data yang telah terkumpul dari penyebaran kuesioner. Langkah itu dilakukan guna mengetahui apakah data yang terkumpul cukup baik. Pemeriksaan data (*Editing*) dilakukan juga terhadap jawaban yang telah ada dalam

kuesioner dengan memperhatikan lengkapnya pengisian jawaban, kejelasan makna jawaban dan kesesuaian antar jawaban.

4.8.3. Pembuatan Kode (*Coding*)

Pembuatan kode dilakukan sebagai usaha untuk menyederhanakan data, yaitu dengan memberi simbol angka pada masing-masing kategori dari seluruh jawaban.

4.8.4. Tabulasi

Setelah dilakukan pengkodean, langkah yang terakhir adalah membuat tabulasi data.

4.8.5. Analisis

Untuk menganalisa data dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan skor nilai jawaban tentang pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari masing-masing variabel di kategorikan menjadi sangat rendah, rendah, sedang, baik dan sangat baik. Hasil dari jawaban ini dibawa ke *Focus Group Discussion* (FGD) yang jumlahnya 8 orang. Setelah dipaparkan pada *Focus Group Discussion* (FGD), maka disusunlah Pengembangan Model yang intinya merupakan gabungan pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berdasarkan teori, pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diterapkan selama ini, pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diharapkan, dan pendampingan sosial KUBE yang dapat diterapkan di Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Setelah itu, model yang

dikembangkan tersebut di *testing model* apakah sudah sesuai dengan kemampuan dan harapan.

Pengujian *testing model* dalam penelitian ini menggunakan Chi Square, yang bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan bagi pendamping sosial KUBE antara sebelum dan sesudah mengikuti pembekalan dengan praktek magang pada kelompok yang sudah mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan pada kelompok yang tidak mengikuti pembekalan dengan praktek magang. Pengolahan data *testing model* ini dilakukan dengan SPSS versi 10.01. Adapun kriteria penerimaan ada tidaknya perbedaan adalah :

- a. Jika signifikansi $> 0,05$, maka tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah pada kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan pada kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*).
- b. Jika signifikansi $\leq 0,05$, maka ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pada kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan pada kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*).

BAB 5**ANALISIS HASIL PENELITIAN****5.1. Gambaran Umum**

Gambaran umum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu gambaran umum Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dan gambaran umum Kabupaten Blitar dan Dinas Kesejahteraan Kabupaten Blitar. Karena penelitian ini meliputi program-program dan kebijakan-kebijakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur yang diperuntukkan dan dilaksanakan untuk Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Blitar, yang kegiatannya tersebar di Kabupaten Blitar, khususnya dalam program pemberdayaan keluarga miskin.

5.1.1. Gambaran Umum Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur

Adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian diharapkan pembangunan dapat dilaksanakan berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan karakter budaya dan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam desentralisasi terkandung semangat demokrasi untuk lebih mendekatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan pembangunan.

Dengan semangat desentralisasi, maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab penuh dalam merumuskan, merencanakan dan menetapkan pembangunan di daerahnya. Hal ini juga telah diatur dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa pemerintah daerah memberikan kewenangan yang luas kepada propinsi, kabupaten dan kota sebagai daerah otonom. Dan pemerintah daerah merumuskan dan menetapkan adanya Biro, Dinas, Badan dan Kantor sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing.

Salah satu Dinas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002, dimana Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok : *Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan di bidang usaha kesejahteraan sosial.*

Salah satu sasaran garapan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, adalah pengentasan masalah kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga miskin dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Oleh karena itu pada Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur terdapat Seksi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan bantuan dan pembinaan kepada keluarga miskin, yaitu Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur jo Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi situasi dan kondisi sosial, individu/kelompok yang bermasalah atau menjadi korban dan masalah sosial yang mengganggu tata kehidupan sosial serta menerima laporan pengaduan dari masyarakat terutama para korban tindak kekerasan, perlakuan salah dan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
2. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan advokasi dan perlindungan sosial;
3. Melakukan identifikasi sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial, khususnya perlindungan sosial;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial.

Kegiatan bantuan dan pembinaan keluarga miskin ini dilaksanakan di 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Namun dalam penelitian ini mengambil sampel di Kabupaten Blitar, dikarenakan di Kabupaten ini baik dilihat dari sisi Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) maupun dari sisi Keluarga Binaan Sosial (KBS) bervariasi, ada pendamping sosial yang aktif tetapi Kelompok Usaha Bersamanya tidak berjalan, ada pendamping sosial yang aktif dan Kelompok Usaha Bersama berjalan baik dan ada pendamping sosial tidak aktif, Kelompok Usaha Bersamanya tidak jalan. Berdasarkan hasil

monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Sub Dinas Penyusunan Program baik di lapangan maupun laporan pelaksanaan kegiatan kelompok usaha bersama, bahwa dari 116 kelompok usaha bersama yang ada di Kabupaten Blitar terdapat \pm 80% kelompok usaha bersama yang tidak efektif atau tidak berjalan dengan baik.

5.1.2. Gambaran Umum Kabupaten Blitar dan Dinas Kesejahteraan Sosial

Kabupaten Blitar

Secara geografis, Kabupaten Blitar terletak pada ketinggian \pm 167 meter dari permukaan laut, luas daerah 1.588,79 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri
- Sebelah Selatan dibatasi Samudra Indonesia

Topografinya terdiri atas tanah daratan dan perbukitan/pegunungan, terutama di bagian utara, timur dan selatan sepanjang pesisir laut. Wilayah Kabupaten Blitar memiliki sungai besar yakni Sungai Brantas yang membelah wilayah Kabupaten Blitar menjadi dua bagian, yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan.

Blitar bagian utara memiliki luas wilayah 898,94 km², pada umumnya relatif lebih subur dan Blitar bagian selatan dengan luas wilayah 689,85 km², pada umumnya kurang subur karena daerahnya merupakan pegunungan berbatu kapur dan sedikit tandus. Letak Kabupaten Blitar berada di selatan katulistiwa tepatnya antara 111° 40' -

112° 10' Bujur Timur dan 7°58' - 8°9'5" Lintang Selatan. Hal ini mempengaruhi terhadap tipe iklimnya dan menyebabkan curah hujan cukup tinggi di Blitar bagian Utara.

Secara Demografis, jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada akhir Tahun 2004 sebesar 1.118.565 jiwa yang tersebar di 22 Kecamatan dan 248 Desa, dengan pertumbuhan penduduk 0,38% per tahun. Mata pencaharian penduduk lebih dari 70% bekerja di sektor pertanian, peternakan dan nelayan. Secara umum kondisi mereka dalam keadaan miskin, karena mereka kebanyakan buruh tani bukan pemilik tanah. Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Blitar sebesar 313.616 jiwa, menunjukkan angka yang memprihatinkan, juga terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang lain seperti wanita rawan sosial ekonomi, anak terlantar, penyandang cacat, tuna sosial, keluarga berumah tak layak huni dan lain-lain. Dengan demikian masalah kemiskinan di Kabupaten Blitar merupakan basis dari berbagai permasalahan sosial yang lain. Kondisi masyarakat yang demikian sangat memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terutama pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Kabupaten Blitar di dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), mempunyai Dinas yang khusus memberikan pembinaan dan bimbingan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Blitar. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 374 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Blitar, dimana tugas pokok dan fungsi Dinas Kesejahteraan

Sosial Kabupaten Blitar adalah : *Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, rehabilitasi dan pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dalam wilayah Kabupaten Blitar.* Sub Dinas yang menangani pembinaan dan pemberdayaan keluarga miskin adalah Sub Dinas Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, yaitu pada Seksi Bimbingan Keluarga Miskin. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 374 Tahun 2003, bahwa Seksi Bimbingan Keluarga Miskin mempunyai tugas, yaitu :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan memberikan bantuan, mengatur serta mengawasi pelaksanaan bantuan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin.
- b. Melakukan pendataan, identifikasi dan penentuan jumlah keluarga miskin berdasarkan ketentuan dan kriteria yang ditetapkan sebagai tolok ukur oleh pemerintah.
- c. Mengadakan kerja sama, bimbingan dan pengawasan serta pemberian rangsangan/stimulan kepada badan sosial swasta yang menyelenggarakan usaha di bidang asistensi sosial.
- d. Melakukan evaluasi, pemantauan dan penyusunan laporan atas pelaksanaan kegiatan bimbingan kepada keluarga miskin.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.

5.2. Responden Penelitian

Responden pada penelitian dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama* adalah Petugas Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Keluarga Binaan Sosial (KBS) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). *Kedua* adalah Petugas Pendamping Sosial KUBE yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan Petugas Pendamping Sosial KUBE yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*). Responden-responden ini dipilih agar dapat diketahui bagian yang perlu diperbaiki apakah terkait dengan petugas pendamping sosial atau program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sudah dilaksanakan. Penyajian data adalah dengan menyajikan terlebih dahulu data dari Petugas Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang terdiri dari 10 orang dan menyajikan data dari Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang juga terdiri dari 10 orang. Kemudian menyajikan hasil uji statistik dari kelompok pre test - post test baik pada kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) maupun pada kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) serta perbandingan nilai dari kedua kelompok tersebut.

5.3. Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Diterapkan Selama Ini

5.3.1. Karakteristik Responden

Seluruh responden yang diteliti sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Untuk lebih menggambarkan karakteristik responden pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1. Deskripsi Karakteristik Responden Pendamping Sosial KUBE, Juli 2006

No.	Aspek	Frekuensi	Persentase
1	Pendidikan		
	a. SLTP	1	10
	b. SLTA	7	70
	c. D2	1	10
	d. S1	1	10
	Total	10	100
2	Usia		
	a. 30 – 40 tahun	6	60
	b. 41 – 50 tahun	4	40
	Total	10	100
3	Jenis kelamin		
	a. Laki - laki	8	30
	b. Perempuan	2	70
	Total	10	100
4.	Lama bertugas sebagai Pendamping Sosial KUBE		
	a. 1	6	60
	b. 3	2	20
	c. 4	2	20
	Total	10	100

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa petugas pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 70% berpendidikan SLTA, sisanya berpendidikan SLTP, D2 dan S1.

Dilihat dari faktor usia terdapat 60% berusia 30 sampai dengan 40 tahun, sedangkan yang berusia 40 sampai dengan 50 tahun sebanyak 40%. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin sebagian besar adalah laki-laki yaitu 80% dan sisanya 20% berjenis kelamin perempuan.

5.3.2. Deskripsi Jawaban Responden

Sepuluh responden yang menjadi petugas 60% menyatakan sudah bertugas menjadi pendamping sosial KUBE selama 1 tahun, 20% sudah

bertugas selama 3 tahun dan sisanya 20 % telah bertugas selama 4 tahun. Seluruh responden petugas pendamping sosial KUBE selama ini telah mendapatkan pembekalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwa 90% petugas pendamping sosial KUBE adalah hasil penunjukan baik ditunjuk oleh aparat desa sebesar 30%, kepala desa sebesar 60% dan hanya 10% yang tidak berdasarkan penunjukan. Dan alasan responden mau menjadi pendamping sosial KUBE karena :

1. Panggilan hati untuk membantu keluarga miskin
2. Ikut berperan serta dalam pembangunan
3. Ikut serta dalam pengentasan masalah kemiskinan
4. Pembagian tugas dari desa
5. Menambah pengalaman

Pertanyaan berikutnya responden diminta mengisi seluruh aspek mengenai pelaksanaan KUBE dengan model jawaban tertutup skor 1 sampai dengan 5, hasil selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pendapat responden mengenai tanggapan pembekalan dalam pelaksanaan pendampingan sosial KUBE adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2. Tanggapan Pembekalan dalam Pelaksanaan Pendampingan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak membantu	0	0
2.	Tidak membantu	8	80
3.	Biasa-biasa saja	2	20
4.	Membantu	0	0
5.	Sangat membantu	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 80% menyatakan pelaksanaan pembekalan tidak membantu pendamping sosial dalam pelaksanaan pendampingan sosial KUBE, sedangkan 20% lainnya menyatakan biasa-biasa saja.

Pendapat responden mengenai pengaruh pembekalan terhadap ketrampilan petugas pendamping sosial KUBE adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3. Pengaruh Pembekalan Terhadap Ketrampilan Petugas Pendamping Sosial KUBE, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak mempengaruhi	0	0
2.	Tidak mempengaruhi	5	50
3.	Biasa-biasa saja	5	50
4.	Mempengaruhi	0	0
5.	Sangat mempengaruhi	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 50% menyatakan pembekalan untuk petugas pendamping sosial KUBE tidak berpengaruh terhadap ketrampilan, sedangkan 50% lainnya menyatakan biasa-biasa saja.

Pendapat responden mengenai pembekalan yang dilaksanakan terkait dengan pengetahuan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4. Tanggapan Petugas Pendamping Sosial KUBE Mengenai Pembekalan Terkait Dengan Pengetahuan, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak menambah pengetahuan	0	0
2.	Tidak menambah pengetahuan	2	20
3.	Biasa-biasa saja	5	50
4.	Menambah pengetahuan	3	30
5.	Sangat menambah pengetahuan	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 50% menyatakan biasa-biasa saja jika pembekalan petugas pendamping sosial KUBE dapat menambah pengetahuan responden, 30% menyatakan menambah pengetahuan dan sisanya 20% lainnya menyatakan tidak menambah pengetahuan.

Pendapat responden mengenai pembekalan yang dilaksanakan dapat menambah kompetensi dalam pekerjaan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5. Tanggapan Petugas Pendamping Sosial KUBE Mengenai Pembekalan Dapat Menambah Kompetensi Dalam Pekerjaan, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak setuju	0	0
2.	Tidak setuju	1	10
3.	Biasa-biasa saja	9	90
4.	Setuju	0	0
5.	Sangat setuju	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 90% menyatakan biasa-biasa saja jika pembekalan petugas pendamping sosial KUBE dapat menambah kompetensi dalam pekerjaan responden dan sisanya 10% menyatakan tidak setuju.

Pendapat responden mengenai pembekalan yang pernah diikuti dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi KUBE keluarga miskin adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6. Tanggapan Petugas Pendamping Sosial KUBE Mengenai Pembekalan Membantu Memecahkan Masalah Yang Dihadapi KUBE Keluarga Miskin, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak membantu	0	0
2.	Tidak membantu	10	100
3.	Biasa-biasa saja	0	0
4.	Membantu	0	0
5.	Sangat membantu	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 100% menyatakan pembekalan yang pernah diikuti pendamping sosial KUBE tidak dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi keluarga miskin.

Pendapat responden mengenai pendampingan sosial KUBE dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7. Tanggapan Petugas Pendamping Sosial KUBE Mengenai Pendampingan Sosial KUBE Dapat Membantu Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga Miskin, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak membantu	0	0
2.	Tidak membantu	0	0
3.	Biasa-biasa saja	0	0
4.	Membantu	10	100
5.	Sangat membantu	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 100% menyatakan pendamping sosial KUBE dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin.

Pendapat responden mengenai pendampingan sosial KUBE dapat membantu pengelolaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8. Tanggapan Pendamping Sosial KUBE Mengenai Pendampingan Sosial KUBE Dapat Membantu Pengelolaam Usaha Ekonomi Produktif, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak membantu	0	0
2.	Tidak membantu	0	0
3.	Biasa-biasa saja	0	0
4.	Membantu	7	70
5.	Sangat membantu	3	30
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 70% menyatakan pendamping sosial KUBE dapat membantu pengelolaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin dan 30% responden menyatakan sangat membantu.

Pendapat responden mengenai pendampingan sosial KUBE dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga miskin adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9. Tanggapan Pendamping Sosial KUBE Mengenai Pendampingan Sosial KUBE Dapat Membantu Meningkatkan Pendapatan, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak membantu	0	0
2.	Tidak membantu	1	10
3.	Biasa-biasa saja	9	90
4.	Membantu	0	0
5.	Sangat membantu	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 90% menyatakan biasa-biasa saja jika pendamping sosial KUBE dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan 10 % menyatakan tidak dapat membantu keluarga miskin dalam meningkatkan pendapatannya.

Pendapat responden mengenai kesenjangan isi program pembekalan dengan kebutuhan pendamping sosial KUBE di lapangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.10. Tanggapan Kesenjangan Isi Program Dengan Kebutuhan Pendamping Sosial KUBE Di Lapangan, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak ada kesenjangan	0	0
2.	Tidak ada kesenjangan	0	0
3.	Biasa-biasa saja	0	0
4.	Ada kesenjangan	8	80
5.	Sangat ada kesenjangan	2	20
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 80% menyatakan terdapat ada kesenjangan dan 20% menyatakan sangat ada kesenjangan antara isi program dengan kebutuhan pendamping sosial KUBE di lapangan.

Pendapat responden mengenai penunjukkan pendamping sosial KUBE yang dilaksanakan selama ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.11. Tanggapan Penunjukan Pendamping Sosial KUBE Yang Dilaksanakan Selama Ini, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak tepat	0	0
2.	Tidak tepat	10	100
3.	Biasa-biasa saja	0	0
4.	Tepat	0	0
5.	Sangat tepat	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 100 % menyatakan penunjukan pendamping sosial KUBE selama ini tidak tepat.

Pendapat responden tentang perlunya dilaksanakan rekrutmen pendamping sosial yang selektif adalah sebagai berikut :

Tabel 5.12. Tanggapan Mengenai Rekrutmen Pendamping Sosial KUBE Yang Selektif, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak perlu	0	0
2.	Tidak perlu	0	0
3.	Acuh saja	0	0
4.	Perlu	5	50
5.	Sangat perlu	5	50
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 50% menyatakan rekrutmen pendamping sosial KUBE perlu dilaksanakan secara selektif dan sisanya 50% menyatakan sangat perlu.

Pendapat responden mengenai efisiensi program pembekalan pendamping sosial KUBE yang dilaksanakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 5.13. Tanggapan Mengenai Efisiensi Program Pembekalan Pendamping Sosial KUBE Selama Ini, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak efisien	0	0
2.	Tidak efisien	10	100
3.	Biasa-biasa saja	0	0
4.	Efisien	0	0
5.	Sangat efisien	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 100% menyatakan pembekalan pendamping sosial KUBE yang dilaksanakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur selama ini tidak efisien.

Pendapat responden mengenai ketepatan materi pembekalan pendamping sosial KUBE yang dilaksanakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 5.14. Tanggapan Mengenai Ketepatan Materi Pembekalan Pendamping Sosial KUBE Selama Ini, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak tepat	0	0
2.	Tidak tepat	8	80
3.	Biasa-biasa saja	2	20
4.	Tepat	0	0
5.	Sangat tepat	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 80% menyatakan materi pembekalan pendamping sosial KUBE yang dilaksanakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur tidak tepat, sedangkan 20% lainnya menyatakan biasa-biasa saja.

Pendapat responden mengenai metode pembekalan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 5.15. Tanggapan Mengenai Metode Pembekalan Yang Dilaksanakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak sesuai	1	10
2.	Tidak sesuai	7	70
3.	Biasa-biasa saja	2	20
4.	Sesuai	0	0
5.	Sangat sesuai	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 70% menyatakan metode pembekalan yang dilaksanakan Dinas Sosial tidak sesuai dengan harapan pendamping sosial KUBE, 20% menyatakan biasa-biasa saja dan 10% menyatakan sangat tidak sesuai.

Pendapat responden mengenai alokasi anggaran untuk program pendampingan dalam pemberdayaan keluarga miskin adalah sebagai berikut :

Tabel 5.16. Tanggapan Mengenai Alokasi Anggaran untuk Program Pendampingan dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak cukup	1	10
2.	Tidak cukup	6	60
3.	Biasa-biasa saja	3	30
4.	Cukup	0	0
5.	Sangat cukup	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 60% menyatakan alokasi anggaran untuk program pendampingan dalam pemberdayaan keluarga miskin tidak cukup, 30% menyatakan biasa-biasa saja dan 10% menyatakan sangat tidak cukup.

Pendapat responden mengenai efektivitas jangka waktu pembekalan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 5.17. Tanggapan Mengenai Efektivitas Jangka Waktu Pembekalan Yang Dilaksanakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak efektif	0	0
2.	Tidak efektif	9	90
3.	Biasa-biasa saja	1	10
4.	Efektif	0	0
5.	Sangat efektif	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 90% menyatakan jangka waktu pembekalan yang dilakukan Dinas Sosial tidak efektif dan 10% lainnya biasa saja.

Pendapat responden mengenai instruktur pembekalan sesuai dengan bidang tugasnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.18. Tanggapan Mengenai Instruktur Pembekalan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak sesuai	0	0
2.	Tidak sesuai	0	0
3.	Cukup sesuai	7	70
4.	Sesuai	3	30
5.	Sangat sesuai	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 70% menyatakan instruktur pembekalan yang ada cukup sesuai dengan bidang tugasnya dan sisanya 30% menyatakan telah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pendapat responden mengenai media peralatan yang digunakan dalam penyelenggaraan pembekalan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.19. Tanggapan Mengenai Media Peralatan Yang Digunakan Dalam Pembekalan, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak lengkap	0	0
2.	Tidak lengkap	1	10
3.	Cukup lengkap	9	90
4.	Lengkap	0	0
5.	Sangat lengkap	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 90% menyatakan media peralatan yang digunakan dalam penyelenggaraan pembekalan cukup lengkap dan sisanya 10% menyatakan lengkap.

Pendapat responden mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembekalan terhadap level petugas pendamping sosial KUBE adalah sebagai berikut :

Tabel 5.20. Tanggapan Mengenai Proses Pembelajaran Yang Dilaksanakan Dalam Pembekalan, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak sesuai	0	0
2.	Tidak sesuai	1	10
3.	Kurang sesuai	9	90
4.	Sesuai	0	0
5.	Sangat sesuai	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 90% menyatakan proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembekalan kurang sesuai dengan level petugas pendamping sosial KUB dan 10% menyatakan tidak sesuai.

Pendapat responden mengenai perlunya pelaksanaan pembekalan lain adalah sebagai berikut :

Tabel 5.21. Tanggapan Mengenai Perlunya Pelaksanaan Pembekalan Lain, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak perlu	0	0
2.	Tidak perlu	0	0
3.	Tidak tahu menahu	0	0
4.	Perlu	5	50
5.	Sangat perlu	5	50
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 50% menyatakan perlu dan 50% sisanya menyatakan sangat perlu untuk dilaksanakannya pembekalan lain sesuai kebutuhan pendamping sosial KUBE.

Pendapat responden mengenai rencana pembekalan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.22. Tanggapan Mengenai Rencana Pembekalan Di Masa Yang Akan Datang, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak perlu diadakan perubahan	0	0
2.	Tidak perlu diadakan perubahan	0	0
3.	Acuh saja	0	0
4.	Perlu diadakan perubahan	5	50
5.	Sangat perlu diadakan perubahan	5	50
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 50% menyatakan perlu dan 50% sisanya menyatakan sangat perlu untuk diadakan perubahan-perubahan pada pembekalan di masa yang akan datang.

Pendapat responden mengenai perlunya evaluasi dalam penyelenggaraan pembekalan pendamping sosial KUBE adalah sebagai berikut :

Tabel 5.23. Tanggapan Mengenai Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembekalan Pendamping Sosial KUBE, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak perlu	0	0
2.	Tidak perlu	0	0
3.	Sekedarnya	0	0
4.	Perlu	5	50
5.	Sangat perlu	5	50
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 50% menyatakan perlu dan 50% sisanya menyatakan sangat perlu untuk dilaksanakan evaluasi dalam penyelenggaraan pembekalan terhadap pendamping sosial KUBE.

Kemudian setelah ditanyakan kuesioner mengenai perlunya dilakukan evaluasi dan menurut hasil wawancara dengan responden, maka pihak yang seharusnya mengevaluasi adalah :

1. Tim dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.
2. Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Pendapat responden mengenai sikap terhadap program pembekalan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.24. Tanggapan Mengenai Sikap Terhadap Program Pembekalan, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak respek	0	0
2.	Tidak respek	0	0
3.	Kurang respek	0	0
4.	Respek	9	90
5.	Sangat respek	1	10
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 90% mempunyai sikap yang respek terhadap program pembekalan dan sisanya 10% menyatakan sangat respek. Dari hasil ini petugas pendamping sosial KUBE mempunyai sikap yang baik terhadap pelaksanaan program pembekalan itu sendiri.

Pendapat responden mengenai perlunya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan keluarga miskin adalah sebagai berikut :

Tabel 5.25. Tanggapan Mengenai Perlunya Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendampingan untuk Pemberdayaan Keluarga Miskin, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Sangat tidak perlu	0	0
2.	Tidak perlu	0	0
3.	Kurang perlu	1	10
4.	Perlu	7	70
5.	Sangat perlu	2	20
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 70% menyatakan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan keluarga miskin perlu, 20% menyatakan sangat perlu, dan 10% menyatakan kurang perlu.

5.4. Keluarga Binaan Sosial (KBS) Melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Miskin

5.4.1. Karakteristik Responden

Seluruh responden yang diteliti berjenis kelamin laki-laki. Untuk lebih menggambarkan karakteristik responden Keluarga Binaan Sosial (KBS) melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Miskin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.26. Deskripsi Karakteristik Responden Keluarga Binaan Sosial, Juli 2006

No.	Aspek	Frekuensi	Persentase
1.	Pendidikan		
	a. Tidak sekolah	2	20
	b. Tidak tamat SD	6	60
	c. Tamat SD	2	20
	Total	10	100
2	Usia		
	a. 30 – 40 tahun	1	10
	b. 41 – 50 tahun	2	20
	c. > 50 tahun	7	70
	Total	10	100
3	Jabatan di KUBE		
	c. Anggota	3	30
	d. Ketua	7	70
	Total	10	100

No.	Aspek	Frekuensi	Persentase
4	Lama bergabung di KUBE		
	a. 1 tahun	3	30
	b. 3 tahun	3	30
	c. 4 tahun	4	40
	Total	10	100

Tabel 5.26 menunjukkan bahwa Keluarga Binaan Sosial (KBS) melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Miskin sebagian besar berpendidikan rendah, bahkan 20% tidak sekolah dan tidak tamat Sekolah Dasar sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden masih rendah yang memungkinkan responden hanya berkerja sebagai buruh tani. Dilihat dari faktor usia sebanyak 70% berusia 50 tahun keatas, sehingga untuk bekerja di sektor lain sudah tidak memungkinkan karena usia yang sudah relatif tua.

5.4.2. Deskripsi Jawaban Responden

Responden yang diteliti sebagian besar menduduki jabatan sebagai ketua dan anggota di KUBE tersebut. Sedangkan lama bergabung di KUBE tersebut bervariasi mulai dari 1 tahun, 3 tahun dan 4 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 100% memperoleh program pendampingan dari petugas pendamping sosial KUBE yang berada di daerah tersebut. Responden dapat menjadi anggota kelompok usaha bersama ini berdasarkan hasil penunjukkan petugas desa/kecamatan/kabupaten. Bentuk bantuan yang diberikan selama ini adalah kambing (Jawa). Dan manfaat yang diperoleh responden menjadi pengurus atau anggota KUBE adalah :

1. Menambah pengetahuan dan kesatuan.
2. Menambah persaudaraan dan keakraban.
3. Dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan saling tukar pendapat sesama anggota KUBE.
4. Menambah wawasan dalam berorganisasi.

Sedangkan mengenai manfaat yang dirasakan responden dengan adanya program pemberdayaan keluarga miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sendiri memberikan jawaban sebagai berikut :

Tabel 5.27. Deskripsi Manfaat Yang Dirasakan Oleh Keluarga Binaan Sosial (KBS) Melalui Pendekatan KUBE, Juli 2006

No.	Manfaat	F	%
1.	Ya	4	40
2.	Tidak	6	60
	Total	10	100

Tabel 5.27 menunjukkan bahwa 60% responden menyatakan bantuan yang diterima sekarang ini tidak bermanfaat, dan sisanya 40% menyatakan bermanfaat. 40% responden yang merasakan manfaat tersebut menyatakan bahwa program pemberdayaan keluarga miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut bermanfaat, karena :

1. Bisa untuk menabung.
2. Bisa untuk membiayai sekolah anak-anaknya.

Pertanyaan berikutnya apakah bantuan melalui KUBE sesuai dengan harapan responden. hasil selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.28. Deskripsi Bantuan Melalui KUBE Sesuai Harapan Keluarga Binaan Sosial (KBS). Juli 2006

No.	Sesuai Harapan	F	%
1.	Ya	2	20
2.	Tidak	8	80
	Total	10	100

Tabel 5.28 menunjukkan bahwa 80% responden menyatakan bantuan yang diterima sekarang ini tidak sesuai dengan harapannya, dan hanya 20% yang menyatakan sesuai harapan.

Kemudian kuesioner berikutnya adalah mengkonfirmasi jawaban responden akan berbagai aspek yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.29. Deskripsi Pengelolaan Bantuan Secara Berkelompok, Juli 2006

No.	Pengelolaan	F	%
1.	Tidak baik	0	0
2.	Kurang baik	6	60
3.	Cukup baik	4	40
4.	Baik	0	0
5.	Sangat baik	0	0
	Total	10	100

Tabel 5.29 menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan secara berkelompok selama ini dilaksanakan kurang baik dengan prosentase 60% dan sisanya 40% menyatakan cukup baik

Pendapat responden mengenai keberadaan petugas pendamping sosial di KUBE selama ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.30. Tanggapan Tentang Keberadaan Petugas Pendamping Sosial KUBE, Juli 2006

No.	Petugas Pendamping Sosial KUBE	F	%
1.	Tidak setuju dan tidak bermanfaat	0	0
2.	Kurang setuju dan kurang bermanfaat	1	10
3.	Biasa-biasa saja	4	40
4.	Setuju dan bermanfaat	4	40
5.	Sangat setuju dan sangat bermanfaat	1	10
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan adanya variasi, sebesar 10% menyatakan sangat setuju dan sangat bermanfaat terhadap keberadaan petugas pendamping sosial KUBE, dan 40% menyatakan setuju dan bermanfaat terhadap keberadaan petugas pendamping sosial KUBE. Sedangkan 40% lagi menyatakan biasa saja dan sisanya 10% menyatakan kurang setuju dan kurang bermanfaat.

Pendapat responden mengenai pendamping sosial KUBE dapat membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi responden adalah sebagai berikut :

Tabel 5.31. Tanggapan KBS Terhadap Pendamping Sosial KUBE Dapat Membantu Dalam Memecahkan Masalah, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Tidak membantu	0	0
2.	Kurang membantu	4	40
3.	Biasa-biasa saja	5	50
4.	Membantu	0	0
5.	Sangat membantu	1	10
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 50% menyatakan pendamping sosial KUBE dapat membantu dalam memecahkan masalah

yang dihadapi Keluarga Binaan Sosial adalah biasa-biasa saja, 10% menyatakan sangat membantu dan 40% menyatakan kurang membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi Keluarga Binaan Sosial.

Pendapat responden mengenai pendamping sosial KUBE dapat membantu dalam menjalankan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.32. Tanggapan KBS Terhadap Pendamping Sosial KUBE Dapat Membantu Dalam Menjalankan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Tidak membantu	0	0
2.	Kurang membantu	7	70
3.	Biasa-biasa saja	2	20
4.	Membantu	1	10
5.	Sangat membantu	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 70% menyatakan pendamping sosial KUBE dapat membantu Keluarga Binaan Sosial dalam menjalankan Usaha Ekonomi Produktif adalah kurang membantu, 10% menyatakan membantu dan 20% menyatakan biasa-biasa saja.

Pendapat responden mengenai pendamping sosial KUBE dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok Keluarga Binaan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 5.33. Tanggapan KBS Terhadap Pendamping Sosial KUBE Dapat Membantu Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokoknya, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Tidak membantu	1	10
2.	Kurang membantu	7	70
3.	Biasa-biasa saja	1	10
4.	Membantu	1	10
5.	Sangat membantu	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 70% menyatakan keberadaan pendamping sosial KUBE dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok Keluarga Binaan Sosial adalah kurang membantu. 10% menyatakan tidak membantu, 10% menyatakan biasa-biasa saja dan 10% menyatakan membantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Pendapat responden mengenai pendamping sosial KUBE dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan Keluarga Binaan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 5.34. Tanggapan KBS Terhadap Pendamping Sosial KUBE Dapat Membantu Dalam Meningkatkan Pendapatannya, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Tidak membantu	1	10
2.	Kurang membantu	8	80
3.	Biasa-biasa saja	1	10
4.	Membantu	0	0
5.	Sangat membantu	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 80% menyatakan keberadaan pendamping sosial KUBE dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan Keluarga Binaan Sosial adalah kurang membantu. 10% menyatakan biasa-biasa saja dan 10% menyatakan tidak membantu dalam meningkatkan pendapatan Keluarga Binaan Sosial.

Pendapat responden mengenai pengetahuan yang diberikan oleh petugas pendamping sosial KUBE sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Keluarga Binaan Sosial (KBS) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.35. Tanggapan tentang Kesesuaian Pengetahuan yang Diberikan oleh Petugas Pendamping Sosial KUBE terhadap Kemampuan KBS, Juli 2006

No.	Kategori	F	%
1.	Tidak sesuai	0	0
2.	Kurang sesuai	7	70
3.	Biasa-biasa saja	3	30
4.	Sesuai	0	0
5.	Sangat sesuai	0	0
	Total	10	100

Jawaban responden menunjukkan bahwa 70% menyatakan pengetahuan yang diberikan oleh petugas pendamping sosial KUBE terhadap kemampuan Keluarga Binaan Sosial (KBS) adalah kurang sesuai dan 30% menyatakan biasa saja.

Dibagian akhir kuesioner responden diminta untuk memberikan masukan tentang kriteria petugas pendamping sosial KUBE untuk di masa yang akan datang yang sesuai harapan Keluarga Binaan Sosial (KBS) dan bantuan yang sesuai dengan kemampuan Keluarga Binaan Sosial (KBS). Dari 10 responden tersebut jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Profesional dan diseleksi, bantuannya harus disesuaikan dengan kebutuhan Keluarga Binaan Sosial (KBS).
2. Profesional dan bantuannya dapat meningkatkan pendapatan Keluarga Binaan Sosial (KBS).
3. Profesional dan aktif. jenis bantuannya berupa barang yang dapat dimanfaatkan, seperti bakul bakso, meracangan dan lain-lain serta bantuan modal untuk usaha tersebut.
4. Pendamping sosial harus aktif dan mau menyatu dengan masyarakat.

5. Profesional dan aktif, bantuannya yang menguntungkan bagi Keluarga Binaan Sosial (KBS).

5.5. Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berdasarkan Teori dan Petunjuk Pelaksanaan

Untuk mencapai tujuan dari kegiatan pemberdayaan keluarga miskin adalah tersedianya sumber daya manusia petugas pendamping sosial yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan, yang merupakan hal yang sangat penting. Petugas pendamping sosial merupakan mitra kerja bagi keluarga miskin yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Perekrutan petugas pendamping sosial merupakan salah satu tahap yang menentukan bagi keberhasilan program pendampingan. Proses rekrutmen ini harus dapat menghasilkan petugas pendamping sosial yang berdedikasi tinggi dan mempunyai motivasi yang kuat untuk mengembangkan kelompok usaha bersama bagi keluarga miskin. Agar hal ini dapat dicapai, maka petugas pendamping sosial dalam pemberdayaan keluarga miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Jenjang pendidikan minimal SLTA/Sederajat.
2. Diutamakan usia antara 20 – 50 tahun atau dianggap mempunyai komitmen yang tinggi pada pemahaman kebutuhan masyarakat dan bersedia di tempatkan di lokasi kegiatan.
3. Diprioritaskan berdomisili di Kabupaten tempat lokasi.
4. Prioritas diberikan kepada yang sudah berpengalaman.

5. Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk membantu pemberdayaan keluarga miskin.
6. Mempunyai pengalaman yang memadai di bidang manajemen pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
7. Mempunyai kemampuan memfasilitasi perubahan dan pengembangan kelompok.
8. Bersedia dan sanggup mematuhi peraturan dan tata laksana kegiatan pemberdayaan keluarga miskin.

Oleh karena itu, seorang Pendamping Sosial KUBE dalam melaksanakan pendampingan harus memiliki tahapan kegiatan, agar lebih terarah dan dapat dipahami dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan yang harus dilakukan oleh seorang pendamping sosial KUBE, agar menjadi pendamping sosial KUBE yang profesional adalah :

1. Pengenalan Kebutuhan Masyarakat (Identifikasi Kebutuhan).
2. Rekrutmen/Seleksi Calon Pendamping Sosial KUBE.
3. Pelatihan/Pembekalan Pendamping Sosial KUBE.
4. Praktek Kerja Lapangan/Praktek Magang.

Setelah melalui tahapan di atas dan memenuhi syarat untuk menjadi petugas pendamping sosial KUBE, maka seorang pendamping sosial KUBE harus melaksanakan tugas-tugasnya sebagai berikut :

1. Melakukan seleksi calon keluarga binaan sosial.
2. Diskusi pemilihan/penentuan jenis usaha.
3. Memberikan latihan ketrampilan berusaha bagi keluarga binaan sosial.
4. Memberikan bimbingan usaha kelompok pada keluarga binaan sosial.

5. Dapat melakukan kemitraan usaha dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang berpengaruh yang ada di lokasi kegiatan.

5.6. Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Diharapkan

Berdasarkan hasil survei di lapangan yang sudah diperoleh, maka berikut ini adalah Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diharapkan, yang dapat diajukan sebagai bahan untuk mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD). Standar acuan bahwa aspek tersebut perlu dikembangkan atau diperbaiki adalah nilai presentase jawaban dominan. Jika jumlah presentase jawaban positif (baik) sama dengan atau lebih dari 50%, maka aspek tersebut merupakan aspek yang harus dikembangkan dan jika prosentase jawaban negatif (kurang dan cukup) sama dengan atau lebih dari 50%, maka hal tersebut perlu diperbaiki.

Berikut ini adalah pengembangan model pendamping sosial KUBE yang diharapkan menurut petugas pendamping sosial KUBE adalah sebagai berikut :

Tabel 5.36. Pengembangan Model Menurut Petugas Pendamping Sosial KUBE, Juli 2006

No.	Indikator	% Jawaban Dominan	Keterangan
1.	Petugas pernah mengikuti pembekalan	Ya, 100%	Dikembangkan
2.	Pembekalan yang pernah diikuti Pendamping Sosial KUBE dapat membantu dalam pelaksanaan pendampingan sosial KUBE	Tidak, 80%	Diperbaiki
3.	Pengaruh pembekalan yang pernah diikuti terhadap keterampilan Pendamping Sosial KUBE	Tidak, 50%	Diperbaiki
4.	Pembekalan yang diikuti dapat menambah pengetahuan Pendamping Sosial KUBE	Biasa-biasa saja, 50%	Diperbaiki

No.	Indikator	% Jawaban Dominan	Keterangan
5.	Pembekalan yang diikuti dapat membantu Pendamping Sosial KUBE menambah kompetensi dalam pekerjaan	Biasa-biasa saja, 90%	Diperbaiki
6.	Pembekalan yang diikuti dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi KUBE Keluarga Miskin	Tidak membantu, 100%	Diperbaiki
7.	Pendamping Sosial KUBE dapat membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok	Membantu, 100%	Dikembangkan
8.	Pendamping Sosial KUBE dapat membantu keluarga miskin dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif	Membantu, 70%	Dikembangkan
9.	Pendamping Sosial KUBE dapat membantu keluarga miskin dalam meningkatkan pendapatan	Biasa-biasa saja, 90%	Diperbaiki
10.	Kesenjangan antara isi program pembekalan dengan kebutuhan Pendamping Sosial KUBE di lapangan	Ada kesenjangan, 80%	Diperbaiki
11.	Penunjukan pendamping sosial KUBE yang dilaksanakan selama ini	Tidak tepat, 100%	Diperbaiki
12.	Perlu adanya rekrutmen petugas pendamping sosial yang selektif	Sangat perlu dan Perlu, 50%	Dikembangkan
13.	Efisiensi program pembekalan Pendamping Sosial KUBE yang diselenggarakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur	Tidak efisien, 100%	Diperbaiki
14.	Ketepatan materi pembekalan	Tidak tepat, 80%	Diperbaiki
15.	Metode pembekalan	Tidak sesuai, 70%	Diperbaiki
16.	Alokasi anggaran untuk program pendampingan dalam pemberdayaan keluarga miskin	Tidak cukup, 60%	Diperbaiki
17.	Jangka waktu pembekalan	Tidak efektif, 90%	Diperbaiki
18.	Instruktur pembekalan	Cukup sesuai, 70%	Diperbaiki
19.	Media peralatan yang digunakan dalam pembekalan	Cukup lengkap, 90%	Diperbaiki
20.	Proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembekalan	Kurang sesuai, 90%	Diperbaiki
21.	Perlunya pelaksanaan pembekalan lain	Sangat perlu dan Perlu, 50%	Dikembangkan

No.	Indikator	% Jawaban Dominan	Keterangan
22.	Rencana pembekalan di masa yang akan datang	Sangat perlu dan Perlu, 50%	Dikembangkan
23.	Evaluasi terhadap pelaksanaan pembekalan pendamping sosial KUBE	Sangat perlu dan Perlu, 50%	Dikembangkan
24.	Sikap terhadap program pembekalan	Respek, 90%	Dikembangkan
25.	Kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan keluarga miskin	Perlu, 70%	Dikembangkan

Tabel 5.36 menunjukkan bahwa menurut Pendamping Sosial KUBE banyak aspek yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dari model pendamping sosial KUBE, terutama yang berkaitan dengan pembekalan dan rekrutmen pendamping sosial KUBE yang profesional.

Berikut ini adalah pengembangan model pendamping sosial KUBE yang diharapkan menurut Keluarga Binaan Sosial (KBS) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.37. Pengembangan Model Pendamping Sosial KUBE Menurut Keluarga Binaan Sosial (KBS), Juli 2006

No.	Indikator	% Jawaban Dominan	Keterangan
1.	Manfaat bantuan bagi KBS	Tidak, 60%	Diperbaiki
2.	Bantuan sesuai harapan KBS	Tidak, 80%	Diperbaiki
3.	Pengelolaan bantuan secara kelompok	Kurang baik, 60%	Diperbaiki
4.	Pendapat tentang perlu adanya petugas pendamping sosial KUBE	Setuju dan bermanfaat, 40%, sangat setuju dan sangat bermanfaat, 10%,	Dikembangkan
5.	Pendamping Sosial KUBE dapat membantu dalam memecahkan masalah KBS	Biasa-biasa saja, 50%	Diperbaiki
6.	Pendamping Sosial KUBE dapat membantu dalam menjalankan UEP	Kurang membantu, 70%	Diperbaiki
7.	Pendamping Sosial KUBE dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok KBS	Kurang membantu, 70%	Diperbaiki

No.	Indikator	% jawaban dominant	Keterangan
8.	Pendamping Sosial KUBE dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan KBS	Kurang membantu, 80%	Diperbaiki
9.	Kesesuaian pengetahuan yang diberikan petugas pendamping sosial KUBE terhadap kemampuan KBS	Kurang sesuai, 70%	Diperbaiki

Tabel 5.37 menunjukkan bahwa menurut Keluarga Binaan Sosial (KBS) banyak aspek yang perlu diperbaiki dari model pendamping sosial KUBE, terutama yang berkaitan dengan kemampuan pendamping sosial KUBE seperti dalam memecahkan permasalahan, dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif secara kelompok, dalam memenuhi kebutuhan KBS, dalam meningkatkan pendapatan KBS dan dalam mentransfer informasi dan pengetahuan pada KBS. Aspek yang perlu dikembangkan dari model pendamping sosial KUBE ini adalah keberadaan pendamping sosial KUBE di lapangan harus lebih ditingkatkan baik yang berkaitan dengan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan.

5.7. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan di rumah Bapak Kepala Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. *Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan di daerah ini, karena daerah tersebut tidak berhasil dalam melaksanakan pemberdayaan keluarga miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Meskipun aparat dan masyarakat di daerah tersebut sangat mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama

(KUBE). Adapun hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.38. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD), Juli 2006

No.	Permasalahan	Nama Peserta FGD	Gagasan
1.	Penunjukan Pendamping Sosial KUBE tidak tepat	Petugas Kabupaten	Untuk mencetak pendamping sosial KUBE yang profesional harus dilaksanakan rekrutmen terhadap calon pendamping sosial KUBE
		Aparat Kecamatan	Perlu adanya rekrutmen calon pendamping sosial KUBE yang selektif, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional
		Keluarga Binaan Sosial	Petugas yang akan mendampingi KUBE harus diseleksi terlebih dahulu
		Karang Taruna	Supaya pelaksanaan pendampingan tepat sasaran, maka harus dilakukan rekrutmen terhadap calon pendamping sosial KUBE
2.	Pembekalan yang pernah diikuti belum sesuai dengan kemampuan dan pendamping sosial KUBE, yaitu tidak dapat membantu pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan pendampingan seperti dalam memecahkan masalah yang dihadapi KUBE, dalam memenuhi kebutuhan pokok dan dalam meningkatkan pendapatan KBS	Pendamping Sosial KUBE	Pembekalan tidak hanya dilaksanakan sekali saja oleh Propinsi, tetapi juga dilaksanakan di daerah

No.	Permasalahan	Nama Peserta FGD	Gagasan
		Aparat Desa	Pembekalan tidak hanya diberikan pada saat akan memperoleh kegiatan, tetapi harus berkelanjutan
		Tokoh Masyarakat	Pembekalan sebaiknya dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten
		Petugas Propinsi	Pembekalan yang diberikan kepada pendamping sosial harus bersifat spesifik dan praktis
		Keluarga Binaan Sosial	Pembekalan yang praktis dapat membantu KBS dalam memecahkan permasalahan, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan
3.	Materi, metode, sarana dan prasarana pembekalan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur tidak efektif dan efisien	Pendamping Sosial KUBE	Materi yang diberikan harus bersifat spesifik, mudah dipahami dan dilaksanakan di lapangan serta metode pembekalan juga dilaksanakan di lapangan (praktek magang)
		Petugas Kabupaten	Materi pembekalan harus bersifat praktis jangan teoritis saja, metode pembekalan harus diimbangi dengan praktek magang di lapangan
		Petugas Propinsi	Materi dan metode pembekalan harus lebih difokuskan pada realita di lapangan, sehingga pengetahuan yang

No.	Permasalahan	Nama Peserta FGD	Gagasan
			diperoleh oleh pendamping dapat dengan mudah diterapkan di masyarakat
		Aparat Desa	Materi yang diberikan simpel saja tidak usah bertele-tele harus lebih ditekankan pada penggunaan di lapangan dan tempat pembekalan harus lebih nyaman bagi keamanan dan kesehatan peserta
		Aparat Kecamatan	Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur harus berani melakukan inovasi baru, yaitu dengan pembekalan di lapangan (praktek magang) dan tempat pembekalan hendaknya yang layak untuk digunakan sebagai tempat pelatihan
4.	Terlalu singkatnya waktu pelaksanaan pembekalan bagi pendamping sosial KUBE	Petugas Kabupaten	Pembekalan di dalam kelas hendaknya selama 5 hari dan praktek magang selama 7 hari
		Aparat Kecamatan	Pembekalan di dalam kelas jangan terlalu lama, tetapi pembekalan di lapangan lebih ditekankan (lebih lama)
		Aparat Desa	Pembekalan di dalam kelas tetap 3 hari, namun ditambah pembekalan di lapangan selama 7 hari

No.	Permasalahan	Nama Peserta FGD	Gagasan
		Pendamping Sosial KUBE	Pembekalan di dalam kelas 5 hari dan praktek lapangan 7 hari
5.	Kurang tepatnya instruktur dalam penyampaian materi pembekalan bagi pendamping sosial KUBE	Petugas Propinsi	Instruktur dalam penyampaian materi sudah menggunakan teknologi modern seperti LCD dan dilengkapi dengan kisah nyata di lapangan
		Petugas Kabupaten	Instruktur pembekalan harus dari berbagai unsur yang terkait dengan materi pembekalan dan harus sesuai dengan bidang tugasnya (profesinya)
		Aparat Kecamatan	Instruktur jangan hanya dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, tetapi juga harus merangkul dari instansi terkait maupun disiplin ilmu yang lain, khususnya dalam manajemen pengelolaan usaha dan juga dari perguruan tinggi
		Aparat Desa	Instruktur dalam penyampaian materi jangan bertele-tele dan teoritis harus yang simpel yang mudah dipahami, dilaksanakan
		Pendamping Sosial KUBE	Instruktur pembekalan harusnya lebih ditekankan dari kalangan praktisi dan dunia usaha tanpa me-

No.	Permasalahan	Nama Peserta FGD	Gagasan
			ngindahkan dari kalangan pemerintah, sehingga pembekalan tersebut lebih bermanfaat
6.	Anggaran yang disediakan untuk program pemberdayaan keluarga miskin belum mencukupi untuk pelaksanaan program tersebut	Pendamping Sosial KUBE	Pihak Dinas Sosial Propinsi harus menambah alokasi kegiatan untuk pemberdayaan keluarga miskin yang lebih besar
		Keluarga Binaan Sosial	Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur harus menambah dana yang lebih besar untuk pemberian bantuan kepada keluarga fakir miskin
		Petugas Kabupaten	Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur harus menambah alokasi kegiatan untuk pemberdayaan keluarga miskin yang lebih besar baik untuk bantuan motivasi bagi pendamping sosial KUBE maupun bantuan stimulan bagi KBS
		Petugas Propinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar juga harus mendukung dan mengalokasikan dana untuk program pemberdayaan keluarga miskin, sehingga program ini dapat dilaksanakan secara merata dan menyeluruh

No.	Permasalahan	Nama Peserta FGD	Gagasan
7.	Pendamping sosial KUBE belum dapat mengelola kelompok usahanya dengan baik	Petugas Propinsi	Perlu adanya tambahan pemberian pengetahuan melalui pelatihan lanjutan, terutama dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif
		Petugas Kabupaten	Pendamping sosial KUBE harus diberi motivasi, sehingga aktif melaksanakan tugas dengan tambahan uang lelah
		Aparat Kecamatan	Dinas Sosial Propinsi maupun Kabupaten harus berani membuat terobosan baru dengan merangkul dunia usaha yang peduli terhadap usaha kesejahteraan sosial
		Tokoh Masyarakat	Adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan UEP
		Karang Taruna	Dinas sosial melibatkan unsur-unsur yang berpengaruh yang ada di lokasi kegiatan untuk membantu tugas-tugas pendamping sosial KUBE
8.	Kurang bermanfaat bantuan yang diterima oleh Keluarga Binaan Sosial (KBS)	Aparat Kecamatan	Bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan KBS
		Aparat Desa	Bantuan hendaknya ditawarkan terlebih dahulu kepada KBS sebelum bantuan tersebut di dropping

No.	Permasalahan	Nama Peserta FGD	Gagasan
		Tokoh Masyarakat	Harus ada koordinasi yang baik antara Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Pendamping Sosial dan KBS
		Karang Taruna	Pihak Dinas Sosial Propinsi jangan asal tunjuk dan menentukan jenis bantuannya tanpa mengetahui kebutuhan dan kondisi KBS
9.	Keluarga Binaan Sosial (KBS) tidak dibekali pengetahuan dalam pengelolaan usaha ekonomi produktifnya	Pendamping Sosial KUBE	Sebelum menerima bantuan KBS harus diseleksi dan dilatih dulu dalam pengelolaan bantuannya
		Aparat Kecamatan	KBS sebelum menerima bantuan harus dilatih terlebih dahulu, sehingga tidak kesulitan dalam menjalankan usahanya
		Aparat Desa	Adanya seleksi terhadap calon KBS dan pelatihan dalam penerimaan bantuan
		Tokoh Masyarakat	Seleksi calon KBS harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, sehingga bantuannya tepat sasaran dan diberikan kepada calon KBS yang benar-benar membutuhkan

No.	Permasalahan	Nama Peserta FGD	Gagasan
10.	Kurangya evaluasi dari pemerintah propinsi dan kabupaten	Petugas Kabupaten	Evaluasi hendaknya dilakukan mulai dari tahap identifikasi kebutuhan, seleksi, penerimaan bantuan sampai pembinaan lanjut
		Pendamping Sosial KUBE	Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur seharusnya terlibat dalam pengedropan bantuannya bukan pada saat bimbingan awal saja
		Aparat Kecamatan	Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Blitar juga tidak pernah melaksanakan evaluasi hanya waktu pengedropan bantuannya saja mendampingi
		Aparat Desa	Evaluasi harus dilakukan oleh pemerintah propinsi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten secara berkesinambungan
11.	Belum adanya kemitraan usaha yang baik antara pemerintah dan masyarakat	Aparat Desa	Untuk lebih memudahkan dalam pengelolaan usahanya pemerintah harus dapat memberdayakan potensi yang ada di daerah
		Karang Taruna	Pemerintah harus melibatkan pengusaha dalam pengelolaan UEPnya
		Keluarga Binaan Sosial	Adanya kerja sama antara pemerintah dengan dunia usaha yang ada di daerah sebagai mitra kerja

No.	Permasalahan	Nama Peserta FGD	Gagasan
			pendamping sosial, dalam pengelolaan usaha KBS
12.	Harapan tentang pengembangan model pendamping sosial KUBE di masa yang akan datang	Pendamping Sosial KUBE	Pelaksanaan pembekalan harus lebih baik, yaitu perpaduan antara pembekalan dalam kelas dan praktek lapangan
		Petugas Kabupaten	Adanya rekrutmen pendamping sosial KUBE yang selektif, sehingga benar-benar dapat melaksanakan peranan dengan baik
		Aparat Kecamatan	Adanya kemitraan usaha antara pemerintah dan masyarakat, dengan melibatkan dunia usaha dalam pelaksanaan pendampingan
		Aparat Desa	Pembekalan pendamping sosial KUBE harus lebih difokuskan pada hal-hal praktis, mudah dipahami dan dilaksanakan di masyarakat
		Keluarga Binaan Sosial	Pendamping sosial harus lebih aktif dan mau menyatu dengan masyarakat

Berdasarkan pada Tabel 5.38 Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) bahwa keberadaan pendamping sosial KUBE sangat diperlukan dan sangat bermanfaat bagi keluarga binaan sosial dalam pengelolaan usahanya. Namun dalam kenyataannya pendamping sosial belum melaksanakan peranannya secara optimal. Untuk itu perlu adanya penyempurnaan dari berbagai pihak yang terkait.

Penunjukan pendamping sosial KUBE yang selama ini diterapkan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur tidak tepat dan perlu diperbaiki dengan rekrutmen calon petugas pendamping sosial KUBE yang selektif sesuai dengan kriteria pendamping sosial KUBE yang telah ditetapkan dalam buku panduan petugas pendamping sosial KUBE yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial R.I. Pembekalan Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur kurang efektif dan efisien baik dilihat dari materi yang diberikan, metode, waktu pembekalan, instruktur maupun sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembekalan tersebut. Hal ini perlu diperbaiki dengan program pembekalan yang lebih efektif dan efisien, yaitu pembekalan dengan praktek magang. Pembekalan dengan menggunakan praktek magang ini yang diharapkan oleh pendamping sosial KUBE. Materi pembekalan lebih ditekankan pada identifikasi masalah dan pemecahan masalah yang dihadapi Keluarga Binaan Sosial (KBS), Motivasi dan kohesivitas kelompok, manajemen (pengelolaan) Usaha Ekonomi Produktif (UEP), supervisi dan pelaporan.

Selama ini yang melaksanakan pendampingan dalam pemberdayaan keluarga miskin adalah pemerintah dan hasilnya kurang optimal. Untuk itu perlu adanya inovasi baru, yaitu melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan keluarga miskin.

Calon Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang akan memperoleh bantuan melalui program pemberdayaan keluarga miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) jangan asal ditunjuk oleh petugas Desa/Kecamatan/Kabupaten. Hal ini harus diperbaiki dengan melalui seleksi

yang dilaksanakan Petugas Kabupaten bekerjasama dengan Aparat Kecamatan dan Aparat Desa.

Bantuan yang diberikan kepada Calon Keluarga Binaan Sosial (KBS) tersebut jangan langsung ditetapkan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, sehingga kurang dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini harus diperbaiki disesuaikan dengan kebutuhan Keluarga Binaan Sosial (KBS).

5.8. Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Dikembangkan

Berdasarkan model pendamping sosial KUBE yang diterapkan selama ini, model pendamping sosial KUBE yang sesuai dengan teori dan petunjuk pelaksanaan, model pendamping sosial KUBE yang diharapkan dan hasil *Focus Group Discussion* (FGD), maka dapat dikembangkan model Pendamping Sosial KUBE yang dapat diterapkan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.39. Model Pendamping Sosial KUBE Yang Dikembangkan, Juli 2006

Aspek	Model Pendamping Sosial KUBE Yang Diharapkan	Model Pendamping Sosial KUBE Menurut Teori dan Juklak	Model Pendamping Sosial KUBE Yang Dikembangkan
Petugas Pendamping Sosial KUBE	Proses rekrutmen calon pendamping sosial KUBE yang selektif	Rekrutmen calon pendamping sosial KUBE harus selektif	Adanya rekrutmen calon pendamping sosial KUBE yang selektif
	Pembekalan dengan menggunakan praktek magang yang efektif dan efisien yang meliputi SDM, materi, metode, alokasi dana, waktu.	Pembekalan pendamping sosial KUBE dalam kelas dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Pembekalan dengan menggunakan praktek magang yang efektif dan efisien yang meliputi SDM, materi, metode, alokasi

Aspek	Model Pendamping Sosial KUBE Yang Diharapkan	Model Pendamping Sosial KUBE Menurut Teori dan Juklak	Model Pendamping Sosial KUBE Yang Dikembangkan
	instruktur, sarana dan prasarana pembekalan yang memadai		dana, waktu, instruktur, sarana dan prasarana pembekalan yang memadai
	Perlu adanya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan keluarga miskin	Kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanganan masalah kemiskinan melalui UEP	Kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan keluarga miskin
Keluarga Binaan Sosial (KBS) melalui pendekatan KUBE dalam pemberdayaan keluarga miskin	Calon KBS yang akan memperoleh bantuan pemberdayaan keluarga miskin melalui pendekatan KUBE harus diseleksi yang dilaksanakan oleh Petugas Kabupaten bekerjasama dengan Aparat Kecamatan dan Aparat Desa	Seleksi Calon Keluarga Binaan Sosial	-
	Bantuan yang akan diberikan kepada calon KBS harus disesuaikan dengan kebutuhan Keluarga Binaan Sosial (KBS)	Identifikasi masalah dan kebutuhan	-

Dari Tabel 5.39 dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini model yang dikembangkan adalah pada aspek Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang meliputi rekrutmen pendamping sosial KUBE yang selektif dan pembekalan dengan menggunakan praktek magang yang efektif dan efisien baik dari SDM, materi, metode, alokasi dana, waktu, instruktur, sarana dan prasarana.

yang dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sesuai untuk pemberdayaan keluarga miskin dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Sedangkan aspek Keluarga Binaan Sosial (KBS) hanya sebagai pemberi masukan (input) dalam mengembangkan Model Pendamping Sosial KUBE.

5.9. Uji Coba Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Dikembangkan

5.9.1. Karakteristik Responden

Jumlah responden dalam uji coba model ini sebanyak 20 orang untuk kelompok yang tidak mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan (yang tidak mendapatkan perlakuan) dan 20 orang untuk kelompok yang mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan (yang mendapatkan perlakuan) adalah pendamping sosial KUBE yang terdapat di Kabupaten Blitar. Seluruh responden yang diteliti sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Untuk lebih menggambarkan karakteristik responden pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.40. Deskripsi Karakteristik Responden Pendamping Sosial KUBE Kelompok Yang Tidak Mendapatkan Perlakuan, Juli 2006

No.	Aspek	Frekuensi	Persentase
1	Pendidikan		
	a. SLTP	2	10
	b. SLTA	18	90
	c. D2	0	0
	d. S1	0	0
	Total	20	100

No.	Aspek	Frekuensi	Persentase
2	Usia		
	a. 20 – 30 tahun	3	15
	b. 31 – 40 tahun	11	55
	c. 41 – 50 tahun	5	25
	d. 51 tahun ke atas	1	5
	Total	20	100
3	Jenis kelamin		
	a. Laki - laki	17	85
	b. Perempuan	3	15
	Total	20	100
4.	Pekerjaan		
	a. PNS	11	55
	b. Swasta	5	25
	c. Wiraswasta	1	5
	d. Petani	3	15
	Total	20	100

Tabel 5.40 menunjukkan bahwa petugas pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dijadikan responden dalam uji coba model yang dikembangkan sesuai harapan dan teori sebanyak 90% berpendidikan SLTA, sisanya berpendidikan SLTP sebanyak 10%.

Dilihat dari faktor usia adalah sebanyak 55% berusia 31 sampai dengan 40 tahun dan yang berusia 41 sampai dengan 51 tahun sebanyak 25%, yang berusia 20 sampai dengan 30 tahun sebanyak 15% dan 5% berusia 51 tahun ke atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin sebagian besar responden adalah laki-laki yaitu 85% dan sisanya 15% berjenis kelamin perempuan. Dan bila dilihat dari jenis pekerjaan sebagian besar responden adalah pegawai negeri sipil sebanyak 55%, swasta sebanyak 25%, petani sebanyak 15% dan wiraswasta sebanyak 5%.

Tabel 5.41. Deskripsi Karakteristik Responden Pendamping Sosial KUBE Kelompok yang Mendapatkan Perlakuan, Juli 2006

No.	Aspek	Frekuensi	Persentase
1	Pendidikan		
	e. SLTP	0	0
	f. SLTA	17	85
	g. D2	1	5
	h. S1	2	10
	Total	20	100
2	Usia		
	e. 20 – 30 tahun	4	20
	f. 31 – 40 tahun	7	35
	g. 41 – 50 tahun	7	35
	h. 51 tahun ke atas	2	10
	Total	20	100
3	Jenis kelamin		
	c. Laki - laki	16	80
	d. Perempuan	4	20
	Total	20	100
4.	Pekerjaan		
	e. PNS	13	65
	f. Swasta	2	10
	g. Wiraswasta	3	15
	h. Petani	2	10
	Total	20	100

Tabel 5.41 menunjukkan bahwa petugas pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dijadikan responden dalam uji coba model yang dikembangkan sesuai harapan dan teori sebanyak 85% berpendidikan SLTA, sisanya berpendidikan D2 dan S1.

Dilihat dari faktor usia adalah sebanyak 35% berusia 31 sampai dengan 40 tahun dan 41 sampai dengan 50 tahun, sedangkan berusia 20 sampai 30 tahun sebanyak 20% dan yang berusia 51 tahun ke atas sebanyak 10%. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin sebagian besar adalah laki-laki yaitu 80% dan sisanya 20% berjenis kelamin perempuan.

Dan bila dilihat dari jenis pekerjaan sebagian besar responden adalah pegawai negeri sipil sebanyak 65%, wiraswasta sebanyak 15%, petani sebanyak 10% dan swasta sebanyak 10%.

5.9.2. Hasil Uji Coba Model Pendamping Sosial KUBE Yang Dikembangkan

Dalam uji coba model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan adalah bertujuan untuk mengetahui apakah model yang sudah dikembangkan dinilai baik atau tidak, maka dilakukan pengukuran *pre test* dan *post test* pada kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*). Kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) mendapatkan dua kali kuesioner sebagai *pre test* dan *post test*. Sedangkan kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) juga mendapatkan dua kali kuesioner yaitu *pre test*, sebelum mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan. Dan *post test* setelah mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan.

Kemudian dari hasil *pre test* dan *post test* tersebut dibagi menjadi 4 aspek yaitu :

1. **Rekrutmen calon pendamping sosial KUBE**, pelaksanaan rekrutmen calon pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
2. **Pentingnya pembekalan bagi pendamping sosial KUBE**, yang terdiri dari indikator pembekalan dapat membantu dalam pelaksanaan pendampingan sosial KUBE, pengaruh pembekalan

- pada keterampilan, pengaruh pembekalan pada pengetahuan, pengaruh pembekalan pada kompetensi, pengaruh pembekalan terhadap kemampuan pendamping sosial dalam memecahkan masalah, kesenjangan program pembekalan dengan kebutuhan pendamping sosial.
3. **Pelaksanaan pembekalan bagi pendamping sosial KUBE**, yang terdiri dari isi program pembekalan dengan kebutuhan pendamping sosial, efisiensi program pembekalan, materi, jangka waktu, instruktur, media, metode, alokasi anggaran, proses pembelajaran, jenis pembekalan lain, perubahan pada pembekalan yang akan datang, evaluasi pembekalan, sikap terhadap pembekalan.
 4. **Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan UEP Keluarga Miskin melalui Pendekatan KUBE**, yang terdiri dari indikator pendamping sosial KUBE dapat membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pokok, pendamping sosial KUBE dapat membantu pengelolaan usaha ekonomi produktif, pendamping sosial KUBE dapat membantu meningkatkan pendapatan, dan kemitraan usaha antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan keluarga miskin.

Masing-masing indikator tersebut dari mulai rekrutmen, proses pembekalan sampai dengan pelaksanaan secara berurutan terdiri dari 1 pertanyaan, 4 pertanyaan, 6 pertanyaan dan 13 pertanyaan. Kemudian dari total skor jawaban responden tersebut dikelompokkan menjadi 2 kategori, kecuali pada aspek rekrutmen yang hanya berisi 1 indikator

yang tidak dikelompokkan. Aturan kategori dari total skor jawaban adalah :

$$\frac{(\text{jumlah indikator} \times \text{kategori jawaban tertinggi}) - (\text{jumlah indikator} \times \text{skor jawaban terendah})}{2}$$

Dari pengelompokan tersebut kemudian diperoleh dua kategori :

- 1 = kurang berhasil
- 2 = berhasil

Uji Coba Model (*Model Testing*) Pendamping Sosial KUBE yang dikembangkan pada kelompok yang tidak mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

a. Aspek Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE

Berikut adalah hasil perbandingan nilai pre test dan post test mengenai rekrutmen calon pendamping sosial KUBE :

Tabel 5.42. Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test Mengenai Perlunya Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE

Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE	Kelompok		Total
	Pre test	Post test	
Sangat tidak perlu	1	4	5
	5%	20%	13%
Tidak perlu	19	16	35
	95%	80%	88%
Total	20	20	40
	100%	100%	100%

Tabel 5.42 menunjukkan pada kelompok pre test, dimana rekrutmen calon pendamping sosial KUBE selama ini sangat tidak perlu sebanyak 1 orang atau 5%, sedangkan yang menyatakan tidak perlu sebanyak 19 orang (95%). Kemudian pada kelompok post test

yang menyatakan sangat tidak perlu sebanyak 4 orang (20%), dan yang menyatakan tidak perlu sebanyak 16 orang (80%).

Hasil pengujian Chi square diperoleh nilai 0,914 dengan tingkat signifikansi Fisher 0,342 (lampiran 6 halaman 188). Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara pre test dan post test tentang rekrutmen calon pendamping sosial KUBE pada kelompok yang tidak mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan.

b. Aspek akan Pentingnya Pembekalan bagi Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Berikut adalah hasil perbandingan nilai pre test dan post test mengenai akan pentingnya pembekalan bagi pendamping sosial KUBE :

Tabel 5.43. Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test Mengenai Pentingnya Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE

Pentingnya akan Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE	Kelompok		Total
	Pre test	Post test	
Kurang berarti	8	13	21
	40.00%	65.00%	52.50%
Berarti	12	7	19
	60.00%	35.00%	47.50%
Total	20	20	40
	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel 5.43 menunjukkan pada kelompok pre test yang menyatakan akan pentingnya pembekalan kurang berarti sebanyak 8 orang atau 40%, sedangkan yang menyatakan berarti sebanyak 12 orang (60%). Kemudian pada kelompok post test yang menyatakan kurang berarti sebanyak 13 orang (65%), dan yang menyatakan berarti sebanyak 7 orang (35%).

Hasil pengujian Chi square diperoleh nilai 1,604 dengan tingkat signifikansi 0,205 (lampiran 6 halaman 189). Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara pre test dan post test mengenai akan pentingnya pembekalan bagi pendamping sosial KUBE pada kelompok yang tidak mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan.

c. Aspek Pelaksanaan Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE

Berikut adalah hasil perbandingan nilai pre test dan post test mengenai pelaksanaan pembekalan bagi pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) :

Tabel 5.44. Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test Mengenai Pelaksanaan Pembekalan bagi Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Pelaksanaan Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE	Kelompok		Total
	Pre test	Post test	
Kurang berhasil	7	10	17
	35.00%	50.00%	42.50%
Berhasil	13	10	23
	65.00%	50.00%	57.50%
Total	20	20	40
	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel 5.44 menunjukkan pada kelompok pre test yang menyatakan pelaksanaan pembekalan pendamping sosial KUBE selama ini kurang berhasil sebanyak 7 orang atau 35%, sedangkan yang menyatakan berhasil sebanyak 13 orang (65%). Kemudian pada kelompok post test yang menyatakan kurang berhasil sebanyak 10 orang (50%), dan yang menyatakan berhasil sebanyak 10 orang (50%).

Hasil pengujian Chi square diperoleh nilai 0,409 dengan tingkat signifikansi 0,522 (lampiran 6 halaman 190). Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara pre test dan post test tentang pelaksanaan pembekalan pendamping sosial KUBE pada kelompok yang tidak mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan.

d. Aspek Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan UEP Keluarga Miskin melalui Pendekatan KUBE

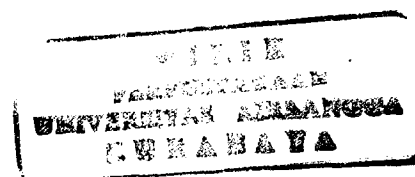
Berikut adalah hasil perbandingan nilai pre test dan post test mengenai pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) keluarga miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) :

Tabel 5.45. Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test Mengenai Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan UEP Keluarga Miskin melalui Pendekatan KUBE

Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan UEP Keluarga Miskin melalui Pendekatan KUBE	Kelompok		Total
	Pre test	Post test	
Kurang berhasil	9	9	18
	45.00%	45.00%	45.00%
Berhasil	11	11	22
	55.00%	55.00%	55.00%
Total	20	20	40
	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel 5.45 menunjukkan pada kelompok pre test yang menyatakan pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin melalui pendekatan KUBE kurang berhasil sebanyak 9 orang atau 45%, sedangkan yang menyatakan berhasil sebanyak 11 orang (55%). Kemudian pada kelompok post test yang menyatakan kurang berhasil sebanyak 9 orang (45%), dan yang menyatakan berhasil sebanyak 11 orang (55%).

Hasil pengujian Chi square diperoleh nilai 0,000 dengan tingkat signifikansi 1,000 (lampiran 6 halaman 191). Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara pre test dan post test tentang pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan UEP keluarga miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada kelompok kontrol yang tidak mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan.



Uji Coba Model Pendamping Sosial KUBE yang dikembangkan pada kelompok yang mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

a. Aspek Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE

Berikut adalah hasil perbandingan nilai pre test dan post test mengenai rekrutmen calon pendamping sosial KUBE :

Tabel 5.46. Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test Mengenai Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE

Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE	Kelompok		Total
	Pre test	Post test	
Tidak perlu	20	2	22
	100%	10%	55%
Perlu	0	18	18
	0%	90%	45%
Total	20	20	40
	100%	100%	100%

Tabel 5.46 menunjukkan pada kelompok pre test yang menyatakan bahwa rekrutmen calon pendamping sosial KUBE selama ini sangat tidak perlu sebanyak 20 orang atau 100%, sedangkan yang menyatakan perlu tidak ada (0%). Kemudian pada kelompok post test yang menyatakan tidak perlu sebanyak 2 orang (10%), kemudian yang menyatakan perlu sebanyak 18 orang (90%).

Hasil pengujian Chi square diperoleh nilai 29,192 dengan tingkat signifikansi 0,000 (lampiran 6 halaman 192). Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan antara pre test dan post test tentang rekrutmen calon pendamping sosial KUBE pada kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) sebelum

dan setelah mendapatkan pembekalan dari model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan.

b. Aspek akan Pentingnya Pembekalan bagi Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Berikut adalah hasil perbandingan nilai pre test dan post test mengenai akan pentingnya pembekalan bagi pendamping sosial KUBE :

Tabel 5.47. Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test Mengenai akan Pentingnya Pembekalan bagi Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Pentingnya akan Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE	Kelompok		Total
	Pre test	Post test	
Kurang berarti	12	0	12
	60.00%	0.00%	30.00%
Berarti	8	20	28
	40.00%	100.00%	70.00%
Total	20	20	40
	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel 5.47 menunjukkan pada kelompok pre test yang menyatakan akan pentingnya pembekalan bagi pendamping sosial KUBE kurang berarti sebanyak 12 orang atau 60%, sedangkan yang menyatakan berarti sebanyak 8 orang (40%). Kemudian pada kelompok post test yang menyatakan kurang berarti tidak ada (0%) , dan yang menyatakan berarti sebanyak 20 orang (100%).

Hasil pengujian Chi square diperoleh nilai 14,405 dengan tingkat signifikansi 0,000 (lampiran 6 halaman 193). Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 maka ada perbedaan antara pre

test dan post test tentang akan pentingnya pembekalan bagi pendamping sosial KUBE pada kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) sebelum dan setelah mendapatkan pembekalan dari model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan.

c. Aspek Pelaksanaan Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE

Berikut adalah hasil perbandingan nilai pre test dan post test mengenai pelaksanaan pembekalan bagi pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) :

Tabel 5.48. Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test Mengenai Pelaksanaan Pembekalan bagi Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Pelaksanaan Pembekalan Pendamping Sosial KUBE	Kelompok		Total
	Pre test	Post test	
Kurang berhasil	7	0	7
	35.00%	0.00%	17.50%
Berhasil	13	20	33
	65.00%	100.00%	82.50%
Total	20	20	40
	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel 5.48 menunjukkan pada kelompok pre test yang menyatakan pelaksanaan pembekalan bagi pendamping sosial KUBE selama ini kurang berhasil sebanyak 7 orang atau 35%, sedangkan yang menyatakan berhasil sebanyak 13 orang (65%). Kemudian pada kelompok post test yang menyatakan kurang berhasil tidak ada (0%), dan yang menyatakan berhasil sebanyak 20 orang (100%).

Hasil pengujian Chi square diperoleh nilai 6,234 dengan tingkat signifikansi 0,008 (lampiran 6 halaman 194). Karena nilai

signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan antara pre test dan post test tentang pelaksanaan pembekalan bagi pendamping sosial KUBE pada kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) sebelum dan setelah mendapatkan pembekalan dari model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan.

d. Aspek Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan UEP Keluarga Miskin melalui Pendekatan KUBE

Berikut adalah hasil perbandingan nilai pre test dan post test mengenai pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) keluarga miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) :

Tabel 5.49. Perbandingan Nilai Pre Test dan Post test Mengenai Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan UEP Keluarga Miskin melalui Pendekatan KUBE

Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan UEP Keluarga Miskin melalui Pendekatan KUBE	Kelompok		Total
	Pre test	Post test	
Kurang berhasil	13	0	13
	65.00%	0.00%	32.50%
Berhasil	7	20	27
	35.00%	100.00%	67.50%
Total	20	20	40
	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel 5.49 menunjukkan pada kelompok pre test yang menyatakan pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) keluarga miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kurang berhasil sebanyak

13 orang (65%), sedangkan yang menyatakan berhasil sebanyak 7 orang (35%). Kemudian pada kelompok post test yang menyatakan kurang berhasil tidak ada (0%), dan yang menyatakan berhasil sebanyak 20 orang (55%).

Hasil pengujian Chi square diperoleh nilai 16,401 dengan tingkat signifikansi 0,000 (lampiran 6 halaman 195). Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan antara pre test dan post test tentang pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) keluarga miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) sebelum dan setelah mendapatkan pembekalan dari model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan.

5.9.3. Analisis X^2 Untuk Perbandingan Dua Kelompok (Kelompok Yang Mendapatkan Perlakuan dan Kelompok Yang Tidak Mendapatkan Perlakuan)

a. Aspek Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE

Berikut adalah hasil perbandingan nilai antara kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) tentang rekrutmen calon pendamping sosial KUBE.

Tabel 5.50. Perbandingan Nilai Kelompok yang Mendapatkan Perlakuan dan Kelompok yang Tidak Mendapatkan Perlakuan Mengenai Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE

Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE	Kelompok		Total
	Mendapatkan Perlakuan	Tidak Mendapatkan Perlakuan	
Tidak perlu	2	20	22
	10.00%	100.00%	55.00%
Perlu	18	0	18
	90.00%	0.00%	45.00%
Total	20	20	40
	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel 5.50 menunjukkan pada kelompok yang mendapatkan perlakuan menyatakan rekrutmen calon pendamping sosial KUBE selama ini tidak perlu sebanyak 2 orang atau 10%, sedangkan yang menyatakan perlu sebanyak 18 (90%). Kemudian pada kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan menyatakan tidak perlu sebanyak 20 orang (100%), dan yang menyatakan perlu tidak ada (0%).

Hasil pengujian Chi square diperoleh nilai 29,192 dengan tingkat signifikansi 0,000 (lampiran 6 halaman 196). Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan antara kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) tentang rekrutmen calon pendamping sosial KUBE.

b. Aspek akan Pentingnya Pembekalan bagi Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Berikut adalah hasil perbandingan nilai antara kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) akan pentingnya pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE.

Tabel 5.51 Perbandingan Nilai Kelompok yang Mendapatkan Perlakuan dan Kelompok yang Tidak Mendapatkan Perlakuan akan Pentingnya Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE

Pentingnya akan Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE	Kelompok		Total
	Mendapatkan perlakuan	Tidak Mendapatkan Perlakuan	
Kurang berarti	0	13	13
	0.00%	65.00%	32.50%
Berarti	20	7	27
	100.00%	35.00%	67.50%
Total	20	20	40
	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel 5.51 menunjukkan pada kelompok yang mendapatkan perlakuan menyatakan akan pentingnya pembekalan bagi pendamping sosial KUBE kurang berarti tidak ada atau 0%, sedangkan yang menyatakan berarti sebanyak 20 (100%). Kemudian pada kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan menyatakan kurang berarti sebanyak 13 orang (65%), dan yang menyatakan berarti sebanyak 7 orang (35%).

Hasil pengujian Chi square diperoleh nilai 16,410 dengan tingkat signifikansi 0,000 (lampiran 6 halaman 197). Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan antara

kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) tentang akan pentingnya pembekalan bagi pendamping sosial KUBE.

c. Aspek Pelaksanaan Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE

Berikut adalah hasil perbandingan nilai antara kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) tentang pelaksanaan pembekalan bagi pendamping sosial KUBE.

Tabel 5.52. Perbandingan Nilai Kelompok yang Mendapatkan Perlakuan dan Kelompok yang Tidak Mendapatkan Perlakuan Mengenai Pelaksanaan Pembekalan Bagi Pendamping Sosial KUBE

Pelaksanaan Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE	Kelompok		Total
	Mendapatkan Perlakuan	Tidak Mendapatkan Perlakuan	
Kurang berhasil	0	10	10
	0.00%	50.00%	25.00%
Berhasil	20	10	30
	100.00%	50.00%	75.00%
Total	20	20	40
	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel 5.52 menunjukkan pada kelompok yang mendapatkan perlakuan menyatakan bahwa pembekalan pendamping sosial KUBE selama ini kurang berhasil tidak ada atau 0%, sedangkan yang menyatakan berhasil sebanyak 20 orang (100%). Kemudian pada kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan menyatakan kurang berhasil sebanyak 10 orang (50%), dan yang menyatakan berhasil sebanyak 10 orang (50%).

Hasil pengujian Chi square diperoleh nilai 10,800 dengan tingkat signifikansi 0,000 (lampiran 6 halaman 198). Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan antara kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) tentang pelaksanaan pembekalan bagi pendamping sosial KUBE.

d. Aspek Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan UEP Keluarga Miskin melalui Pendekatan KUBE

Berikut adalah hasil perbandingan nilai antara kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) tentang pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan UEP keluarga miskin melalui pendekatan KUBE.

Tabel 5.53. Perbandingan Nilai Kelompok yang Mendapatkan Perlakuan dan Kelompok yang Tidak Mendapatkan Perlakuan Mengenai Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan UEP Keluarga Miskin melalui Pendekatan KUBE

Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan UEP Keluarga Miskin melalui Pendekatan KUBE	Kelompok		Total
	Mendapatkan Perlakuan	Tidak Mendapatkan Perlakuan	
Kurang berhasil	0	9	9
	0.00%	45.00%	22.50%
Berhasil	20	11	31
	100.00%	55.00%	77.50%
Total	20	20	40
	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel 5.53 menunjukkan pada kelompok yang mendapatkan perlakuan menyatakan pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan UEP keluarga miskin melalui pendekatan KUBE kurang berhasil tidak ada atau 0%, sedangkan yang menyatakan berhasil sebanyak 20 orang (100%). Kemudian pada kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan menyatakan kurang berhasil sebanyak 9 orang (45%), dan yang menyatakan berhasil sebanyak 11 orang (55%).

Hasil pengujian Chi square diperoleh nilai 9,176 dengan tingkat signifikansi 0,001 (lampiran 6 halaman 199). Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan antara kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) tentang pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan UEP keluarga miskin melalui pendekatan KUBE.

BAB 6

PEMBAHASAN

Bab Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara praktis dan teoritis Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Secara praktis adalah mengkaji Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diterapkan selama ini dan Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diharapkan responden. Sebagian besar responden menyatakan harapannya untuk diadakan perubahan dalam rekrutmen dan pembekalan Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), karena pendamping sosial yang ada selama ini kurang optimal dalam melaksanakan peranannya sebagai Pendamping Sosial KUBE yang profesional. Secara teoritis adalah menganalisis apakah ada teori yang mendukungnya. Kemudian dilakukan telaah kritis terhadap teori yang ada dan digabungkan dengan harapan responden, sehingga menjadi dasar bagi Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang akan dikembangkan. Selanjutnya dilakukan Uji Coba (*Testing*) Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), untuk mengkaji apakah model yang dikembangkan tersebut dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.

6.1. Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Diterapkan Selama Ini

Pelaksanaan pendampingan sosial KUBE yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur selama ini menunjukkan hasil yang kurang optimal, karena pendamping sosial KUBE yang ada selama ini tidak didasari oleh

rekrutmen (seleksi) calon pendamping sosial melainkan hanya melalui penunjukan dari aparat desa dan kecamatan serta pelaksanaan pembekalan monoton di dalam kelas. Tingkat pendidikan pendamping sosial KUBE masih ada yang berpendidikan SLTP, sehingga kurang memahami dan menghayati materi pembekalan yang diikutinya. Materi pembekalan pendamping sosial KUBE masih terlalu universal dan teoritis, sehingga kurang dapat diaplikasikan di masyarakat (lapangan) dan tidak sesuai dengan kebutuhan pendamping sosial dan Keluarga Binaan Sosial (KBS). Meskipun sudah mengikuti pembekalan, pendamping sosial KUBE tidak mempunyai keterampilan khusus dalam membantu pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Keluarga Binaan Sosial (KBS) dan memecahkan permasalahan yang dihadapi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), sehingga tidak dapat berkompetensi dalam pekerjaannya. Namun pendamping sosial KUBE tetap respek terhadap pembekalan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.

Metode dan jangka waktu pembekalan yang diselenggarakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur juga kurang optimal, karena proses pembelajarannya hanya dilaksanakan dalam kelas selama 2 hari dengan jadwal kegiatan kurang padat, sehingga banyak waktu yang terbuang. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya dan kurangnya kesiapan panitia pembekalan dalam menyusun jadwal dan materi pembekalan. Instuktur pembekalan masih melibatkan unsur staf Dinas Sosial Propinsi, sedangkan peserta pembekalan adalah eselon IV di Kabupaten dan Kecamatan. Padahal pejabat eselon III dan IV di Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur banyak yang mampu dan bersedia untuk memberikan materi di pembekalan pendamping sosial KUBE tersebut. Instruktur pembekalan belum

menggunakan media peralatan (alat visual) yang modern, sehingga pemberian materi masih monoton dengan sistem ceramah saja.

Program pembekalan pendamping sosial KUBE yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur belum sesuai dengan kebutuhan dan harapan pendamping sosial KUBE. Dimana materi pembekalan masih bersifat umum dan teoritis serta baru pengenalan program saja, sedangkan materi untuk pelaksanaan di lapangan tidak diberikan, sehingga para pendamping sosial KUBE kesulitan dalam membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi Keluarga Binaan Sosial (KBS) dan dalam pengelolaan usahanya. Panitia tidak mengkaji siapa yang mengikuti pembekalan tersebut, sehingga kesannya asal kegiatan pembekalan bagi pendamping sosial KUBE tersebut terlaksana, dengan kata lain asal memenuhi realisasi fisik dan keuangan proyek saja, tetapi out put dan out come dari melaksanakan pendampingan tidak dikaji. Dan pembekalan yang diperoleh tidak dapat digunakan para pendamping sosial KUBE di lapangan, karena materinya terlalu teoritis dan terlalu tinggi untuk dipahami oleh para pendamping sosial KUBE, karena pendidikan pendamping sosial sebagian besar adalah tamatan SLTA. Untuk itu, perlu adanya metode pembekalan dengan cara yang lebih praktis dan mudah dipraktekkan oleh pendamping sosial di lapangan dan perlu adanya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pembekalan dan pendampingan bagi pendamping sosial KUBE.

Selama ini baik Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur maupun Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Blitar belum melaksanakan evaluasi yang berkelanjutan baik terhadap pendamping sosial dalam melaksanakan peranannya maupun terhadap keluarga binaan sosial. Padahal evaluasi merupakan kegiatan

penting dan penentu untuk kesempurnaan program di masa-masa yang akan datang.

6.2. Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Diharapkan

Berdasarkan model pendamping sosial KUBE yang telah diterapkan selama ini, maka para pendamping sosial berharap adanya perubahan-perubahan ke arah penyempurnaan program pemberdayaan keluarga miskin melalui proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sosial KUBE. Harapan pendamping sosial KUBE ini dapat dijadikan sebagai standar atau acuan dalam mengembangkan model pendamping sosial KUBE yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan harapan pendamping sosial itu sendiri.

Pada kenyataannya banyak aspek yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dari model pendamping sosial KUBE, terutama yang berkaitan dengan :

1. Rekrutmen calon pendamping sosial KUBE.

Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur harus menentukan kriteria calon pendamping sosial KUBE yang memenuhi syarat dan layak untuk menjadi petugas pendamping sosial KUBE, baik dari sisi pendidikan, pengetahuan maupun pengalaman, sehingga dapat melaksanakan peranan dalam pemberdayaan keluarga miskin melalui pendekatan kelompok usaha bersama.

2. Pembekalan pendamping sosial KUBE yang profesional dengan menggunakan praktek magang.

Pelaksanaan pembekalan tidak hanya dilaksanakan dalam kelas saja melainkan juga harus ke lapangan, sehingga akan tahu perbedaan-perbedaan

dan kesamaan-kesamaan antara teori dan kenyataan, teori mana yang dapat dipraktikkan dan teori mana yang tidak dapat dipraktikkan atau mana yang belum ada dalam teori, sehingga akan memudahkan pendamping sosial KUBE untuk memahami dan menghayati tugas-tugasnya sebagai pendamping.

3. Seleksi Calon Keluarga Binaan Sosial yang tepat sasaran.

Untuk menyeleksi calon keluarga binaan sosial harus ditentukan kriterianya secara jelas sesuai dengan indikator keluarga fakir miskin yang dimiliki oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, dan tanpa adanya unsur KKN. Karena selama ini bantuan yang diberikan kepada masyarakat mengutamakan hubungan kedekatan dengan unsur aparat setempat, sehingga bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran.

4. Penentuan Jenis bantuan dilakukan secara berdiskusi antara pendamping sosial KUBE, Aparat Desa, Aparat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi, sehingga bantuan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh keluarga binaan sosial dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

5. Pelaksanaan evaluasi yang berkesinambungan baik dari Pemerintah Propinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sosial KUBE dan seberapa jauh intervensi pemerintah kabupaten dan jajarannya atas keberhasilan pelaksanaan program pendampingan, apakah KBS sudah mengalami peningkatan baik dari segi pemenuhan kebutuhan, mampu memecahkan masalah, pendapatan dan kesejahteraannya.

6.3. Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berdasarkan Teori dan Petunjuk Pelaksanaan

Gerakan pemberdayaan berangkat dari kondisi ketidakberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya dibutuhkan pendamping yang berasal dari "luar" masyarakat ataupun pendamping yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pemikiran Priyono dan Pranarka (1996:125) sebagai berikut :

Kelompok masyarakat miskin adalah mereka yang tidak berdaya dan seringkali tidak dapat berbuat apa-apa (*powerless*) dan tidak memiliki posisi tawar menawar, sehingga membutuhkan pendampingan dari kelompok atau orang lain.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-baarang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan

sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemberdayaan juga diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat, sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Kehidupan masyarakat perlu dikondisikan sebagai sebuah wadah, dimana setiap anggotanya melalui aktivitas sehari-hari saling belajar mengajar. Dengan demikian diharapkan akan terjadi proses interaksi dalam wujud dialog dan komunikasi informasi antara sesama anggota masyarakat yang saling mendorong guna mencapai pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Pendamping sosial KUBE harus mengetahui dan mengerti metode-metode praktek pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam peningkatan atau memperbaiki kapasitas mereka, agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai suatu aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh tiga komponen dasar yang secara integratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial, yaitu kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skill*) dan kerangka nilai (*body of values*).

Pegetahuan, keahlian dan nilai-nilai dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pada hakikatnya pendidikan berfungsi

untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia baik individu maupun sosial. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharto (2005:59-60) bahwa :

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kapasitas pendamping sosial KUBE dan merupakan penyampaian/transmansi sejumlah pengetahuan dan keterampilan kepada individu petugas pemerintah atau anggota masyarakat, agar mereka mempunyai pengetahuan, kemampuan, keahlian dan memiliki sikap mental serta dapat melaksanakan perannya sebagai pendamping sosial.

Pendidikan dan latihan ini ditujukan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, nilai dan keterampilan pesertanya dalam penanggulangan kemiskinan dan harus dapat memanfaatkan program diklat tersebut sebaik-baiknya, sehingga meningkatkan kapasitas sebagai pendamping sosial yang efektif. Oleh sebab itu, jika ada program yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pendamping sosial KUBE keluarga miskin, maka pendidikan dan latihan dapat dijadikan wahana dan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pelatihan/pembekalan yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial R.I., bahwa pelaksanaan pembekalan untuk pendamping sosial KUBE adalah selama 5 hari dengan menggunakan praktek lapangan dan tempat penyelenggaraan pelatihan/pembekalan dilaksanakan di tempat yang representatif sesuai dengan kondisi/kemampuan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Propinsi masing-masing, termasuk Propinsi Jawa Timur.

Materi pembekalan tenaga pendamping sosial KUBE meliputi materi dasar, materi inti dan materi keterampilan teknis sebagai berikut :

1. Materi Pengenalan Program Pendampingan Sosial (Materi Dasar), meliputi :
 - a. Dinamika kelompok dan pembukaan diri.

- b. Program pemberdayaan masyarakat dan program pendampingan .
 - c. Pengembangan program.
2. Materi Inti Program Pendampingan Sosial, meliputi :
- a. Penanganan Kemiskinan.
 - b. Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin.
 - c. Langkah-langkah pelaksanaan
 - Tahap Pembentukan KBS
 - Tahap Pembentukan Usaha Kelompok
 - Tahap Pembentukan Usaha Koperasi
 - Evaluasi keseluruhan program yang meliputi pengertian petugas pendamping sosial, bagaimana menjadi petugas pendamping sosial yang baik sesuai tugas dan fungsi serta peranan petugas pendamping sosial
 - d. Kepemimpinan.
 - e. Komunikasi Sosial.
 - f. Teknik-teknik perencanaan, pencatatan dan pelaporan dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif.
 - g. Teknologi Tepat Guna (TTG) dikaitkan dengan pengelolaan usaha ekonomi produktif.
 - h. Mobilitas sumber-sumber/potensi dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif dan pemasarannya.
3. Materi Keterampilan Teknis Pendampingan Sosial, meliputi :
- a. Teknik menggerakkan masyarakat.
 - b. Pengenalan potensi sumber daya, permasalahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
 - c. Manajemen usaha kecil.

- d. Penyusunan kelayakan usaha.
- e. Manajemen akutansi dan pembiayaan.
- f. Teknik pemasaran hasil.
- g. Evaluasi.

Metode yang digunakan dalam pembekalan tenaga pendamping sosial KUBE adalah :

1. Learning by doing.

Metode ini memberikan peluang dengan menyediakan waktu yang memadai bagi peserta untuk "belajar seraya mengerjakan" baik kerja individu maupun kerja dalam kelompok. *Learning by doing* ini juga memungkinkan peserta dapat mengembangkan pemilikan yang praktis dan realistis sesuai dengan kondisi obyektif (kondisi keluarga fakir miskin dan kondisi lingkungan).

2. Diskusi.

Metode ini memungkinkan peserta saling menukar pengalaman dan pengetahuan dalam rangka memahami materi yang disampaikan fasilitator. Diskusi juga dapat difungsikan sebagai sarana dialog antara peserta dengan fasilitator yang diharapkan dapat melahirkan gagasan-gagasan yang motivatif dapat diimplementasikan dalam kerja nyata.

3. Curah pendapat.

Merupakan pengungkapan pemikiran untuk memberikan tanggapan, pandangan secara bebas, teratur dan terarah serta bertanggungjawab atas materi yang disajikan fasilitator untuk mencari kebenaran materi yang disampaikan. Curah pendapat hendaknya disampaikan secara jelas dan sopan.

4. Praktek Magang.

Sebagai suatu teknik pembelajaran dan merupakan media yang tepat untuk memberikan pengalaman kepada peserta pelatihan/pembekalan.

Instruktur sebagai pelaksana pelatihan/pembekalan merupakan faktor kunci dalam proses pembelajaran. Dengan demikian sikap dan praktek instruktur yang perlu diterapkan dalam proses pembelajaran adalah memiliki semangat melayani, profesional, ilmuwan, saling belajar dan mengajar, bersikap terbuka, memiliki pemikiran yang kritis, reflektif, imajinatif dan kolaboratif, dapat berdialog dua arah dan dapat berinteraksi.

Pendamping harus berfungsi sebagai pihak yang selalu siap sedia bila dibutuhkan. Pendamping harus siap bekerja purna waktu, menghadiri pertemuan kelompok, mengorganisasikan program latihan serta membantu kelompok memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Demi kelancaran proses dialog, pendamping idealnya dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan aktivitas kelompok yang didampinginya. Kalau dia belum mampu, pendamping dapat berinisiatif mengundang pihak dan instansi lain untuk membantu kelancaran aktivitas kelompok.

Pendamping sosial adalah orang yang mempunyai kedudukan dan tugas khusus mendampingi dan membantu KUBE keluarga miskin melaksanakan berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi, sosial maupun kelembagaan. Asumsi yang digunakan adalah pendamping sosial mampu mempercepat KUBE keluarga miskin mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya. Jadi, KUBE yang mempunyai pendamping sosial seharusnya lebih efektif dalam mencapai tujuan daripada tanpa pendamping sosial. Untuk itu

tidak sembarang orang mampu menjadi pendamping sosial dan calon pendamping sosial harus memenuhi kriteria-kriteria khusus sebagai berikut :

1. Jenjang pendidikan minimal SMU/ yang sederajat.
2. Mempunyai pengalaman yang memadai di bidang manajemen pengelolaan usaha ekonomi produktif.
3. Mempunyai kemampuan memfasilitasi perubahan dan pengembangan kelompok.
4. Prioritas diberikan kepada yang sudah berpengalaman.
5. Diutamakan usia antara 20 – 50 tahun atau dianggap mempunyai komitmen yang tinggi pada pemahaman kebutuhan masyarakat dan bersedia ditempatkan di lokasi kegiatan.
6. Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk membantu keluarga miskin.
7. Bersedia dan sanggup memenuhi peraturan dan tata laksana kegiatan pemberdayaan masyarakat.
8. Diprioritaskan berdomisili di Kabupaten/Kota tempat lokasi.

Seleksi calon pendamping sosial KUBE merupakan suatu rangkaian kegiatan memilih, mencatat dan mengumpulkan data-data petugas supra struktur dan petugas infra struktur (pemuka masyarakat, Orsos/LSM) yang dianggap mampu dalam melaksanakan pendampingan keluarga fakir miskin. Tujuan seleksi pendamping sosial KUBE adalah untuk memperoleh petugas pendamping sosial yang dianggap mampu melaksanakan pendampingan, yang memiliki jiwa pengabdian berbuat untuk orang lain serta memiliki dedikasi. Seleksi calon pendamping sosial ini dilaksanakan dengan mengisi kuesioner (daftar pertanyaan) dan wawancara langsung dengan calon pendamping sosial

KUBE. Pelaksana seleksi adalah Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten dan Instansi terkait.

6.4. Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Dikembangkan

Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dikembangkan merupakan perpaduan antara Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berdasarkan teori dengan Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diharapkan responden. Model pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang akan dikembangkan dalam penelitian ini menyangkut aspek petugas pendamping sosial KUBE, yang meliputi :

1. Adanya rekrutmen calon pendamping sosial KUBE yang selektif dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, yaitu :
 - a. Jenjang pendidikan minimal SLTA/yang sederajat.
 - b. Diutamakan usia antara 20 – 50 tahun dan mempunyai komitmen yang tinggi pada pemahaman kebutuhan masyarakat dan bersedia ditempatkan di lokasi kegiatan.
 - c. Mempunyai kemampuan memfasilitasi perubahan dan pengembangan kelompok.
 - d. Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk membantu keluarga miskin.
 - e. Bersedia dan sanggup memenuhi peraturan dan tata laksana kegiatan pemberdayaan masyarakat.

f. Diprioritaskan berdomisili di Kabupaten/Kota tempat lokasi.

Seleksi calon pendamping sosial ini dilaksanakan dengan mengisi kuesioner (daftar pertanyaan) dan wawancara langsung dengan calon pendamping sosial KUBE. Adapun materi seleksi calon pendamping sosial KUBE antara lain adalah :

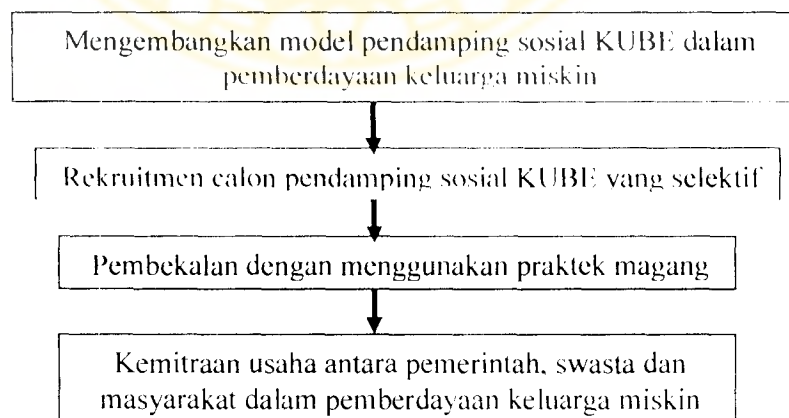
- a. Identifikasi calon pendamping sosial KUBE.
 - b. Pekerjaan calon pendamping sosial KUBE.
 - c. Latar belakang calon pendamping sosial KUBE :
 - Pendidikan
 - Pengalaman dalam bidang/pekerjaan
 - Keahlian/keterampilan yang dimiliki
 - d. Tempat tinggal.
 - e. Tanggapan calon pendamping sosial KUBE atas tugas yang akan diberikan sebagai pendamping sosial KUBE.
2. Pelatihan/Pembekalan bagi pendamping sosial KUBE dengan menggunakan praktek magang yang efektif dan efisien yang meliputi :
- a. Materi, berdasarkan kajian teori, pembekalan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur selama ini dan hasil *Focus Group Discussion* (FGD), maka ada beberapa materi yang perlu ditambahkan dalam pelaksanaan pembekalan nantinya antara lain :
 - 1). Seleksi Calon Keluarga Binaan Sosial (KBS).
 - 2). Identifikasi Masalah dan Pemecahan Masalah.
 - 3). Motivasi dan Kohesivitas Kelompok.

- 4). Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 - 5). Supervisi.
- b. Metode
- Metode pembekalan yang digunakan adalah pembekalan di dalam kelas dan pembekalan di lapangan dengan praktek magang. Adapun pembekalan di dalam kelas dengan menggunakan metode :
- 1). Learning by doing.
 - 2). Ceramah.
 - 2). Diskusi.
 - 3). Curah pendapat.
- c. Waktu
- Waktu pelaksanaan pembekalan pendamping sosial KUBE adalah 4 hari pembekalan di dalam kelas dan 8 hari praktek magang di lapangan/lokasi.
- d. Instruktur pada pembekalan pendamping sosial KUBE juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Pendidikan minimal S1.
 - Ahli di bidangnya atau merupakan tenaga profesional.
 - Seorang instruktur harus menguasai materi atau pengetahuan yang akan diberikan kepada peserta pembekalan.
 - Mempunyai kemampuan dan keahlian dalam proses belajar mengajar yang baik dan atraktif untuk menggiring peserta pembekalan merasa nyaman mengikuti materi pembekalan, sehingga materi yang diperoleh dengan mudah dapat dicerna dan dipahami.

- e. Sarana dan prasarana pembekalan yang memadai.
- Tempat pelatihan memenuhi syarat, sehingga peserta pembekalan merasa nyaman dan tenang mengikuti acara pembekalan tersebut
 - Peralatan untuk mendukung acara pembekalan harus disiapkan panitia lebih awal dan diperiksa untuk kelancaran dan kesuksesan pembekalan tersebut, seperti sounsystem, mic, OHP, layar proyektor, papan tulis, spidol/whiteboard, slide/film dan gambar/foto yang dapat dijadikan alur cerita.
 - Perlengkapan (peralatan/ATK) untuk peserta pembekalan.
3. Adanya kemitraan usaha antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan keluarga miskin.

Pemerintah harus berani melakukan perubahan dengan membuat inovasi, yaitu melibatkan peran swasta atau dunia usaha dalam proses pendampingan untuk pemberdayaan keluarga miskin, yaitu dunia usaha baik pemerintah maupun swasta yang peduli pada pemberdayaan keluarga miskin dan Orsos/LSM yang berada di lokasi kegiatan.

Dengan demikian model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 6.1
Model Pendamping Sosial KUBE yang dikembangkan

6.5. Uji Coba Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Dikembangkan

Uji Coba Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dikembangkan ini dilakukan kepada pendamping sosial KUBE yang telah mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan melalui pembekalan dengan menggunakan praktek magang yang disebut kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan sebagai pembandingan adalah pendamping sosial KUBE yang tidak mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan tersebut, disebut sebagai kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*). Penelitian ini diuji secara kualitatif dengan menggunakan uji statistik Chi Square, karena penelitian ini untuk mendeskripsikan kondisi berhasil atau tidaknya model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan hasil yang berbeda antara pendamping sosial KUBE yang telah mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan dengan pendamping sosial KUBE yang tidak mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan, baik dilihat dari aspek rekrutmen calon pendamping sosial KUBE, pelaksanaan pembekalan bagi pendamping sosial KUBE dan pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin melalui pendekatan kelompok usaha bersama, yaitu :

1. Rekrutmen calon pendamping sosial yang selektif dapat berjalan dengan baik dan mendapat tanggapan yang baik juga dari responden, bila dibandingkan dengan cara penunjukan oleh petugas desa/kecamatan/kabupaten. Responden yang sudah mempunyai kepedulian

terhadap penanganan masalah kemiskinan lebih termotivasi untuk menjadi pendamping sosial KUBE yang profesional.

2. Pembekalan pendamping sosial KUBE dengan menggunakan praktek magang. Selain pembekalan di dalam kelas, peserta pembekalan setelah selesai mengikuti pembekalan di dalam kelas harus melaksanakan praktek magang/lapangan pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berhasil/berjalan, yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sido Makmur di Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Maju Makmur. Para peserta pembekalan sangat merespon dan antusias terhadap kegiatan ini, karena dapat melihat dengan langsung kiat-kiat keberhasilan KUBE tersebut dan dapat dijadikan contoh bagi mereka dalam melaksanakan pendampingan di desanya masing-masing. Metode pembekalan ini berbeda dengan metode yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur selama ini.
3. Kemitraan usaha antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum dapat dilaksanakan, hanya sebatas wacana saja, karena kegiatan ini memerlukan suatu proses, waktu yang lebih lama serta perlu adanya sinergi dan MOU dari ketiga unsur untuk bekerjasama melaksanakan kegiatan pendampingan dalam pemberdayaan keluarga miskin. Namun pada prinsipnya seluruh responden menghendaki kemitraan usaha ini nantinya dapat dijadikan kajian dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.

BAB 7

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.1.1. Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Diharapkan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diharapkan responden adalah sebagai berikut :

1. Sistem penunjukan pendamping sosial KUBE oleh petugas desa/kecamatan/kabupaten sebaiknya dilakukan perbaikan, karena pendamping sosial KUBE tidak dapat melaksanakan peranannya secara optimal. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan dan pengetahuan tentang penanganan masalah kemiskinan masih sangat awam. Dengan diberlakukannya otonomi daerah membawa dampak pada pelaksanaan pendampingan dalam pemberdayaan keluarga miskin, karena nomenklatur Dinas Sosial di Kabupaten/Kota berbeda-beda bahkan ada Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai Dinas Sosial. Begitu juga dengan sumber daya manusia yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota ditata ulang dan dimutasi, sehingga sumber daya manusia yang ditempatkan pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota tidak mempunyai latar belakang pekerjaan sosial dan tidak mengerti tentang penanganan masalah kemiskinan dan pelaksanaan pendampingan kurang tepat sasaran.

2. Pembekalan pendamping sosial KUBE yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur selama ini kurang efektif, karena pembekalan hanya dilaksanakan di dalam kelas tanpa diberikan gambaran atau kisah nyata tentang peranan pendamping sosial KUBE dan pemberdayaan keluarga miskin di lapangan, termasuk materi pembekalan yang diberikan kurang mengena atau memenuhi harapan peserta pembekalan dan sulit untuk diaplikasikan di lapangan. Untuk itu perlu adanya perubahan model pembekalan yang lebih bermanfaat, mudah diserap dan dilaksanakan di lapangan oleh para pendamping sosial KUBE.
3. Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur seharusnya mulai melakukan kerja sama dengan swasta dan masyarakat yang mampu dan mau peduli dalam penanganan masalah kemiskinan.

7.1.2. Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Dikembangkan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dikembangkan adalah :

1. Adanya rekrutmen calon pendamping sosial KUBE yang selektif dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Calon pendamping sosial KUBE yang lolos seleksi harus siap bekerja secara profesional dan siap mendampingi KUBE secara purna waktu dan berkesinambungan. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pendamping sosial KUBE yang

- selama ini sudah ada, dimana model pendamping sosial KUBE yang diterapkan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur adalah model pendampingan konvensional dengan menggunakan pendekatan radikal. Model pendampingan konvensional adalah pendamping sosial berasal dari masyarakat lokal dan tidak dilandasi oleh pendidikan formal pekerjaan sosial, namun mempunyai kepedulian terhadap permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat tanpa adanya perintah dari lembaga/aparat desa/kelurahan setempat. Menggunakan pendekatan radikal, karena lebih memfokuskan pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya. Model ini sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang, maka perlu diadakan perubahan dengan menggunakan model pendampingan profesional dan pendekatan yang profesional juga. Pendamping sosial harus lebih profesional, mampu dan pintar dari yang didampingi, karena pendamping sosial KUBE menjadi panutan dan tauladan bagi keluarga binaan sosial dan berhasil tidaknya kelompok usaha bersama tergantung pada peran aktif pendamping sosial KUBE dalam melaksanakan pendampingan.
2. Pembekalan pendamping sosial KUBE dengan menggunakan praktek magang. Para pendamping sosial KUBE juga diberikan pembekalan tentang dasar-dasar praktek pekerjaan sosial secara berkelanjutan, dengan kata lain pembekalan tidak hanya diberikan pada awal

menjelang kegiatan pemberdayaan keluarga miskin akan dilaksanakan.

3. Kemitraan usaha antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan keluarga miskin. Pemberdayaan keluarga miskin bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

7.1.3. Uji Coba Model Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Dikembangkan

Di dalam penelitian ini juga untuk mengetahui model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan dapat dilaksanakan atau tidak oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Uji coba model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan ini diujikan secara kualitatif, yang hanya berupa deskripsi terhadap pelaksanaan model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan tersebut, dengan menggunakan kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*).

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari Uji Coba Model (*Model Testing*) Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dikembangkan adalah :

1. Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE

- Kelompok Yang Tidak Mendapatkan Perlakuan : Tidak ada perbedaan antara pre test dan post test tentang rekrutmen calon pendamping sosial KUBE.

- Kelompok Yang Mendapatkan Perlakuan : Ada perbedaan antara pre test dan post test terhadap rekrutmen calon pendamping sosial KUBE sebelum dan setelah mendapatkan pembekalan dari model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan.

2. Pentingnya Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE

- Kelompok Yang Tidak Mendapatkan Perlakuan : Tidak ada perbedaan akan pentingnya pembekalan bagi pendamping sosial KUBE.
- Kelompok Yang Mendapatkan Perlakuan : Ada perbedaan akan pentingnya pembekalan bagi pendamping sosial KUBE

3. Pelaksanaan Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE

- Kelompok Yang Tidak Mendapatkan Perlakuan : Tidak ada perbedaan terhadap pelaksanaan pembekalan bagi pendamping sosial KUBE.
- Kelompok Yang Mendapatkan Perlakuan : Ada perbedaan terhadap pelaksanaan pembekalan bagi pendamping sosial KUBE

4. Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Miskin melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

- Kelompok Yang Tidak Mendapatkan Perlakuan : Tidak ada perbedaan terhadap pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan usaha ekonomi produktif melalui pendekatan KUBE.
- Kelompok Yang Mendapatkan Perlakuan : Tidak ada perbedaan terhadap pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan usaha ekonomi produktif melalui pendekatan KUBE.

Kemudian kedua kelompok tersebut di atas dibandingkan, dimana hasil uji statistik chi square menunjukkan bahwa antara kelompok yang mendapatkan perlakuan (*treatment*) dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (*treatment*) mempunyai perbedaan persepsi dan pemahaman tentang rekrutmen calon pendamping sosial KUBE, pentingnya pembekalan bagi pendamping sosial KUBE, pelaksanaan pembekalan bagi pendamping sosial KUBE dan pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Dengan demikian pendamping sosial KUBE yang telah mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan menunjukkan perubahan sikap dan respon dalam melaksanakan peranan dan tugasnya sebagai pendamping sosial KUBE. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji statistik dan hasil wawancara dengan responden, dimana sebagai besar pendamping sosial KUBE yang telah mengikuti model pendamping sosial KUBE yang dikembangkan memberikan respon yang sangat baik dan setuju terhadap model yang dikembangkan tersebut, karena model yang dikembangkan ini sudah sesuai dengan harapan pendamping sosial KUBE dan keluarga binaan sosial. Namun responden berharap meskipun model pendamping sosial KUBE ini sudah sesuai dengan harapannya, tetapi tidak menutup kemungkinan tetap memerlukan adanya perbaikan, perubahan dan penyempurnaan di dalam pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan tutunan jaman dan teknologi yang cepat berubah. Pelaksanaan supervisi, evaluasi dan pelaporan

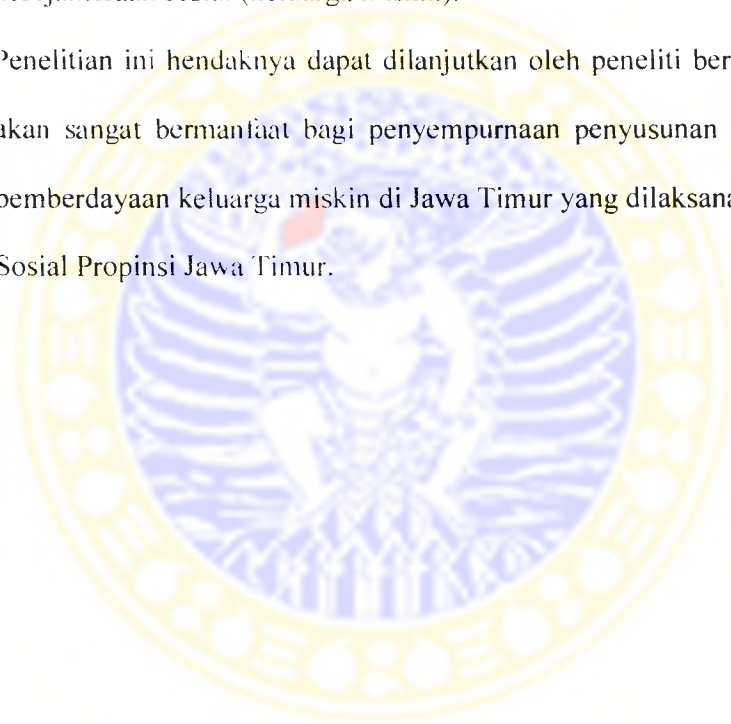
memegang peranan penting terhadap keberhasilan petugas dalam melaksanakan tugas dan peranan sebagai pendamping sosial KUBE.

7.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendamping sosial KUBE setelah mengikuti pembekalan hendaknya diikutkan pada pelatihan yang lain untuk mendukung tugas dan fungsi sebagai pendamping sosial KUBE, seperti dasar-dasar pekerjaan sosial, metode pekerjaan sosial dan teknik-teknik keterampilan pekerjaan sosial. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan tugas pendamping sosial KUBE dan untuk mengarahkan pada model pendamping sosial KUBE yang profesional.
2. Untuk memacu motivasi dan semangat kerja pendamping sosial KUBE hendaknya dilaksanakan pemilihan pendamping sosial KUBE berprestasi, karena selama ini Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur telah melaksanakan pemilihan karang taruna teladan, karang werdha berprestasi, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) teladan dan Kelompok Usaha Bersama berprestasi.
3. Supervisi, evaluasi dan pelaporan hendaknya dilaksanakan secara berkala dan dilaporkan secara berjenjang mulai dari aparat desa sampai pada Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.
4. Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur hendaknya melaksanakan bimbingan lanjut secara berkesinambungan, sehingga dapat mengetahui dengan jelas dan benar tentang keberhasilan pelaksanaan tugas dan peran pendamping sosial KUBE.

5. Pemberdayaan keluarga miskin melalui pendekatan KUBE hendaknya dapat diintegrasikan di semua sektor atau lintas sektor, sehingga tidak terjadi overlapping bantuan terhadap keluarga miskin.
6. Program pendampingan sosial KUBE hanya bisa diterapkan untuk jangka pendek, karena tidak akan selamanya menggunakan jasa pendamping sosial KUBE. Untuk jangka panjang hendaknya Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur mulai memikirkan program pemberdayaan keluarga miskin bukan berdasarkan tuntutan tetapi berdasarkan kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial (keluarga miskin).
7. Penelitian ini hendaknya dapat dilanjutkan oleh peneliti berikutnya, karena akan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan penyusunan program dalam pemberdayaan keluarga miskin di Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung I Gusti Ngurah. 2002. *Statistika Analisis Hubungan Kausal Berdasarkan Data Kategorik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ala Andre Bayo. 1980. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Alfian, Tan, Soemarjan. 1980. *Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Crescent Tim. 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri, Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewanta Setya, Awan dkk. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Jakarta: Aditya Media.
- Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin. 2002. *Buku Panduan Petugas Pendamping Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin*. Jakarta: Departemen Sosial R.I.
- Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin. 2002. *Pedoman Pemberdayaan Kemiskinan Melalui Program Bantuan Sosial Fakir Miskin*. Jakarta: Departemen Sosial R.I.
- Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin. 2003. *Petunjuk Teknis Penanggulangan Fakir Miskin Melalui Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Departemen Sosial R.I.
- Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin. 2004. *Panduan Umum Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)*. Jakarta: Departemen Sosial R.I.
- Husken, Frans dkk. 1997. *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, Indonesia di Bawah Orde Baru*. Jakarta: Rasindo.
- Hikmat Harry. 2002. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).
- Ife Jim. 1995. *Community Development, Creating Community Alternatives-Vison, Analysis and Practice*. Longman.
- Ino Yuwono, Drs., MA., Dkk. 2005. *Psikologi Industri & Organisasi*. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.

- Jamasy Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Blantika.
- Long, Norman. 1977. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kountur Ronny. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Midgley, James. 1995. *Social Development-The Development Perspective in Social Welfare*. London:Sage.
- Miley Dubois. 1992. *Social Work An Empowering Profession*. Allyn and Bacon.
- Mubyarto dkk. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Jakarta: Adity Media.
- Muhidin Syarif. 1992. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS).
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pengembangan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Payne, Malcolm. 1991. *Modern Social Work Theory*. Mac Millan.
- Poloma, Margaret. M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Priyono, Onny. S. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Siegel Sidney. 1990. *Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Simarmata, Dj. A. 1983. *Operation Research Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Singarimbun Masri, Efendi Sofian. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sitorus, M.T. Felix dkk. 1996. *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia Prof. Dr. Sayogyo 70 Tahun*. Jakarta: Grasindo.
- Solimun. 2002. *Multivariate Analysis*. Malang: Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang.
- Sugiyono. 2004. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Spektrum Pemikiran*. Bandung: LSP-STKS Bandung.

- Suharto Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sumardi Mulyanto, Evers Hans Dieter. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sumardjo dan Saharuddin. 2004. *Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat*. Bogor: Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Ilmu Pertanian IPB dan Program Pasca Sarjana IPB.
- Suryabrata Sumadi. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suwarsono, Alvin Y. So. 1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. LP3ES.
- Suyanto Bagong dan Karnaji. 2005. *Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial : Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat Miskin*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Tilaar,H,A,R. 1997. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tropman John E. John L. Erlich, J. Rothman. 1995. *Tactic and Techniques Community Intervention*. FE. Peacock Publishers. Inc.
- Usman Sunyoto. 1998. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wie Thee Kian. 1981. *Pemerataan Ketimpangan Kemiskinan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Zuraida Desiree, Rizal Jufrina. 1993. *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan-Pokok-Pokok Pikiran Selo Soemardjan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

RENCANA PELAKSANAAN

1. Susunan Organisasi

Pembimbing I : Dr. SUNARJO, dr., MS., MSc

Pembimbing II : Prof. Dr. MACHMUD IBNU ZAIN, SH., MSI

Peneliti : SUFI AGUSTINI

2. Jadwal Penelitian

Nama Kegiatan	Bulan (Tahun 2006)						
	Mare t	Apri l	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septembe r
Persiapan							
1. Persiapan	xx	xx					
2. Proposa Proposal		x					
3. Perbaikan		x					
Pelaksanaan							
1. Pengurusan Ijin			x				
2. Pengumpulan			xxxx	xx			
3. Data Pengolahan Data				xx			
4. Analisis Data					xx		
Penulisan					xxx	xxx	
Ujian Tesis						x	
Perbaikan Tesis						xx	
Penyerahan Tesis							x

Keterangan : Setiap tanda x menunjukkan jumlah dalam minggu

RINCIAN BIAYA PENELITIAN

Pembelian buku Penunjang	Rp. 1.500.000,-
Pembelian ATK	Rp. 1.500.000,-
Biaya Pengandaan	Rp. 1.000.000,-
Biaya Transport	<u>Rp. 5.000.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 9.000.000,-

Terbilang : *Sembilan Juta Rupiah*



7. Apakah pembekalan yang pernah anda ikuti di tempat kerja:
 1. Sangat tidak membantu dalam pelaksanaan pendampingan sosial KUBE
 2. Tidak membantu dalam pelaksanaan pendampingan sosial KUBE
 3. Biasa-biasa saja
 4. Membantu dalam pelaksanaan pendampingan sosial KUBE
 5. Sangat membantu dalam pelaksanaan pendampingan sosial KUBE

8. Apakah pembekalan yang pernah saudara ikuti :
 1. Sangat tidak mempengaruhi keterampilan saudara
 2. Tidak mempengaruhi keterampilan saudara
 3. Biasa-biasa saja
 4. Mempengaruhi keterampilan saudara
 5. Sangat mempengaruhi keterampilan saudara

9. Menurut saudara, pembekalan yang diadakan terkait dengan pengetahuan saudara :
 1. Sangat tidak menambah pengetahuan
 2. Tidak menambah pengetahuan
 3. Biasa-biasa saja
 4. Menambah pengetahuan
 5. Sangat menambah pengetahuan

10. Pembekalan yang anda ikuti membantu saudara menambah kompetensi dalam pekerjaan :
 1. Sangat tidak setuju
 2. Tidak setuju
 3. Biasa-biasa saja
 4. Setuju
 5. Sangat setuju

11. Apakah pembekalan yang saudara ikuti dapat membantu :
 1. Sangat tidak membantu memecahkan masalah yang dihadapi KUBE keluarga miskin
 2. Tidak membantu memecahkan masalah yang dihadapi KUBE keluarga miskin

3. Biasa-biasa saja
4. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi KUBE keluarga miskin
5. Sangat membantu memecahkan masalah yang dihadapi KUBE keluarga miskin

12. Apakah pendamping sosial KUBE ini dapat membantu :

1. Sangat tidak membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya
2. Tidak membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya
3. Biasa-biasa saja
4. Membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya
5. Sangat membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya

13. Apakah pendamping sosial KUBE ini dapat membantu :

1. Sangat tidak membantu keluarga miskin dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif
2. Tidak membantu keluarga miskin dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif
3. Biasa-biasa saja
4. Membantu keluarga miskin dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif
5. Sangat membantu keluarga miskin dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif

14. Apakah pendamping sosial KUBE ini dapat membantu :

1. Sangat tidak membantu keluarga miskin dalam meningkatkan pendapatannya
2. Tidak membantu keluarga miskin dalam meningkatkan pendapatannya
3. Biasa-biasa saja
4. Membantu keluarga miskin dalam meningkatkan pendapatannya
5. Sangat membantu keluarga miskin dalam meningkatkan pendapatannya

15. Kesenjangan antara isi program pembekalan dengan kebutuhan pendamping sosial KUBE di lapangan :

1. Sama sekali tidak ada kesenjangan
2. Tidak ada kesenjangan
3. Biasa-biasa saja

4. Ada kesenjangan
 5. Sangat ada kesenjangan
16. Bagaimana pendapat saudara tentang penunjukan pendamping sosial KUBE yang dilaksanakan selama ini?
1. Sangat tidak tepat
 2. Tidak tepat
 3. Biasa-biasa saja
 4. Tepat
 5. Sangat tepat
17. Apakah perlu dilaksanakan rekrutmen pendamping sosial yang selektif, bagaimana menurut saudara?
1. Sangat tidak perlu
 2. Tidak perlu
 3. Acuh saja
 4. Perlu
 5. Sangat perlu
18. Apakah program pembekalan yang dilaksanakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur sudah :
1. Sangat tidak efisien
 2. Tidak efisien
 3. Biasa-biasa saja
 4. Efisien
 5. Sangat efisien
19. Apakah materi pembekalan yang ditentukan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur sudah :
1. Sangat tidak tepat
 2. Tidak tepat
 3. Biasa-biasa saja
 4. Tepat
 5. Sangat tepat

20. Apakah metode pembekalan yang dilaksanakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur sudah :

1. Sangat tidak sesuai
2. Tidak sesuai
3. Biasa-biasa saja
4. Sesuai
5. Sangat sesuai

21. Bagaimana menurut saudara terhadap alokasi anggaran untuk program pendampingan dalam pemberdayaan keluarga miskin?

1. Sangat tidak cukup
2. Tidak cukup
3. Biasa-biasa saja
4. Cukup
5. Sangat cukup

22. Apakah jangka waktu pembekalan yang dilaksanakan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur sudah :

1. Sangat tidak efektif
2. Tidak efektif
3. Biasa-biasa saja
4. Efektif
5. Sangat efektif

23. Instruktur pembekalan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya, menurut pendapat saudara :

1. Sangat tidak sesuai
2. Tidak sesuai
3. Cukup sesuai
4. Sesuai
5. Sangat sesuai

24. Media peralatan yang digunakan dalam penyelenggaraan pembekalan, menurut saudara :

1. Sangat tidak lengkap
2. Tidak lengkap
3. Cukup lengkap
4. Lengkap
5. Sangat lengkap

25. Menurut saudara proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembekalan terhadap level saudara :

1. Sangat tidak sesuai
2. Tidak sesuai
3. Kurang sesuai
4. Sesuai
5. Sangat sesuai

26. Selain pembekalan yang sudah ada, perlukah diadakan pembekalan lain yang saudara butuhkan :

1. Sangat tidak perlu
2. Tidak perlu
3. Tidak tahu menahu
4. Perlu
5. Sangat perlu

27. Berkaitan dengan rencana pembekalan di masa yang akan datang, menurut saudara bagaimana?

1. Sangat tidak perlu diadakan perubahan
2. Tidak perlu diadakan perubahan-perubahan
3. Acuh saja
4. Perlu diadakan perubahan-perubahan
5. Sangat perlu diadakan perubahan-perubahan

28. Perlukah penyelenggaraan pembekalan yang saudara ikuti tersebut dievaluasi?

1. Sangat tidak perlu
2. Tidak perlu
3. Sekedarnya
4. Perlu
5. Sangat perlu

29. Jika memang "perlu", menurut saudara siapa yang seharusnya mengevaluasi program pembekalan tersebut?

.....
.....
.....

30. Sikap saudara sendiri terhadap program pembekalan tersebut :

1. Sangat tidak respek
2. Tidak respek
3. Kurang respek
4. Respek
5. Sangat respek

31. Apakah perlu adanya kemitraan usaha antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan keluarga miskin :

1. Sangat tidak perlu
2. Tidak perlu
3. Kurang perlu
4. Perlu
5. Sangat perlu

KUESIONER PENELITIAN
PENGEMBANGAN MODEL PENDAMPING SOSIAL KELOMPOK USAHA
BERSAMA (KUBE) DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN
YANG DITERAPKAN SELAMA INI

DATA RESPONDEN

Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Agama :
 Nama KUBE :
 Jabatan :
 Alamat :

KUESIONER PENELITIAN

1. Sejak kapan saudara menjadi anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)?
 tahun.
2. Bagaimana saudara dapat menjadi anggota KUBE?
 1. Diajak teman
 2. Diseleksi oleh petugas desa/kecamatan/kabupaten
 3. Ditunjuk oleh petugas desa/kecamatan/kabupaten
 4. Kemauan sendiri
 5. Dari pengumuman di balai desa
3. Manfaat apa yang saudara peroleh menjadi pengurus/anggota KUBE?

4. Bantuan yang telah diterima saudara dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur,
 dalam bentuk apa?

11. Apakah pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat membantu saudara dalam menjalankan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)?
1. Tidak membantu
 2. Kurang membantu
 3. Biasa-biasa saja
 4. Membantu
 5. Sangat membantu
12. Apakah pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat membantu saudara dalam memenuhi kebutuhan pokok?
1. Tidak membantu
 2. Kurang membantu
 3. Biasa-biasa saja
 4. Membantu
 5. Sangat membantu
13. Apakah pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat membantu saudara dalam meningkatkan pendapatan?
1. Tidak membantu
 2. Kurang membantu
 3. Biasa-biasa saja
 4. Membantu
 5. Sangat membantu
14. Apakah pengetahuan yang diberikan oleh petugas pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada saudara sudah sesuai dengan kemampuan?
1. Tidak sesuai
 2. Kurang sesuai
 3. Biasa-biasa saja
 4. Sesuai
 5. Sangat sesuai

15. Apa harapan saudara tentang petugas pendamping sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di masa yang akan datang dan bantuan yang sesuai dengan kemampuan saudara?

.....
.....
.....

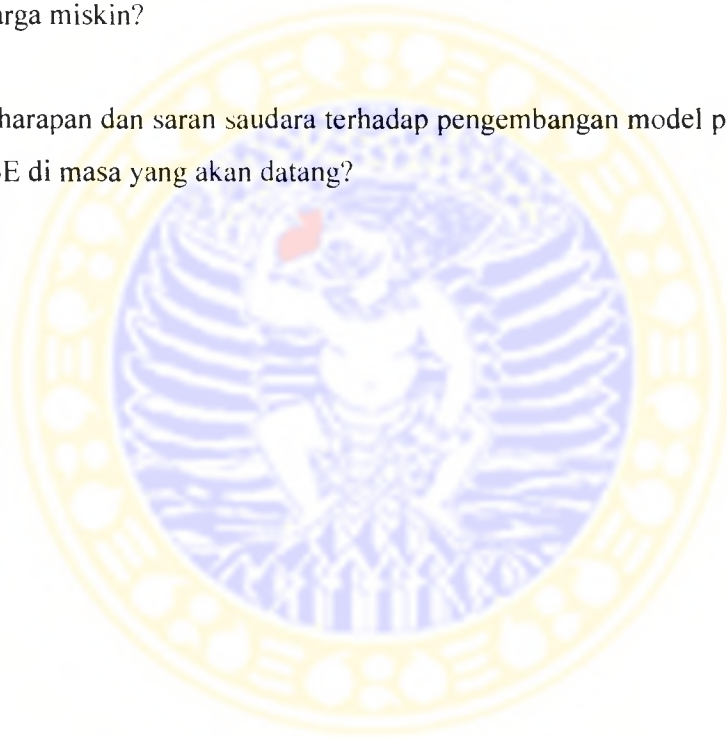


**KUESIONER *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)
PENGEMBANGAN MODEL PENDAMPING SOSIAL
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM
PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN**

PEDOMAN PERTANYAAN UNTUK *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)

1. Apakah pendamping sosial KUBE yang selama ini diterapkan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dapat bermanfaat terhadap usaha ekonomi produktif keluarga miskin?
2. Masih perlukah peran pendamping sosial KUBE dalam pemberdayaan keluarga miskin?
3. Jika "masih perlu", apakah perlu diadakan rekrutmen (seleksi) terhadap calon pendamping sosial KUBE nantinya?
4. Apakah pembekalan yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan kemampuan dan harapan pendamping sosial KUBE?
5. Jika "belum", pembekalan seperti apa yang dibutuhkan oleh pendamping sosial KUBE sendiri dan masyarakat?
6. Apakah sudah memenuhi kebutuhan jangka waktu pembekalan yang telah diikuti oleh saudara?
7. Apakah materi yang diberikan dalam pembekalan sudah dapat menambah pengetahuan saudara?
8. Bagaimana metode pembekalan, apakah sudah sesuai dengan harapan saudara?
9. Bagaimana kemampuan instruktur dalam memberikan pembekalan, apakah sudah memenuhi syarat?

10. Bagaimana anggaran yang disediakan untuk program pemberdayaan keluarga miskin, apakah sudah mencukupi?
11. Bagaimana sarana dan prasarana pembekalan, apakah sudah memadai?
12. Apakah bantuan stimulan kepada keluarga miskin yang berupa usaha ekonomi produktif sudah dapat memenuhi kebutuhan dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya?
13. Jika "belum" bantuan apa yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keluarga miskin?
14. Apa harapan dan saran saudara terhadap pengembangan model pendamping sosial KUBE di masa yang akan datang?



Uji Validitas dan reliabilitas

Reliability

***** Method 1 (space saved) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X1.1	53.0500	154.3658	.3743	.9541
X1.2	53.0000	151.2632	.5904	.9517
X1.3	53.0000	156.6316	.3142	.9542
X1.4	52.9500	147.2079	.8130	.9493
X1.5	53.0500	150.7868	.5743	.9519
X1.6	53.0000	149.8947	.7580	.9498
X1.7	52.9000	148.2000	.7352	.9501
X1.8	53.0000	150.7368	.7103	.9507
X1.9	52.9000	143.6737	.4207	.9535
X1.10	53.1000	152.3053	.6777	.9511
X1.11	53.0000	149.6842	.7827	.9500
X1.12	52.7000	146.6421	.6701	.9509
X1.13	52.9500	147.6289	.7876	.9496
X1.14	53.0500	147.7342	.7488	.9500
X1.15	52.6500	147.6026	.6816	.9507
X1.16	53.0000	148.1053	.7831	.9497
X1.17	53.2000	145.1158	.7737	.9496
X1.18	53.1500	141.7868	.8810	.9480
X1.19	52.6500	149.7921	.5055	.9533
X1.20	52.4000	150.4632	.5734	.9519
X1.21	52.8500	148.1342	.6600	.9510
X1.22	52.7000	148.4316	.6319	.9513
X1.23	52.6000	147.9368	.7278	.9502
X1.24	52.7500	145.8816	.7667	.9497

Reliability Coefficients

N of Cases = 200 N of Items = 24

Alpha = .9529

Frequencies

Frequency Table

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 30 - 40 tahun	6	60.0	60.0	60.0
41 - 50 tahun	4	40.0	40.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki - laki	8	80.0	80.0	80.0
Perempuan	2	20.0	20.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid D2 (PNS)	1	10.0	10.0	10.0
S1 (Unisma)	1	10.0	10.0	20.0
SLTA	7	70.0	70.0	90.0
SLTP	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Agama

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Islam	10	100.0	100.0	100.0

Pernah menjadi pendamping

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	9	90.0	90.0	90.0
Tidak	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Siapa yang menunjuk menjadi pendamping

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Aparat desa	3	30.0	30.0	40.0
Kpl Desa	6	60.0	60.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Berapa tahun jadi pendamping

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	6	60.0	60.0	60.0
3	2	20.0	20.0	80.0
4	2	20.0	20.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Pernah mendapat pembekalan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	10	100.0	100.0	100.0

Pengaruh pembekalan dalam pelaksanaan pendampingan sosial KUBE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak membantu	8	80.0	80.0	80.0
biasa saja	2	20.0	20.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Pengaruh pembekalan thd. ketrampilan pendamping sosial KUBE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak berpengaruh	5	50.0	50.0	50.0
biasa saja	5	50.0	50.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Pembekalan terkait pengetahuan pendamping sosial

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak menambah	2	20.0	20.0	20.0
cukup menambah	5	50.0	50.0	70.0
menambah	3	30.0	30.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Pembekalan membantu menambah kompetensi dalam pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak membantu	1	10.0	10.0	10.0
tetap saja	9	90.0	90.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Pembekalan membantu memecahkan masalah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak membantu	10	100.0	100.0	100.0

Pendamping sosial KUBE membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid membantu	10	100.0	100.0	100.0

Pendamping sosial KUBE membantu keluarga miskin dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid membantu	7	70.0	70.0	70.0
sangat membantu	3	30.0	30.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Pendamping sosial KUBE membantu keluarga miskin meningkatkan pendapatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak membantu	1	10.0	10.0	10.0
tetap saja	9	90.0	90.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Kesenjangan isi program pembekalan dengan kebutuhan pendamping sosial KUBE di lapangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid jauh	8	80.0	80.0	80.0
sangat jauh	2	20.0	20.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Penunjukan pendamping sosial KUBE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak tepat	10	100.0	100.0	100.0

Perlunya rekrutmen sosial yang selektif

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid perlu	5	50.0	50.0	50.0
sangat perlu	5	50.0	50.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Efisiensi program pembekalan Dinas Sosial

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak efisien	10	100.0	100.0	100.0

Ketepatan materi pembekalan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak tepat	8	80.0	80.0	80.0
sedang - sedang saja	2	20.0	20.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Metode pembekalan yang dilaksanakan Dinas Sosial

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak sesuai	1	10.0	10.0	10.0
tidak sesuai	7	70.0	70.0	80.0
cukup sesuai	2	20.0	20.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Alokasi anggaran pembekalan untuk program pendampingan dalam pemberdayaan keluarga miskin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak cukup	1	10.0	10.0	10.0
tidak cukup	6	60.0	60.0	70.0
biasa saja	3	30.0	30.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Efektivitas jangka waktu pembekalan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak efektif	9	90.0	90.0	90.0
biasa saja	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Instruktur pembekalan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid cukup sesuai	7	70.0	70.0	70.0
sesuai	3	30.0	30.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Media peralatan yang digunakan dalam pembekalan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak lengkap	1	10.0	10.0	10.0
biasa saja	9	90.0	90.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Proses pembelajaran dalam pembekalan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak sesuai	1	10.0	10.0	10.0
cukup sesuai	9	90.0	90.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Perlunya pelaksanaan pembekalan lain

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid perlu	5	50.0	50.0	50.0
sangat perlu	5	50.0	50.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Rencana pembekalan di masa yang akan datang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid perlu diadakan perubahan	5	50.0	50.0	50.0
sangat perlu diadakan perubahan	5	50.0	50.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Evaluasi pelaksanaan pembekalan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid perlu	5	50.0	50.0	50.0
sangat perlu	5	50.0	50.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Sikap terhadap program pembekalan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid respek	9	90.0	90.0	90.0
sangat respek	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Perlunya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pendampingan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak tahu menahu	1	10.0	10.0	10.0
perlu	7	70.0	70.0	80.0
sangat perlu	2	20.0	20.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Frequencies Frequency Table

Usia anggota KUBE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 30 - 40 tahun	1	10.0	10.0	10.0
41 - 50 tahun	2	20.0	20.0	30.0
> 50 tahun	7	70.0	70.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Jenis kelamin anggota KUBE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki - laki	10	100.0	100.0	100.0

Pendidikan anggota KUBE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	2	20.0	20.0	20.0
Tdk Sklh	2	20.0	20.0	40.0
Tdk Tamat SD	6	60.0	60.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Agama anggota KUBE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Islam	10	100.0	100.0	100.0

Jabatan anggota KUBE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Anggota	3	30.0	30.0	30.0
Ketua	7	70.0	70.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Lama bergabung menjadi anggota KUBE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	3	30.0	30.0	30.0
3	3	30.0	30.0	60.0
4	4	40.0	40.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Cara menjadi anggota KUBE

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ditunjuk oleh petugas desa/kec/kab	10	100.0	100.0	100.0

Manfaat bantuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	4	40.0	40.0	40.0
Tidak	6	60.0	60.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Bantuan sesuai harapan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	2	20.0	20.0	20.0
Tidak	8	80.0	80.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Bantuan dikelola secara kelompok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang baik	6	60.0	60.0	60.0
cukup baik	4	40.0	40.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Keberadaan petugas pendamping sosial KUBE selama ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju dan kurang bermanfaat	1	10.0	10.0	10.0
biasa saja	4	40.0	40.0	50.0
setuju dan bermanfaat	4	40.0	40.0	90.0
sangat setuju dan sangat bermanfaat	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Pendamping sosial KUBE dapat membantu dalam memecahkan masalah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak membantu	4	40.0	40.0	40.0
tetap saja	5	50.0	50.0	90.0
sangat membantu	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Pendamping sosial KUBE dapat membantu dalam menjalankan UEP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak membantu	7	70.0	70.0	70.0
	tetap saja	2	20.0	20.0	90.0
	membantu	1	10.0	10.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

Pendamping sosial KUBE dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak membantu	1	10.0	10.0	10.0
	tidak membantu	7	70.0	70.0	80.0
	tetap saja	1	10.0	10.0	90.0
	membantu	1	10.0	10.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

Pendamping sosial KUBE dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak membantu	1	10.0	10.0	10.0
	tidak membantu	8	80.0	80.0	90.0
	tetap saja	1	10.0	10.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

Kesesuaian pengetahuan yang diberikan terhadap petugas pendamping sosial KUBE terhadap kemampuan KBS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak sesuai	7	70.0	70.0	70.0
	cukup sesuai	3	30.0	30.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

Data	Perlakuan					Kontrol				
	No.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	No.	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4
Data pre test	1	13	10	2	32	1	13	10	2	25
	2	13	10	2	33	2	13	8	2	26
	3	13	8	1	29	3	13	8	2	26
	4	12	7	1	26	4	12	8	2	25
	5	12	8	2	22	5	12	8	2	27
	6	13	8	2	24	6	13	10	2	25
	7	11	8	2	24	7	11	11	2	25
	8	10	8	2	25	8	10	9	1	26
	9	12	8	2	33	9	12	9	2	27
	10	12	8	2	32	10	13	9	2	28
	11	13	7	1	28	11	13	8	2	27
	12	12	10	2	29	12	17	10	2	28
	13	10	10	2	29	13	12	10	2	27
	14	12	8	1	25	14	17	8	2	28
	15	11	7	1	27	15	17	8	2	34
	16	13	8	1	31	16	14	8	2	31
	17	12	7	1	26	17	12	8	2	28
	18	15	10	2	28	18	15	10	2	27
	19	17	10	2	37	19	17	10	2	28
	20	12	10	2	39	20	12	10	2	30
Data post test	21	21	16	2	44	21	12	10	2	26
	22	19	13	4	37	22	13	11	2	25
	23	19	12	4	39	23	11	12	2	25
	24	19	13	4	38	24	10	8	1	27
	25	19	12	4	43	25	12	8	2	28
	26	18	12	4	39	26	13	8	2	26
	27	18	12	4	40	27	11	8	2	25
	28	18	12	4	43	28	10	10	1	33
	29	19	12	4	37	29	12	10	2	31
	30	19	12	4	42	30	13	9	2	31
	31	17	12	4	40	31	13	8	2	25
	32	19	16	2	36	32	17	8	2	26
	33	22	15	4	39	33	12	8	2	27
	34	22	15	4	34	34	10	8	1	27
	35	23	15	4	37	35	12	10	2	25
	36	24	15	4	36	36	13	9	2	26
	37	22	15	4	34	37	12	9	2	26
	38	21	15	4	40	38	10	9	1	34
	39	21	15	4	39	39	12	8	2	32
	40	21	15	4	35	40	13	10	2	32

Keterangan

Aspek 1 Pentingnya pembekalan bagi pendamping sosial KUBE (kelompok eksperimen)

Aspek 2 Pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan UEP keluarga miskin melalui pendekatan KUBE (kelompok eksperimen)

Aspek 3 Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE (kelompok eksperimen)

Aspek 4 Pelaksanaan pembekalan bagi pendamping sosial KUBE (kelompok eksperimen)

Crosstabs

Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE (kelompok kontrol)* Kelompok

Crosstab

			Kelompok		Total
			Pre test	Post test	
Rekrutmen (kelompok kontrol)	Sangat tidak perlu	Count	1	4	5
		Expected Count	2.5	2.5	5.0
		% within Kelompok	5.0%	20.0%	12.5%
	Tidak perlu	Count	19	16	35
		Expected Count	17.5	17.5	35.0
		% within Kelompok	95.0%	80.0%	87.5%
Total	Count	20	20	40	
	Expected Count	20.0	20.0	40.0	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.057 ^b	1	.151		
Continuity Correction ^a	.914	1	.339		
Likelihood Ratio	2.185	1	.139		
Fisher's Exact Test				.342	.171
Linear-by-Linear Association	2.006	1	.157		
N of Valid Cases	40				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.50.

Pentingnya Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE (kelompok kontrol) * Kelompok

Crosstab

			Kelompok		Total
			Pre test	Post test	
Arti penting pembekalan (kelompok kontrol)	Kurang berarti	Count	8	13	21
		Expected Count	10.5	10.5	21.0
		% within Kelompok	40.0%	65.0%	52.5%
	Berarti	Count	12	7	19
		Expected Count	9.5	9.5	19.0
		% within Kelompok	60.0%	35.0%	47.5%
Total	Count	20	20	40	
	Expected Count	20.0	20.0	40.0	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.506 ^b	1	.113		
Continuity Correction ^a	1.604	1	.205		
Likelihood Ratio	2.533	1	.111		
Fisher's Exact Test				.205	.102
Linear-by-Linear Association	2.444	1	.118		
N of Valid Cases	40				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.50.

Pelaksanaan Pembekalan bagi pendamping sosial KUBE (kelompok kontrol) * Kelompok

Crosstab

			Kelompok		Total
			Pre test	Post test	
Pelatihan pendamping sosial (kelompok kontrol)	Kurang berhasil	Count	7	10	17
		Expected Count	8.5	8.5	17.0
		% within Kelompok	35.0%	50.0%	42.5%
	Berhasil	Count	13	10	23
		Expected Count	11.5	11.5	23.0
		% within Kelompok	65.0%	50.0%	57.5%
Total	Count	20	20	40	
	Expected Count	20.0	20.0	40.0	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.921 ^b	1	.337		
Continuity Correction ^a	.409	1	.522		
Likelihood Ratio	.925	1	.336		
Fisher's Exact Test				.523	.262
Linear-by-Linear Association	.898	1	.343		
N of Valid Cases	40				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.50.

Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan UEP Keluarga Miskin melalui Pendekatan KUBE (kelompok kontrol) * Kelompok

Crosstab

			Kelompok		Total
			Pre test	Post test	
program KUBE (kelompok kontrol)	Kurang berhasil	Count	9	9	18
		Expected Count	9.0	9.0	18.0
		% within Kelompok	45.0%	45.0%	45.0%
	Berhasil	Count	11	11	22
		Expected Count	11.0	11.0	22.0
		% within Kelompok	55.0%	55.0%	55.0%
Total	Count	20	20	40	
	Expected Count	20.0	20.0	40.0	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.000 ^b	1	1.000		
Continuity Correction ^a	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.000	1	1.000		
Fisher's Exact Test				1.000	.624
Linear-by-Linear Association	.000	1	1.000		
N of Valid Cases	40				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.00.

Crosstabs

Rekrutmen Calon Pendamping Sosial KUBE(kelompok eksperimen) * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Pre test	Post test	
Rekrutmen (kelompok eksperimen)	Tidak perlu	Count	20	2	22
		Expected Count	11.0	11.0	22.0
		% within Kelompok	100.0%	10.0%	55.0%
	Perlu	Count	0	18	18
		Expected Count	9.0	9.0	18.0
		% within Kelompok	.0%	90.0%	45.0%
Total	Count	20	20	40	
	Expected Count	20.0	20.0	40.0	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	32.727 ^b	1	.000		
Continuity Correction ^a	29.192	1	.000		
Likelihood Ratio	42.048	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	31.909	1	.000		
N of Valid Cases	40				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.00.

Pentingnya pembekalan bagi pendamping sosial KUBE (kelompok eksperimen) * Kelompok

Crosstab

			Kelompok		Total
			Pre test	Post test	
Arti penting pembekalan (kelompok eksperimen)	Kurang berarti	Count	12	0	12
		Expected Count	6.0	6.0	12.0
		% within Kelompok	60.0%	.0%	30.0%
	Berarti	Count	8	20	28
		Expected Count	14.0	14.0	28.0
		% within Kelompok	40.0%	100.0%	70.0%
Total	Count	20	20	40	
	Expected Count	20.0	20.0	40.0	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	17.143 ^b	1	.000		
Continuity Correction ^a	14.405	1	.000		
Likelihood Ratio	21.949	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	16.714	1	.000		
N of Valid Cases	40				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.00.

Pelaksanaan Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE (kelompok eksperimen) * Kelompok

Crosstab

			Kelompok		Total
			Pre test	Post test	
Pelatihan pendamping sosial (kelompok eksperimen)	Kurang berhasil	Count	7	0	7
		Expected Count	3.5	3.5	7.0
		% within Kelompok	35.0%	.0%	17.5%
	Berhasil	Count	13	20	33
		Expected Count	16.5	16.5	33.0
		% within Kelompok	65.0%	100.0%	82.5%
Total	Count	20	20	40	
	Expected Count	20.0	20.0	40.0	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.485 ^b	1	.004		
Continuity Correction ^a	6.234	1	.013		
Likelihood Ratio	11.200	1	.001		
Fisher's Exact Test				.008	.004
Linear-by-Linear Association	8.273	1	.004		
N of Valid Cases	40				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.50.

Pendamping Sosial KUBE dalam Pelaksanaan UEP Keluarga Miskin melalui Pendekatan KUBE (kelompok eksperimen) * Kelompok

Crosstab

			Kelompok		Total
			Pre test	Post test	
program KUBE (kelompok eksperimen)	Kurang berhasil	Count	13	0	13
		Expected Count	6.5	6.5	13.0
		% within Kelompok	65.0%	.0%	32.5%
	Berhasil	Count	7	20	27
		Expected Count	13.5	13.5	27.0
		% within Kelompok	35.0%	100.0%	67.5%
Total	Count	20	20	40	
	Expected Count	20.0	20.0	40.0	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19.259 ^b	1	.000		
Continuity Correction ^a	16.410	1	.000		
Likelihood Ratio	24.549	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	18.778	1	.000		
N of Valid Cases	40				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.50.

Crosstabs

Rekrutmen calon pendamping sosial KUBE * kelompok

Crosstab

			kelompok		Total
			Mendapat pembekalan	Tidak mendapat pembekalan	
Recruitmen	Tidak perlu	Count	2	20	22
		Expected Count	11.0	11.0	22.0
		% within kelompok	10.0%	100.0%	55.0%
	Perlu	Count	18	0	18
		Expected Count	9.0	9.0	18.0
		% within kelompok	90.0%	.0%	45.0%
Total	Count	20	20	40	
	Expected Count	20.0	20.0	40.0	
	% within kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	32.727 ^b	1	.000		
Continuity Correction ^a	29.192	1	.000		
Likelihood Ratio	42.048	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	31.909	1	.000		
N of Valid Cases	40				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.00.

Pentingnya pembekalan bagi pendamping sosial KUBE * kelompok

Crosstab

			kelompok		Total
			Mendapat pembekalan	Tidak mendapat pembekalan	
Arti penting pembekalan	Kurang berarti	Count	0	13	13
		Expected Count	6.5	6.5	13.0
		% within kelompok	.0%	65.0%	32.5%
	Berarti	Count	20	7	27
		Expected Count	13.5	13.5	27.0
		% within kelompok	100.0%	35.0%	67.5%
Total	Count	20	20	40	
	Expected Count	20.0	20.0	40.0	
	% within kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19.259 ^b	1	.000		
Continuity Correction ^a	16.410	1	.000		
Likelihood Ratio	24.549	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	18.778	1	.000		
N of Valid Cases	40				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.50.

Pelaksanaan Pembekalan bagi Pendamping Sosial KUBE * kelompok

Crosstab

			kelompok		Total
			Mendapat pembekalan	Tidak mendapat pembekalan	
Pelatihan pendamping sosial	Kurang berhasil	Count	0	10	10
		Expected Count	5.0	5.0	10.0
		% within kelompok	.0%	50.0%	25.0%
	Berhasil	Count	20	10	30
		Expected Count	15.0	15.0	30.0
		% within kelompok	100.0%	50.0%	75.0%
Total	Count	20	20	40	
	Expected Count	20.0	20.0	40.0	
	% within kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	13.333 ^b	1	.000		
Continuity Correction ^a	10.800	1	.001		
Likelihood Ratio	17.261	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	13.000	1	.000		
N of Valid Cases	40				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.00.

Pendamping sosial KUBE dalam pelaksanaan UEP keluarga miskin melalui pendekatan KUBE * kelompok

Crosstab

			kelompok		Total
			Mendapat pembekalan	Tidak mendapat pembekalan	
program KUBE	Kurang berhasil	Count	0	9	9
		Expected Count	4.5	4.5	9.0
		% within kelompok	.0%	45.0%	22.5%
	Berhasil	Count	20	11	31
		Expected Count	15.5	15.5	31.0
		% within kelompok	100.0%	55.0%	77.5%
Total	Count	20	20	40	
	Expected Count	20.0	20.0	40.0	
	% within kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11.613 ^b	1	.001		
Continuity Correction ^a	9.176	1	.002		
Likelihood Ratio	15.128	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	11.323	1	.001		
N of Valid Cases	40				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.50.

Lampiran 7

MODUL

PENGEMBANGAN MODEL PENDAMPING SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN



**Disusun oleh :
SUFU AGUSTINI**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apapun dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai Keluarga Fakir Miskin termasuk kategori kemiskinan kronis (*chronic poverty*), yang membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat juga warga masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara (*transient poverty*) akibat bencana alam, bencana sosial atau situasi sulit lainnya, jika tidak ditangani serius dapat mengalami masalah kemiskinan kronis.

Untuk menangani keluarga fakir miskin, agar kualitas hidup dan kesejahteraannya dapat ditingkatkan, diperlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik sektor pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha. Agar terdapat kesatuan gerak langkah untuk bersama-sama memberdayakan keluarga fakir miskin, maka diperlukan arah kebijakan dan strategi dalam menangani keluarga fakir miskin yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di daerah secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Program pemberdayaan keluarga miskin merupakan suatu proses perbaikan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada siapapun, agar mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Salah satu upaya untuk mempercepat proses perbaikan dalam pemberdayaan keluarga miskin adalah pendampingan. Pendampingan sebagai suatu konsep berkembang dengan adanya kesadaran baru

bahwa keluarga fakir miskin bukanlah pihak yang tidak tahu dan tidak mau maju, sebaliknya saat ini mulai dikenali bahwa keluarga fakir miskin adalah pihak yang mau, memiliki pengetahuan lokal, mempunyai potensi besar dan kearifan tradisional.

Pada dasarnya pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan keluarga fakir miskin dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki, sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan keluarga fakir miskin, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif.

Dalam pelaksanaan program pendampingan ini diperlukan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Petugas pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berkualitas, mampu berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator selama program pemberdayaan keluarga miskin berlangsung dan berfungsi sebagai konsultan sewaktu sewaktu diperlukan oleh kelompok. Perubahan perilaku keluarga miskin untuk mandiri dan kreatif dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif merupakan fokus program pendampingan. Petugas pendamping sosial dapat berasal dari aparat pemerintah (supra struktur) maupun petugas pendamping sosial yang berasal dari luar, seperti Tokoh Masyarakat/Organisasi Sosial/LSM (infra struktur) sepanjang memenuhi kriteria calon pendamping sosial.

II. Tujuan

Modul Pengembangan Model Pendamping Sosial KUBE dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin ini disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan program pendampingan bagi Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.
2. Untuk memudahkan pelaksanaan Program Pendampingan bagi Instansi Pemerintah yang membutuhkan.
3. Agar pelaksanaan program pendampingan dapat terarah, terpadu dan tepat sasaran.

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 jo Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 124 Tahun 2001 jo Nomor : 8 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.
5. Kebijakan Teknis Penanganan Fakir Miskin Tahun 2004 – 2009.
6. Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2000 jo Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.

IV. Kegiatan

1. Seleksi Petugas Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

a. Pengertian

Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan memilih, mencatat dan mengumpulkan data-data petugas supra struktur dan petugas infr struktur (pemuka masyarakat) yang dianggap mampu dalam melaksanakan pendampingan keluarga miskin.

b. Tujuan Seleksi Pendamping Sosial KUBE

- 1). Memperoleh petugas pendamping sosial KUBE yang dianggap mampu melaksanakan pendampingan, yang memiliki jiwa pengabdian berbuat untuk orang lain serta memiliki dedikasi.
- 2). Menetapkan jumlah petugas pendamping sosial KUBE dalam satu lokasi kegiatan sesuai dengan jumlah sasaran keluarga miskin.

c. Sasaran

- 1). Petugas Pemerintah (Supra Struktur).
- 2). Pemuka masyarakat/unsur organisasi sosial/LSM (Infra Struktur).

d. Materi Seleksi

- 1). Identifikasi calon pendamping sosial KUBE.
- 2). Pekerjaan calon pendamping sosial KUBE.
- 3). Latar belakang calon pendamping sosial KUBE :
 - a). Pendidikan
 - b). Pengalaman dalam bidang/pekerjaan
 - c). Keahlian/keterampilan yang dimiliki
- 4). Tempat tinggal.

- 5). Tanggapan calon pendamping sosial KUBE, atas tugas yang akan diberikan sebagai pendamping sosial.
- e. Waktu dan Tempat Seleksi Pendamping Sosial KUBE
- 1). Waktu pelaksanaan seleksi selama 3 hari di Kabupaten/Kota (d disesuaikan dengan jumlah tenaga pendamping sosial yang dibutuhkan).
 - 2). Tempat adalah lokasi tempat pelaksanaan program/kegiatan di lokasi, dimana calon pendamping sosial berada.
- f. Metode Seleksi
- 1). Mengisi daftar pertanyaan.
 - 2). Wawancara langsung dengan calon pendamping sosial KUBE.
- g. Pelaksana Seleksi
- 1). Dinas Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota.
 - 2). Instansi Terkait.
- h. Pelaksanaan Seleksi
- 1). Tahap Persiapan
 - a). Kontak dengan :
 - (1). Pemerintah Daerah
 - (2). Instansi Terkait
 - (3) Pemuka masyarakat di calon lokasi program/kegiatan
 - (4) Organisasi Sosial/LSM
 - b). Menjelaskan :
 - (1). Rencana pelaksanaan program/kegiatan
 - (2). Tentang seleksi calon pendamping sosial KUBE

- c). Penyediaan prasarana yang dibutuhkan
 - d). Hal-hal yang perlu diinformasikan
- 2). Pelaksanaan Seleksi
- a). Melaksanakan pencatatan
 - b). Menganalisa data dan informasi

2. Pembekalan/Pelatihan Petugas Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

a. Pengertian

Pembekalan petugas pendamping sosial KUBE merupakan penyampaian/transformasi sejumlah pengetahuan dan keterampilan kepada individu petugas pemerintah atau anggota masyarakat, agar mereka mempunyai pengetahuan, kemampuan, keahlian dan memiliki sikap mental serta dapat melaksanakan perannya sebagai pendamping sosial.

b. Tujuan

1). Tujuan Umum

Tersedianya tenaga pendamping sosial KUBE yang memiliki kualitas pengetahuan, kemampuan dan keahlian serta memiliki sikap mental positif dan mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pendamping sosial.

2). Tujuan Khusus

- a). Memahami kondisi obyektif keluarga fakir miskin dan lingkungannya.
- b). Melaksanakan tugas-tugas pendampingan secara optimal.

- c). Mengerti dan mendayagunakan potensi/sumber yang ada di lokasi/desakelurahan tersebut.
- d). Memahami dan menguasai teknik-teknik pengembangan masyarakat.
- e). Memahami peranan pendamping sosial :
 - (1) Sebagai pemandu (fasilitator)
 - (2) Sebagai pembina
 - (3) Sebagai penghubung (komunikator)
 - (4) Sebagai penggerak (dinamisator)
- c. Sasaran Pembekalan
 - 1). Petugas Pemerintah (Supra Struktur)
 - 2). Unsur Orsos/LSM/Masyarakat (Infra Struktur)
- d. Waktu dan Tempat Pembekalan
 - 1). Waktu Pembekalan :
 - a). Di Dalam Kelas dilaksanakan selama 5 (lima) hari
 - b). Di Luar Kelas (Lapangan) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari
 - 2). Tempat Pembekalan :
 - a). Propinsi
 - b). Kabupaten/Kota
- e. Organisasi Penyelenggaraan
 - 1). Personal Panitia terdiri dari : petugas Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur/petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Pejabat Komitmen.
 - 2). Jumlah personil panitia disesuaikan dengan jumlah kebutuhan.

3). Fasilitator adalah mereka yang memiliki pengetahuan/pemahaman.
dalam program penanggulangan fakir miskin, yaitu :

- a). Petugas Dinas Sosial
- b). Instansi Terkait
- c). Widyaiswara
- d). Nara sumber dapat diambil dari para ilmuwan, ahli di bidang materi yang akan disampaikan, yang dianggap mampu memberikan informasi terutama masalah kemiskinan dan tentang potensi sumber yang tersedia serta dapat dimanfaatkan (lokasi pelaksanaan kegiatan).

f. Materi Pemantapan Pendamping Sosial KUBE, meliputi :

- 1). Perencanaan Program Kesejahteraan Sosial Jawa Timur
- 2). Kebijakan program pemberdayaan keluarga fakir miskin Departemen Sosial R.I.
- 3). Perencanaan pengentasan kemiskinan
- 4). Dinamika Kelompok
- 5). Komunikasi Sosial
- 6). Teknik menggerakkan masyarakat
- 7). Teknologi Tepat Guna (TTG) dikaitkan dengan pengelolaan UEP
- 8). Teknik Seleksi Calon Keluarga Binaan Sosial (KBS)
- 9). Identifikasi masalah, pengenalan kebutuhan dan pemecahan masalah
- 10). Motivasi dan kohesivitas kelompok

11). Langkah-langkah pelaksanaan :

- a). Tahap pembentukan KBS (seleksi calon KBS)
- b). Tahap pembentukan usaha kelompok
- c). Tahap pembentukan usaha koperasi

12). Pengenalan, penggalian dan pendayagunaan sumber

13). Peranan Pendamping Sosial KUBE dalam pemberdayaan keluarga miskin

14). Pengelolaan Usaha Ekonomi produktif (UEP) melalui KUBE keluarga miskin

15). Supervisi, evaluasi, pencatatan dan pelaporan

16). Teknik pelaksanaan pendampingan KUBE keluarga miskin

17). Program kemitraan usaha antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan keluarga miskin melalui kelompok usaha bersama

g. Metode Pembekalan, terdiri dari :

1). Learning by doing.

Metode ini memberikan peluang dengan menyediakan waktu yang memadai bagi peserta untuk "belajar seraya mengerjakan" baik kerja individu maupun kerja dalam kelompok. Learning by doing ini juga memungkinkan peserta dapat mengembangkan pemilikan yang praktis dan realistis sesuai dengan kondisi obyektif (kondisi keluarga fakir miskin dan kondisi lingkungan).

2). Diskusi.

Metode ini memungkinkan peserta saling menukar pengalaman dan pengetahuan dalam rangka memahami materi yang disampaikan

fasilitator. Diskusi juga dapat difungsikan sebagai sarana dialog antara peserta dengan fasilitator yang diharapkan dapat melahirkan gagasan-gagasan yang motivatif dapat diimplementasikan dalam kerja nyata.

3). Curah pendapat.

Merupakan pengungkapan pemikiran untuk memberikan tanggapan, pandangan secara bebas, teratur dan terarah serta bertanggungjawab atas materi yang disajikan fasilitator untuk mencari kebenaran materi yang disampaikan. Curah pendapat hendaknya disampaikan secara jelas dan sopan.

4). Praktek Magang.

Sebagai suatu teknik pembelajaran dan merupakan media yang tepat untuk memberikan pengalaman kepada peserta pelatihan/pembekalan.

V. PENUTUP

Peran Petugas Pendamping Sosial KUBE dalam pemberdayaan keluarga miskin merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan keberhasilan program pemberdayaan keluarga miskin. Keberhasilan program pemberdayaan keluarga miskin selain daripada peran petugas pendamping sosial KUBE yang bekerja secara profesional dan mempunyai dedikasi yang tinggi, juga melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Demikian Modul Pengembangan Model Pendamping Sosial KUBE dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**MATERI SELEKSI CALON PENDAMPING SOSIAL
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)**

I. IDENTITAS DIRI :

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :
6. Agama :
7. Alamat :

II. PERTANYAAN :

1. Pengalaman-pengalaman selama membidangi pekerjaan tersebut di atas :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
2. Keterampilan/keahlian yang dimiliki :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
3. Alasan saudara mengikuti seleksi calon pendamping sosial KUBE :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

4. Apa yang saudara ketahui tentang :
 - a. Keluarga Binaan Sosial (KBS) untuk keluarga miskin :
 - b. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) :
 - c. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) :
 - d. Usaha Kesejahteraan Sosial :
 - e. Pendamping Sosial :

5. Apa yang saudara ketahui tentang tugas-tugas sebagai pendamping sosial KUBE, sebutkan!
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

6. Sanggupkah saudara menjalani tugas-tugas sebagai pendamping sosial KUBE, jelaskan!
.....
.....
.....
.....
.....

7. Bersediakah saudara bekerja mendampingi anggota KUBE selama 24 jam, jika diperlukan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi KUBE, jelaskan alasannya!
.....
.....
.....
.....
.....

8. Bila saudara lulus seleksi, rencana apa yang akan dilakukan untuk keberhasilan KUBE yang saudara dampingi, sebutkan!

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

9. Apakah saudara mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), jelaskan!

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

10. Bersedia dan sanggupkah saudara berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan aparat desa untuk melaksanakan kegiatan pendampingan, jelaskan!

-
-

11. Bersedia dan sanggupkah saudara mentaati peraturan dan tata laksana kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini, jelaskan!

-
-

12. Bersedia dan sanggupkah saudara membantu keluarga miskin dalam pengelolaan UEP, sebutkan alasannya!

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

KRITERIA PENILAIAN
SELEKSI CALON PENDAMPING SOSIAL KUBE

Nama :

Kabupaten/Kota :

No.	Materi Seleksi	Kriteria Penilaian		
		Tidak Memenuhi	Kurang Memenuhi	Memenuhi
1.	Usia			
2.	Pendidikan			
3.	Pengalaman yang dimiliki			
4.	Keterampilan yang dimiliki			
5.	Pemahaman tentang KBS			
6.	Pemahaman tentang UEP			
7.	Pemahaman tentang KUBE			
8.	Pemahaman tentang UKS			
9.	Pemahaman tentang Pendamping Sosial			
10.	Pemahaman tentang tugas-tugas Pendamping Sosial			
11.	Pengalaman dalam bidang pengelolaan UEP dan KUBE			
12.	Kesanggupan untuk berkerja 24 jam mendampingi anggota KUBE, bila diperlukan			
12.	Kesanggupan untuk membantu keluarga miskin dalam pengelolaan UEP			
13.	Kesanggupan untuk melakukan koordinasi			
14.	Kesanggupan untuk mentaati peraturan			

..... 2006

Petugas Seleksi

JADWAL PEMBEKALAN PETUGAS PENDAMPING SOSIAL KUBE

No.	Hari	Waktu	Materi	Nara Sumber
I.	Hari ke-1	16.00 – 18.00	Penerimaan peserta	Panitia
		18.00 – 19.00	Makan Malan	Panitia
		19.00 – 20.30	Pembukaan	Bapak Gubernur
		20.30 – 21.00	Coffe Break	Panitia
		21.00 – 22.30	Dinamika Kelompok	Dinas Sosial
II.	Hari ke-2	06.00 – 08.00	Makan Pagi	Panitia
		08.00 – 10.00	Kebijakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Departemen Sosial R.I.	Depsos R.I.
		10.00 – 10.30	Coffe Break	Panitia
		10.30 – 12.00	Perencanaan Program Kesejahteraan Sosial di Jawa Timur	Dinas Sosial
		12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia
		13.00 – 15.00	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pendampingan	PTN
		15.00 – 15.30	Coffe Break	Panitia
		15.30 – 16.30	Perencanaan Pengentasan Kemiskinan	Bapepprop
		16.30 – 17.30	Komunikasi Sosial	PTN
		17.30 – 19.00	ISHOMA	Panitia
		19.00 – 20.00	Teknik Menggerakkan Masyarakat	Bappemas
		20.00 – 21.00	Teknologi Tepat Guna (TTG) dikaitkan dengan Pengelolaan UEP	PTN

No.	Hari	Waktu	Materi	Nara Sumber
III.	Hari ke-3	06.00 – 08.00	Makan Pagi	Panitia
		08.00 – 10.00	Teknik Seleksi Calon Keluarga Binaan Sosial	Dinas Sosial
		10.00 - 10.30	Coffe Break	Panitia
		10.30 – 12.00	Identifikasi Masalah, Pengenalan Kebutuhan Fakir Miskin dan Pemecahan Masalah	Dinas Sosial
		12.00 – 13.00	I S H O M A	Panitia
		13.00 – 15.00	Motivasi dan Kohesivitas Kelompok	Dinas Sosial
		15.00 – 15.30	Coffe Break	Panitia
		15.30 – 17.30	Langkah-langkah Pelaksanaan : - Tahap Pembentukan KBS (Seleksi Calon KBS) - Tahap Pembentukan Usaha Kelompok - Tahap Pembentukan Usaha Koperasi	Dinas Sosial/Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
		17.30 – 19.00	I S H O M A	Panitia
		19.00 – 20.00	Pengenalan, Penggalan dan Pendayagunaan Sumber	Dinas Sosial
		20.00 - 22.00	Peranan Pendamping Sosial KUBR dalam Pemberdayaan Fakir Miskin	PTN

No.	Hari	Waktu	Materi	Nara Sumber
IV.	Hari ke-4	06.00 – 08.00	Makan Pagi	Panitia
		08.00 – 10.00	Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE Fakir Miskin	Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
		10.00 - 10.30	Coffe Break	Panitia
		10.30 – 12.00	Supervisi, Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan	Dinas Sosial
		12.00 – 13.00	I S H O M A	Panitia
		13.00 – 15.00	Teknik Pelaksanaan Pendampingan KUBE Fakir Miskin	Dinas Sosial
		15.00 – 15.30	Coffe Break	Panitia
		15.30 – 17.30	- Program Kemitraan Usaha antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE	Dinas Sosial/LSM/Pengusaha
		17.30 – 19.00	I S H O M A	Panitia
		19.00 – 20.00	Permainan Peran	Dinas Sosial
		20.00 - 22.00	Penjelasan/Pembekalan Praktek Magang	Dinas Sosial

No.	Hari	Waktu	Materi	Nara Sumber
V.	Hari ke-5 sampai dengan Hari ke-10	06.00 - 07.00	Makan Pagi	Panitia
		07.00 - 08.00	Persiapan Berangkat Menuju Lokasi Praktek Magang	Panitia
		08.00 - 10.00	Tiba di Lokasi Praktek Magang	Panitia
		10.00 - 11.00	Penerimaan Peserta Praktek Magang oleh Aparat Kecamatan dan Aparat Desa	Panitia
		11.00 - 12.00	Penempatan Peserta Praktek Magang pada KUBE	Panitia
		12.00 - Selesai	Peserta Praktek Magang melaksanakan tugasnya	
VI.	Hari ke-11	15.00 - 16.00	Persiapan Kembali ke Tempat Pembekalan	Panitia
		16.00 - 18.00	Tiba di Tempat Pembekalan	Panitia
		18.00 - 19.00	ISHOMA	Panitia
		19.00 - Selesai	Penyusunan dan Pengetikan Laporan Hasil Praktek Magang	
VII.	Hari ke-12	06.00 - 08.00	Makan Pagi	Panitia
		08.00 - 11.00	Paparan Hasil Praktek Magang	
		11.00 - 12.00	Pembulatan dan Penutupan	

....., 2006

Panitia,



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya-60286 ☎(031) 5023715, 5020170, Fax. (031) 5030076
E-mail : pasca@pasca.unair.ac.id URL Address : http://www.pasca.unair.ac.id

Nomor : 1077 /J03.4/PP/2006

16 Mei 2006

Lamp :

Hal : Izin melaksanakan penelitian

Yth.1 Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur
2. Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Blitar

Guna penulisan penelitian untuk Tesis peserta Program Magister Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia angkatan tahun 2004/2005 Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

Nama : Sufi Agustini

Nim : 090410736 - L

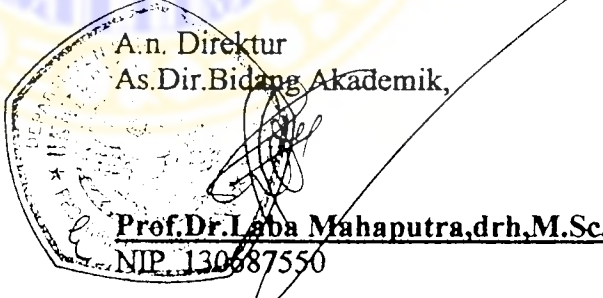
Judul : PENGEMBANGAN MODEL PENDAMPING SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN

Pembimbing : Dr.Sunarjo,dr,MS,M.Sc

Pembimbing I : Prof.Dr.Machmud Zain,SH,M.Si

Maka dengan ini kami mohon perkenan Saudara untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Instansi Saudara.

Demikian dan atas bantuan Saudara kami sampaikan terima kasih.

A.n. Direktur
As.Dir.Bidang Akademik,

Prof.Dr.Laba Mahaputra,drh,M.Sc.
NIP. 130687550

SKN-PPS-UA-06



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS SOSIAL**

JL. GAYUNG KEBONSARI NO. 56 - B TELP. 8290794
SURABAYA - 60235

Surabaya, 29 Mei 2006

Nomor : 070/1495 /110.001/2005
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ijin melaksanakan penelitian

Kepada
Yth. As. Dir Bidang Akademik Program
Pascasarjana Universitas Airlangga
di
SURABAYA

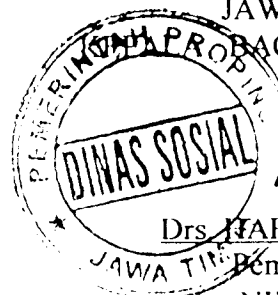
Menindaklanjuti surat saudara Nomor : 1073 / J03.4 / PP / 2006
tertanggal 16 Mei 2006, perihal Ijin melaksanakan penelitian
untuk Tesis Program Magister Program Studi Pengembangan Sumber Daya
Manusia, dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama : SUFI AGUSTINI
Nim : 090410736 - L
Judul : PENGEMBANGAN MODEL PENDAMPING SOSIAL
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM
PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN.

Selanjutnya diminta kepada saudara, apabila telah selesai
melaksanakan penelitian dimaksud, diharapkan memberikan laporan kepada
kami.

Demikian untuk manjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan
terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS SOSIAL PROPINSI
JAWA TIMUR
BAGIAN TATA USAHA



Drs. HARGANDONO, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 170 013 123

Tembusan :

Yth. Sdr. Sufi Agustini

PENGEMBANGAN MODEL PENDAMPING SOSIAL ...

SUFI AGUSTINI



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
JL. JENDERAL AHMAD YANI NO: 40 TELP. 801357
BLITAR

Blitar, 20 Juni 2006

Nomor : 460/573/409/114/2006
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Melaksanakan Penelitian


Kepada
Yth. Sdr. Direktur Program Pascasarjana
Universitas Airlangga
di
SURABAYA

Menunjuk Surat Saudara Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 10/3/jo3.4/PP/2006 tanggal 16 Mei 2006 perihal Ijin Melaksanakan Penelitian, bagi :

Nama : Sufi Agustin
NIM : 090410736 - 1.
Judul : Pengembangan Model Pendamping Sosial KUBE dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin

maka Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Blitar menyatakan *tidak keberatan / mengijinkan* atas penelitian dimaksud

Demikian dan terima kasih.

PIU. KEPALA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BLITAR

SUTJIPTO SUMEDI, SSos
Pembina
NIP. 510.074.874

Tembusan Kepada Yth :
Sdr. Sufi Agustin
di
Universitas Airlangga



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
JL. JENDERAL AHMAD YANI NO: 40 TELP. 801357
BLITAR

Blitar, 6 Juli 2006

Nomor : 460566/409.114/2006
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada
Yth Sdr. Direktur Program Pascasarjana
Universitar Airlangga
di
SURABAYA

Menunjuk Surat Saudara Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 1073/jo3.4/PP/2006 tanggal 16 Mei 2006 perihal Ijin Melaksanakan Penelitian, bagi :

Nama : Sufi Agustin
NIM : 090410736 - L
Judul : Pengembangan Model Pendamping Sosial KUBE dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin

maka Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Blitar menyatakan **SUDAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN**.

Demikian dan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BLITAR


SUTJIPTO SUMEDI, SSos

Pembina

NIP. 510 074 874

Tembusan Kepada Yth :

Sdr. Sufi Agustin
di

Universitas Airlangga